42855.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

STUDI EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SUKAMARA

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

A L I I S W A N D I

NIM. 500645204

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul "STUDI EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SUKAMARA" adalah hasil karya saya sendiri yang dikutif maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palangka Raya, 27 Nopember 2016
Yang Menyatakan

ALI ISWANDI
NIM. 500645204

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

ABSTRACT

"A STUDY OF REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING EVALUATION IN SUKAMARA REGENCY"

ALI ISWANDI
ali76iswandi@gmail.com

Graduate Studies Program Indonesia Open University

The purpose of this study was to analyze the effectiveness and efficiences of the law No. 25 of 2004 about the National Development Planning System in Sukamara Regency, and to analyze the factors that supported and obstructed in making of its planning documents. This research used Qualitative method. The result of this research showed that the process of making local regulations was suitable with the mechnism of legislation, however it did not involve the role of the stakeholers, such as the private sectors and society. The findings of this research stated that evaluation and participation were needed in preparing the document for development planning at the Sukamara Regency. The evaluation was done to choose and determine the priorities of the various alternatives known as Ex-ante evaluation (Planning Evaluation). The evaluation was one of aspects in managing the development. The results of the evaluation could to be used as considerations in the next decisions. The process of making the RKPD in the Sukamara Regency in 2015 was done by involving various stakeholders, such as from the regional gorvernment, the Representative of Sukamara regency, and delegations from universities. Beside that, it also involved the community leaders and religion leaders as the recognition of the establishment of the moto of Sukamara Regency, whichwas "Developing Sukamara from the Village". Their involvement have been begun since the Implementation of Development Planning Consultation of the Village Level, the district level, SKPD Forum until the Musrenbang in Sukamara Regency.

Keywords: Planning Document, Mechanism, Regency of Sukamara.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

ABSTRAK

"STUDI EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SUKAMARA"

ALI ISWANDI
ali76iswandi@gmail.com

Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektif dan efisien.Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) di Kabupaten Sukamara dan mengetahui faktor-faktor pendukung serta penghambat penyusuna dokumen perencanaan tersebutn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penyusunan perda telah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada, akan tetapi tidak melibatkan peran serta stakeholder terkait seperti pihak swasta dan masyarakat. Temuan penelitian ini menyatakan perlunya evaluasi dan partisipasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan di Kabupaten Sukamara Evaluasi juga dilakukan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif kemungkinan cara yang telah ditetapkan sebelumnya yang dikenal dengan evaluasi Ex-ante (Evalusi pada tahap perencanaan). Evaluasi merupakan salah satu aspek dalam siklus pengelolaan pembangunan yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Adapun Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2015 ini dilaksanakan melalui proses yang melibatkan berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan antara lain dari unsur Pemerintah Daerah bersama jajarannya, unsur DPRD Kabupaten Sukamara, Kelompok Ahli Pembangunan Kabupaten Sukamara sebagai perwakilan/delegasi Perguruan Tinggi. Disamping itu melibatkan juga kalangan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai perwujudan dari Moto Pembangunan Kabupaten Sukamara yaitu "Membangun Sukamara Dari Desa". Keterlibatan tersebut dimulai sejak dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa Terintegrasi, Tingkat Kecamatan, Forum SKPD sampai dengan Musrenbang Kabupaten Sukamara yang dilaksanakan pada tangga 27 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015.

Kata Kunci: Dokumen Perencanaan, Mekanisme, Kabupaten Sukamara.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

Judul TAPM	:	STUDI EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SUKAMARA
Penyusun TAPM	:	ALI ISWANDI
NIM	:	500645204
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal	:	Minggu/27 Nopember 2016

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. RADEN BIROUM B, M.Si	MADE YUDHI SETIANI, S.IP., M.Si., Ph.D
NIDN. 1123086902	NIP.197102191998022001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Magister Administrasi Publik,	Direktur Program Pascasarjana,
Dr. DARMANTO, M.Ed	SUCIATI, M.Sc., Ph.D
NIP. 195910271986031003	NIP. 195202131985032001

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama	:	ALI ISWANDI
NIM	:	500645204
Program Studi	:	MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
Judul TAPM	:	STUDI EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SUKAMARA

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Megister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal	:	Minggu/27 Nopember 2016
W a k t u	:	08.00 – 09.30

Dan telah dinyatakan LULUS

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji :
SUCIATI, M.Sc.,Ph.D .....

Penguji Ahli :
Prof. Dr. SANGKALA, M.Si .....

Pembimbing I :
Dr. RADEN BIROUM B, M. Si .....

Pembimbing II :
MADE YUDHI SETIANI, S.IP., M.Si., Ph.D .....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulisan tesis yang berjudul: **"STUDI EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SUKAMARA"**. dapat penulis selesaikan sebagai tugas akhir dalam menempuh studi program pascasarjana pada Program Magister Administrasi Publik di Universitas Terbuka Palangka Raya (S2).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan TAPM ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Dengan tersusunnya TAPM ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yth. Prof. Dr. SANGKALA, M.Si selaku Penguji Ahli, Yth. Dr. RADEN BIROUM, B. M.Si selaku Pembimbing I, Yth. MADE YUDHI SETIANI, S.IP. M.Si. PhD. selaku Pembimbing II, dan seluruh jajaran Universitas Terbuka UPBJJ Palangka Raya, yang berkenan memberi bimbingan, arahan dan masukan bagi tersusunnya Penelitian yang layak untuk disajikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

- Yth. Rektor Universitas Terbuka;
- Yth. Direktur Program Pascasarjana Terbuka;
- Yth. Ketua Program Pascasarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIP) Universitas Terbuka;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

- yang sangat dicintai isteri dan yang teramat disayangi anak - anak yang senantiasa menjadi inspirasi, memberi doa, dan dukungan selama berlangsungnya masa perkuliahan hingga memasuki masa penyelesaian perkuliahan;
- semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian pendahuluan; atas perhatian, perkenan dan bantuan yang telah diberikan hingga tersusunnya TAPM ini.

Dengan memperhatikan dan mengikuti bimbingan, arahan dan perbaikan dari Pembimbing, penulis berharap tugas akhir program magister ini dapat segera disajikan dalam Sidang dalam rangka memperoleh Gelar Magister Sains Dalam Ilmu *Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik*.

Pangkalan Bun, Nopember 2016

Penulis.

Ali Iswandi
NIM. 500645204

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

RIWAYAT HIDUP

N a m a	:	ALI ISWANDI
NIM	:	500645204
Program Studi	:	Administrasi Publik
Tempat / Tanggal Lahir	:	Pangkalan Bun, 29 Juli 1976
Riwayat Pendidikan	:	- Lulus SD di SD Negeri Kumpai Batu Bawah 1 Pada tahun 1989 - Lulus SMP di SMP Negeri 1 Pangkalan Bun Pada tahun 1992 - Lulus SMA di SMA Negeri 2 Pangkalan Bun Pada tahun 1995 - Lulus S-1 di Universitas Palangkaraya Pada tahun 2000
Riwayat Pekerjaan	:	Tahun 2003 s/d sekarang sebagai PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara
Alamat Kantor	:	Jl. Tjilik Riwut Km. 7,5 Sukamara
Alamat Rumah	:	Jl. Padat Karya RT.03 Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan Pangkalan Bun
No. Telp/Hp	:	085248162626

Sukamara, 27 Nopember 2016

Yang membuat,

ALI ISWANDI
NIM. 500645204

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

DAFTAR ISI

Halaman

Abstrak i
Lembar Persetujuan iii
Lembar Pengesahan iv
Kata Pengantar v
Riwayat Hidup vii
Daftar Isi viii
Daftar Tabel x
Daftar Gambar xi
Daftar Lampiran xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 14
C. Tujuan Penelitian 14
D. Manfaat Penelitian 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. KajianTeori 16
B. Penelitian Terdahulu 38
C. Kerangka Konseptual Penelitian 42
D. Operasionalisasi Konsep 42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian 49
B. Lokasi Penelitian 50
C. Sumber Data dan Pemilihan Informan 51
D. InstrumenPenelitian 54
E. Prosedur Pengumpulan Data 54
F. Metode Analisa Data 56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Wilayah Penelitian 58
B. Hasil Penelitian 70
C. Pembahasan 115

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 137

B. Saran 141

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal.
1.	Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	38
2.	Tabel 4.1 Jumlah desa/kelurahan dan luas wilayah berdasarkan Kecamatan Kabupaten Sukamara	61
3.	Tabel 4.2 Ketinggian Kabupaten Sukamara dalam Hektar (Ha)	62
4.	Tabel 4.3 Banyaknya curah hujan (mm) di Kabupaten Sukamara Tahun 2015	64
5.	Tabel 4.4 Jumlah penduduk perkecamatan di Kabupaten Sukamara berdasarkan jenis kelamin Tahun 2015	65
6.	Tabel 4.5 Jumlah penduduk menurut rumah tangga dan jenis kelamin perkecamatan di Kabupaten Sukamara berdasarkan usia Tahun 2015	66
7.	Tabel 4.6 Persentase penduduk berumur 15 Tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama Tahun 2015	66
8.	Tabel 4.7 Banyaknya sekolah, guru dan murid menurut jenis sekolah di Kabupaten Sukamara Tahun 2015	67

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

DAFTAR GAMBAR

Gambar Hal.

1. Gambar 4.1 Peta administrasi Kabupaten Sukamara 59
2. Gambar 4.2 Prosentase luas Kecamatan terhadap luas Kabupaten 61

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Pedoman Wawancara
2. Lampiran 2. Dokumentasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Urusan penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Kabupaten, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah ada yag disebut dengan Otonomi Daerah. Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya menjelmakan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Peranan yang diberikan selain dalam bentuk sarana dan prasarana baik itu yang berupa sarana fisik maupun subsidi langsung, yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemerintah daerah juga harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana untuk mendukung upaya percepatan pembangunan di daerah tertinggal serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya.

Dalam upaya mengoptimalkan perannya, pemerintah daerah juga perlu mendorong partisipasi pihak lain yang berkompeten dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, seperti pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Daerah juga perlu mendorong terjadinya koordinasi dan kerjasama antar wilayah yang melibatkan dua atau lebih wilayah yang berbeda. Penting juga diperhatikan adalah kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan data dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat serta berperan sebagai mitra konsultasi dalam proses percepatan pembangunan daerah tertinggal Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Oleh karena itu, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan SKPD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD; dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

RKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2015 adalah penjabaran tahun kelima dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2010-2015, dan sebagai tindak lanjut dari RKPD Tahun 2014, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh SKPD serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Disamping itu RKPD juga mengacu pada RKP dan RKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2015, terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Evaluasi juga dilakukan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif kemungkinan cara yang telah ditetapkan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

sebelumnya yang dikenal dengan evaluasi *Ex-ante* (Evalusi pada tahap perencanaan). Evaluasi merupakan salah satu aspek dalam siklus pengelolaan pembangunan yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Dengan memperhatikan prinsip *good governance*, khususnya dalam prinsip akuntabilitas kinerja pembangunan, seyogyanya kegiatan evaluasi pembangunan diselenggarakan dengan seksama, fokus, tajam, jujur, dan berhasil guna serta dilaksanakan dengan mengacu dokumen perencanaan yang sudah ada. Apalagi tahap perencanaan merupakan bagian hulu yang sangat menentukan kemana arah pembangunan akan bermuara, sehingga kualitas dokumen perencanaan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan/kegagalan suatu pembangunan yang direncanakan.

Dalam siklus manajemen pembangunan, komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus saling terkait, berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Adapun Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2015 ini dilaksanakan melalui proses yang melibatkan berbagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan antara lain dari unsur Pemerintah Daerah bersama jajarannya, unsur DPRD Kabupaten Sukamara, Kelompok Ahli Pembangunan Kabupaten Sukamara sebagai perwakilan/delegasi Perguruan Tinggi. Disamping itu melibatkan juga kalangan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai perwujudan dari Motto Pembangunan Kabupaten Sukamara yaitu "Membangun

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Sukamara Dari Desa". Keterlibatan tersebut dimulai sejak dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa Terintegrasi, Tingkat Kecamatan, Forum SKPD sampai dengan Musrenbang Kabupaten Sukamara yang dilaksanakan pada tangga 27 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015.

Dalam melaksanakan pembagunan tahun 2016, Sistem Inovasi Daerah merupakan salah satu pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh Kabupaten Sukamara. Sebagai suatu pendekatan pembangunan, sistim inovasi yang dimaksud disini pada dasarnya adalah suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan, kebijakan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi dan praktek serta proses pembelajarannya. Selain Sistim Inovasi, adapun pendekatan yang dikembangkan dalam penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

a. *Pendekatan politis*, RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang penyusunannya melalui pembahasan dengan melibatkan unsur DPRD dalam forum SKPD dan Musrenbang;
b. *Pendekatan partisipatif*, yaitu RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sukamara. RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang penyusunannya melalui pembahasan dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam forum SKPD dan Musrenbang;
c. *Pendekatan teknokratis*, yaitu penyusunan RKPD berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan sesuai dengan proyeksi perkembangan indikator

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

makro ekonomi dan perkiraan kemampuan keuangan daerah dengan melibatkan unsur Perguruan Tinggi;

d. *Pendekatan top-down planning*, yaitu sinergi dan komitmen perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada rencana pembangunan nasional melalui langkah-langkah penyampaian batasan umum oleh Pemerintah Pusat mengenai prioritas pembangunan Nasional dan usulan Kebutuhan Dana kepada Kementerian Negara.;

e. *Pendekatan bottom-up planning*, yaitu penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan identifikasi dan perangkingan progra-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dari tingkat desa maupuan kecamatan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan terintegrasi di Kabupaten Sukamara.

Sedangkan prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

a. *Sinergitas program dan kegiatan* diantara program/kegiatan ditingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional melalui Forum SKPD maupun Musrenbang baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.

b. *Mempertimbangkan kemampuan fiskal keuangan daerah* dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Pendanaan melalui penyusunan prioritas dari setiap SKPD.

c. Berpegang pada prinsip-prinsip *tata kelola Pemerintah yang bersih, profesional dan akuntabel serta menegakkan supremasi hukum* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Pelaksanaan Pembangunan bertujuan untuk menciptakan perubahan kearah yang lebih baik dengan mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam mewujudkan percepatan kesejahteraan rakyat. Percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan lebih mendekatkan palayanan kepada masyarakat. melalui penerapan sistem desentralisasi, sebagai pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam pengambilan keputusan baik politik maupun administratif.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan ditetapkannya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2015 adalah:

a. Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, DPRD masyarakat maupun dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sukamara.
b. Adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Sukamara
c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
d. Terciptanya penggunan sumber daya alam dan asumber daya manusia di Kabupaten Sukamara secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
e. Memberikan arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

f. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Sukamara.

Sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kecenderungan untuk menerapkan prinsip desentralisasi membuat daerah-daerah lebih memperhatikan aspirasi masyarakat lokal dalam pembangunan daerah. Fokus perhatian pemerintah (eksekutif) pun mulai memberikan peluang yang sangat besar untuk munculnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Secara eksplisit ditegaskan bahwa penerapan otonomi daerah secara mendasar adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran masyarakat. Dalam kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal yang krusial dan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab II pasal 2 ayat 4 disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkroniasasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa salah satu tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Artinya adalah bahwa sistem perencanaan pembangunan menekankan pendekatan partisipatif masyarakat atau yang biasa disebut perencanaan partisipatif.

Dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bagi daerah terdapat 5 ruang lingkup perencanaan daerah, yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RKSKPD), yang mana dari masing-masing rencana mensinergikan proses top down-bottom up guna terjadinya sinkronisasi antara masing-masing proses perencanaan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pemerintah daerah yang sudah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung harus memiliki dokumen rencana pembangunan mulai dari pembangunan jangka panjang hingga rencana pembangunan tahunan.

Namun prioritas utama adalah menyiapkan dokumen pembangunan jangka menengah yang mengadopsi visi, misi kepala daerah terpilih melalui serangkaian proses, sebagai panduan dalam menyelenggarkan pembangunan selama 5 tahun masa periode kepala daerah terpilih. Pemerintah Kabupaten Sukamara, telah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Adapun mekanisme pembuatan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini diatur melalui SE Mendagri 050/2020/Sj tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan RPJP daerah dan RPJM daerah. Dalam peraturan tersebut, sebagaimana juga yang diatur oleh UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah tersebut haruslah melibatkan partisipasi masyarakat.

Secara sederhana, organisasi bisa diartikan sebagai suatu alat atau wadah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dengan pola tertentu yang perwujudannya memiliki kekayaan baik fisik maupun non fisik. Sehingga bisa dimungkinkan terjadinya suatu konflik dalam sebuah organisasi yang dikarenakan oleh adanya ketidakselarasan tujuan, perbedaan interpretasi fakta, ketidaksepahaman yang disebabkan oleh ekspektasi perilaku dan sebagainya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Konsistensi vertikal mensyaratkan bahwa kebijakan yang sama harus dikejar dari waktu ke waktu sedangkan konsistensi horizontal melihat perkembangan atau kesesuaian beberapa kebijakan dengan yang lainnya pada waktu yang sama.

Konsistensi yang pertama (vertikal) membutuhkan kontinuitas sebuah rezim pemerintahan yang kuat yang mampu menerapkan preferensinya. Konsistensi kedua (horizontal) membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana kebijakan tersebut saling berinteraksi. Hal ini menuntut syarat, yang satu membutuhkan sikap tegas/kekakuan untuk menjamin kebijakan itu berlangsung, yang lain sikap fleksibilitas untuk mengakomodasi antar kebijakan tersebut agar dapat berjalan. Bersikap tegas dan fleksibel secara bersamaan cukup sulit untuk dijalankan.

Arah yang berbeda tersirat dalam konsistensi yang dikatakan bahwa kebaikan dalam konsistensi tidak harus diambil untuk dilaksanakan, tapi juga mungkin diinginkan untuk mendapatkan strategi utama dengan menaruhkan banyak energi dan pengabdian, yang dapat membuktikan harga dari suatu nilai taruhan. Konsistensi menyelamatkan banyak pengorbanan untuk sebuah kesuksesan, tetapi juga mempertaruhkan kegagalan. Jika beberapa kebijakan yang berbeda sedang dikejar di daerah yang sama, hal ini dapat bertentangan satusama lain, tetapi ada juga kemungkinan bahwa hal tersebut dapat berhasil.

Konsistensi tidak selalu kompatibel dengan kebaikan dari adaptasi. Meskipun mungkin diharapkan untuk mencapai suatu keadaan yang stabil. Ada keadaan dimana tujuan tidak berubah walaupun dilaksanakan dengan banyak cara, namun ada juga keadaan dimana pengalaman menyebabkan manusia beradaptasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

dengan perubahan keadaan yang mengubah tujuan mereka.

Terkait dengan kewajiban SKPD dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa "Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai "Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka Bappeda Sukamara sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pemkab Sukamara, berkewajiban untuk menyiapkan Renja dan RKPD sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kedepan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Renja dan RKPD adalah dokumen perencanaan untuk tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bappeda Sukamara dan bersifat indikatif.

Bappeda Kabupaten Sukamara diharapkan mampu menjadi ujung tombak sumber inspirasi dalam merespon segala perubahan lingkungan strategis dalam usaha merumuskan kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Sukamara, dengan visi *"Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sukamara yang Terarah dan Terpadu"*

Mengacu pada masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengajukan TAPM sebagai berikut: **"STUDI EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SUKAMARA"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang diatas, maka perlu kiranya untuk mencari tahu bagaimana akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Sukamara dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan:

1. Bagaimanakah perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sukamara?
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan Kabupaten Sukamara?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sukamara
2. Menganalisa faktor pendukung dan faktor penghambat perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sukamara

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

   Sebagai bahan pertimbangan antara teori, serta ilmu dan pengetahuan yang di peroleh di bangku studi serta kenyataan yang ada dilapangan dapat diterapkan pada organisasi Kantor Bappeda Kabupaten Sukamara.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan dalam rangka pemecahan masalah pengembangan sumber daya manusia dan kinerja pegawai serta dapat mengetahui apakah pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk diadakan dan dilaksanakan terutama pendidikan dan pelatihan bagi para pegawainya karena mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai Kantor Bappeda Kabupaten Sukamara.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1 Pengertian Desentralisasi

Secara teoritik, kemampuan pemerintah antara lain terbentuk melalui penerapan azas desentralisasi, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahnya secara hierarkis (Ryaas Rasyid, 1997). Melalui pelimpahan wewenang itulah pemerintah pada tingkat bawah diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreativitas, mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Selain itu menurut Rondinelli (1988) dalam Bambang Yudoyono (2003), desentralisasi juga dapat dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundang-undangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen pemerintahan dari pemerintah pusat kepada unit-unit sub nasional (daerah/wilayah) Administrasi Negara atau kepada kelompok-kelompok fungsional atau organisasi non pemerintahan / swasta.

Kemudian Smith dalam Herman Hidayat (2008) mendefinisikan desentralisasi dari perspektif politik sebagai pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke lokal, yakni dari tingkatan atas ke lebih rendah dalam *hierarchi territorial*. Dari definisi yang diberikannya, Smith menekankan devolusi kekuasaan adalah substansi utama desentralisasi dan tidak terbatas pada susunan pemerintahan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia, yang secara utuh dan bulat dilaksanakan pada daerah kabupaten dan kota. Pengertian ini sesuai dengan hakekat dari desentralisasi yakni "*delegation of authority and responsibility*". Tujuan desentralisasi menurut Maryanov (Widodo; 2001,45) adalah sebagai "*it is a method for spreading government to all parts of the country; it is a method for accomodating regional differences, regional aspiration and regional demmands within to confines of the unitary state*".

Sementara itu, Maryanov (Widodo; 2001:82), mengemukakan tujuan desentralisasi adalah untuk :

1. Mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil pada tingkat lokal. Demikian pula memberikan peluang untuk koordinasi pelaksanaan pada tingkat lokal.
2. Meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi. Demikian pula pada tingkat lokal, dapat merasakan keuntungan dari pada kontribusi kegiatan mereka itu.
3. Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis.
4. Melatih rakyat untuk bisa mengatur urusannya sendiri (*self-government*).
5. Pembinaan kesatuan nasional.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

6. Tujuan desentralisasi secara politik yaitu yang ditujukan untuk menyalurkan partisipasi politik ditingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik nasional.
7. Tujuan desentralisasi secara ekonomis yaitu yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Sekalipun tujuan utama dari desentralisasi adalah politik dan ekonomi, namun demikian menurut Maryanov (Widodo; 2001:46) ada 4 faktor utama yang dapat menentukan sukses atau gagalnya desentralisasi yaitu :

1. Besarnya dukungan yang diberikan oleh pimpinan-pimpinan politik dan birokrat ditingkat pusat terhadap kebijakan desentralisasi melalui kewenangan- kewenangan didelegasikan.
2. Sejauh mana kebijakan-kebijakan dan program-program didelegasikan untuk mendukung desentralisasi terutama dalam pengambilan keputusan dan administrasi.
3. Sejauhmana perilaku, sikap dan kultur dari birokrasi kondusif terhadap proses desentralisasi terutama dalam pengambilan keputusan dan administerasi.
4. Sejauhmana adanya dukungan yang memadai dalam bentuk keuangan, tenaga kerja/personel dan sumber-sumber daya lainnya terhadap proses desentralisasi.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Rondinelli (Widodo; 2001, 43) mengemukakan beberapa keunggulan desentralisasi, diantaranya :

1. Desentralisasi merupakan alat untuk mengurangi kelemahan perencanaan terpusat. Dengan delegasi kepada aparat di tingkat lokal, problema sentralisasi dapat lebih mudah dipecahkan.
2. Desentralisasi merupakan alat yang bisa mengurangi gejala red tape.
3. Dengan desentralisasi maka kepekaan dan pengetahuan tentang kebutuhan masyarakat lokal dapat ditingkatkan.
4. Dengan desentralisasi lebih memungkinkan berbagai kelompok kepentingan dan kelompok politik terwakili dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan pemerintah.
5. Struktur pemerintahan yang yang desentralistis sangat diperlukan untuk melembagakan partisipasi warga negara dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan.
6. Dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam masyarakat dan pemerintahan, pengambilan keputusan yang sentralistis menjadi tidak efisien, mahal dan sulit dilaksanakan.

Terdapat beberapa kekurangan dari Desentralisasi yaitu Interpretasi Marxist tampaknya masih cenderung melihat negara sebagai satu kesatuan dan tidak perlu dipisah-pisah antar wilayah geografis. Terdapat beberapa penjelasan yang melandasi ketidak berpihakan pandangan ini terhadap desentralisasi. Pertama, pandangan ini melihat bahwa pembagian wilayah dalam konteks desentralisasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

hanya akan menciptakan kondisi terjadinya akumulasi modal sehingga memunculkan kembali kaum kapitalis. Kedua, desentralisasi juga akan mempengaruhi konsumsi kolektif sehingga akan dipolitisasi. Konsumsi kolektif dimaksudkan untuk memberikan pelayanan atas dasar kepentingan semua kelas.

Desentralisasi hanya akan menghasilkan ketidak-adilan baru dalam konsumsi kolektif antar wilayah. Ketiga, meskipun demokrasi pada dasarnya akan menempatkan mayoritas dalam pemerintahan daerah (yang berarti seharusnya kelas pekerja yang mendominasi, tetapi ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh kaum kapitalis untuk menghalang-halangi munculnya kelas pekerja dalam pemerintahan. Lembaga-lembaga perwakilan dalam pemerintahan daerah tetap merupakan simbol demokrasi liberal dan tetap akan dikuasai oleh kaum kapitalis. Keempat, dalam kaitannya dengan hubungan antar pemerintahan, maka pemerintah daerah hanya menjadi kepanjangan aparat pemerintah pusat untuk menjaga kepentingan monopoli kapital. Dalam bidang perencanaan, desentralisasi juga tidak akan pernah menguntungkan daerah-daerah pinggiran dan membiarkannya dengan melindungi daerah kapitalis. Desentralisasi juga menghindarkan redistribusi keuangan dan pajak dari daerah kaya ke daerah miskin. Desentralisasi hanya akan menghilangkan tanggung jawab kaum borjuis terhadap daerah-daerah yang tertekan. Kelima, terdapat berbagai rintangan mengenai bagaimana demokrasi lokal akan berjalan dalam suasana desentralisasi. Rintangan ini mencakup aspek ekologis, politik, dan ekonomi yang menyebabkan demokrasi di tingkat lokal hanya akan mengalami kegagalan. Menurut pandangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Marxist semua ini hanya akan dapat ditanggulangi oleh sentralisasi yang bertujuan untuk redistnbusi dan keadilan.

2. Teori Evaluasi

a. Evaluasi

Evaluasi terkadang sering diartikan secara sempit dan bahkan tidak tepat. Masih banyak yang memandang evaluasi itu hanya didasarkan pada kegiatan-kegiatan atau program yang dianggap menonjol. Salah satu kesalahan yang terjadi, misalnya evaluasi hanya dipandang sebagai sekedar penilaian semata. Untuk itu, perlu dilakukan pemahaman mengenai apa itu evaluasi. Berikut ini diberikan definisi evaluasi untuk dapat dijadikan acuan atau perbandingan. Evaluasi adalah proses mengumpulkaninformasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar dan indikator (Lamsuri dkk. 2011).

Arifin (2012), menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu keputusan. Mardikanto dan Soebianto (2013) mengemukakan bahwa tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan, atau untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara keadaan yang telah dicapaidengan keadaan yang dikehendaki atau seharusnya dapat dicapai.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Evaluasi diartikan sebagai suatu usaha untuk mengukurdan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasilpelaksanaan (program/kebijakan) yang telah direncanakan sebelumnya dandilakukan secara sistematis dan obyektif dengan menggunakan metode evaluasi yang relevan. (Kelengkapan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Pada dasarnya, tetap ada tiga kriteria yang berusaha dinilai dalam suatu proses evaluasi, yaitu:

1) Efisiensi, yaitu terkait dengan seberapa efisien penggunaan sumber daya dalam memproduksi keluaran (output) program yang ditargetkan.
2) Efektivitas, yaitu kesesuaian hasil dengan ketercapaian tujuan, sasaran dan arahan kebijakan program.
3) Responsivitas, yaitu menilai apakah hasil suatu kebijakanmemuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu. Kepuasan *stakeholders* ini menjadi salah satu dasar asumsi untuk menilai dampak yang dirasakan *stakeholders* atas suatu program, dalam pengertian apakah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

dampak yang dirasakan itu positif atau tidak.

Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda yaitu Evaluasi pada tahap perencanaan (ex-ante), Evaluasi pada tahap pelaksanaan (on-going) dan evaluasi padatahan pasca-pelaksanaan (ex-post). Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante). yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi pada Tahap Pasca Pelaksanaan (ex-post) yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan.

Banyak sudah bertebaran rumusan evaluasi yang dilayangkan oleh para ahli dan praktisi manajemen dan evaluasi. Kita saksikan beberapa definisi evaluasi berikut: Berupaya mengukur relevansi, efisiensi dan efektivitas program. Ia mengukur apakah atau seberapakah masukan atau layanan program telah memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Kegiatan yang dibatasi waktu, yang bertujuan untuk menilai sesuatu hal dengan perbandingan pada serangkaian kriteria tertentu (hasil yang diharapkan).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

b. Evaluasi Empiris

Evaluasi Empiris yaitu melihat apa dan bagaimana konsep dan framework pelaksanaan mitigasi bencana di provinsi dan kabupaten. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh data lapangan dan memetakan strategi mitigasi bencana di beberapa tingkatan pemerintahan yang berlaku selama ini. Hasil pemetaan ini juga akan menjadi dasar untuk memilah dan menganalisa kegiatan mitigasi bencana di sejumlah departemen/lembaga dan pemerintah daerah.

Pendekatan Evaluasi Kebijakan.

Menurut Masri Singarimbun (1995), dalam melakukan evaluasi terhadap suatu program/kebijakan, dapat digunakan sejumlah pendekatan yang berbeda yang tentunya akan mempengaruhi indikator yang digunakan, antara lain :

1. Pendekatan Berdasarkan, Sistem Nilai yang Diacu. Pendekatan berdasarkan sistem nilai yang diacu ada tiga jenis, yaitu evaluasi semu, evaluasi teori keputusan dan evaluasi formal.
   a. Evaluasi Semu (Pseudo Evaluation) Sifat dari Evaluasi semu ini adalah melakukan penilaian berdasarkan parameter tertentu yang secara umum disepakati (self evident) dan tidak kontroversial (uncontroversial). Hasil evaluasinya mudah diterima oleh publik dan tidak terlalu rumit (complicated). Penilaiannya berkisar antara gagal atau berhasil. Pseudo evaluation ini seringkali dijadikan sebagai salah satu metode monitoring.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

b. Evaluasi Teori Keputusan (Decision Theoretic Evaluation/ DTE) Sifat dari DTE adalah melakukan penilaian berdasarkan parameter yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait secara langsung/pihak yang bersitegang. Sistem nilainya juga berdasarkan kesepakatan antara pihak yang bersitegang. Biasanya berkisar antara benar atau salah.

c. Evaluasi Formal (Formal Evaluation) Sifat dari evaluasi formal adalah melakukan penilaian berdasarkan parameter yang ada pada dokumen formal seperti tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen kebijakan rencana tata ruang, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

Dalam evaluasi formal, metode yang ditempuh untuk menghasilkan informasi yang valid dan reliable ditempuh dengan beberapa cara antara lain:

1) Merunut legislasi (peraturan perundang-undangan);
2) Merunut kesesuaian dengan kebijakan yang tercantum pada dokumen formal yang memiliki hierarki diatasnya;
3) Merunut dokumen formal (kesesuaian dengan hasil yang diharapkan /tujuan dan sasaran); dan Interview dengan penyusun kebijakan atau administrator program.

Evaluasi formal terbagi atas 2 jenis, yaitu *summative evaluation dan formative evaluation*. *Summative evaluation* adalah upaya untuk mengevaluasi program/kegiatan yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu, umumnya dilakukan untuk mengetahui/mengevaluasi program/kegiatan yang relatif sering dilakukan dan karena indikatornya tetap/baku. *Formative evaluation* adalah upaya

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara kontinyu, karena merupakan program/kegiatan yang relatif baru dan indikatornya dapat berubah-rubah.

Menurut Sugiyono, (1998) bahwa; Pendekatan Berdasarkan Dasar Evaluasi Pendekatan yaitu: *Before vs after comparison* (pembandingan antara sebelum dan sesudah) Karakteristik dari pendekatan jenis ini antara lain hanya berlaku untuk satu komunitas yang sama dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah adanya intervensi.

2. Pendekatan Berdasarkan Kriteria Evaluasi Pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi terbagi atas indikator, yaitu:- Efektivitas Penilaian terhadap efektivitas ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil/tujuan. Parameternya adalah ketepatan waktu
   a. Efisiensi Penilaian terhadap efisiensi ditujukan untuk menjawab pengorbanan yang minim (usaha minimal) untuk mencapai hasil maksimal. Parameternya adalah biaya, rasio, keuntungan dan manfaat. Adequacy/ketepatan dalam menjawab masalah Penilaian terhadap adequacy ditujukan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian hasil dapat memecahkan masalah.
   b. Equity / pemerataan Penilaian terhadap equity ditujukan untuk melihat manfaat dan biaya dari kegiatan terdistribusi secara proporsional untuk aktor-aktor yang terlibat.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

c. Responsiveness Penilaian terhadap responsiveness ditujukan untuk mengetahui hasil rencana/kegiatan/kebijaksanaan sesuai dengan preferensi/keinginan dari target grup.

d. Appropriateness/ketepatgunaan Penilaian terhadap ketepatgunaan ditujukan untuk mengetahui kegiatan/rencana/kebijaksanaan tersebut memberikan hasil/ keuntungan dan manfaat kepada target grup. Standar tingkat keuntungan dan manfaat sangat relatif sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada target grup tersebut.

Dalam mengevaluasi suatu kebijakan, analis akan dihadapkan pada 3(tiga) aspek yaitu :

1. Aspek perumusan kebijakan, pada aspek ini analis berusaha mencari jawaban bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan. siapa yang paling berperan dan untuk siapa kebijakan tersebut dibuat.
2. Aspek implementasi kebijakan, pada aspek ini analis berusaha untuk mencari jawaban bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. apa faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana performance dari kebijakan tersebut. Aspek ini merupakan proses lanjutan dari tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan-tujuan kebijakan sedangkan pada tahap implementasi kebijakan, tindakan (action) diselenggaran dalam mencapai tujuan. Menurut Bressman dan Wildavsky (Sugiyono, 1999) implementasi adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, para ahli kebijakan publik banyak

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

menggunakan model implementasi yang salah satunya adalah model Merilee S Grindle (1980). menyajikan 3 (tiga) komponen kelayakan yaitu: 1) tujuan kebijakan, 2) aktivitas pelaksanaan yang dipengaruhi oleh content yang terdiri atas kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan, posisi pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumber daya yang dilibatkan dan context yang terdiri atas : kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dilakukan pelaksana; karakteristik rezim dan lembaga; compliance serta responsiveness. Model ini menggambarkan semua variabel yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan hasil kebijakan.

3. Aspek evaluasi, pada aspek ini analis berusaha untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kebijakan, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Evaluasi kebijakan menurut Samudro, dkk (1994) dilakukan untuk mengetahui: 1) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi; 3) konsekuensi kebijakan; 4) efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi pada tahap pertama, dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan, kedua evaluasi tersebut evaluasi sumatif dan formatif, evaluasi untuk tahap kedua disebut evaluasi implementasi, evaluasi ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.

Sedangkan analisis evaluasi kebijakan mengkaji akibat-akibat pelaksanaan suatu kebijakan dan membahas hubungan antara cara-cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian studi evaluasi kebijakan (Sudiyono, 1994) merupakan suatu analisis yang bersifat evaluatif sehingga konsekuensinya lebih

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

restrospeksi dibandingkan prospeksi. Dan dalam mengevaluasi seorang analis berusaha mengidentifikasi efek yang semula direncanakan untuk merealisir suatu keberhasilan dan dampak apa yang ditimbulkan dari akibat suatu kebijakan.

Studi evaluasi ini mempunyai 2 (dua) pendekatan (Sudiyono.1994) yaitu :

1. Pendekatan kepatuhan, asumsinya apabila para pelaksana mematuhi semua petunjuk atau aturan yang diberikan maka implementasi sudah dinilai berhasil. Kemudian pendekatan ini disempurnakan lagi dengan adanya pengaruh: a) ekstern, kekuatan non birokrasi dalam pencapaian tujuan, b) intern, program yang dimaksudkan untuk melaksanakan suatu kebijakan sering tidak terdesain dengan baik sehingga perilaku yang baik dari para pelaksana (birokrasi) tetap tidak akan berhasil dalam mencapai tujuan kebijakan.
2. Pendekatan perspektif, "*what's happening* (apa yang terjadi). Pendekatan ini menggambarkan pelaksanaan suatu kebijakan dari seluruh aspek karena implementasi kebijakan melibatkan beragam variabel dan faktor.

Dalam studi evaluasi, menurut Finsterbusch dan Motz (dalam Samudro dkk. 1994) terdapat 4 (empat) jenis evaluasi yaitu :

1. *Single program after only*, merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program. Sehingga analis tidak mengetahui baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap program.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

2. *Single program before-after*, merupakan penyempurnaan dari jenis pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum dan setelah program berlangsung.
3. *Comparative after only*, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tapi tidak untuk yang pertama dan analis hanya melihat sisi keadaan sasaran bukan sasarannya.
4. *Comparative before-after*, merupakan kombinasi ketiga desain sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok sasaran.

3. Teori Evaluasi Perencanaan

Evaluasi perencanaan adalah penilaian yang sistematis pada aspek lingkungan, social, ekonomi, fiscal, dan implikasi infrastruktur pada guna lahan dan rencana pengembangan. Dalam teori, evaluasi merupakan perbandingan kuantitatif dari alternative-alternatif rencana pada hasil yang actual atau potensial dari tujuan dan sasaran yang dipilih (Kaiser, et al, 1995:426).

Menurut Kaiser, 1995, analisis kebijakan dapat dilakukan sebelum dan setelah kebijakan diimplementasikan. Analisis kebijakan secara deskriptif terkait dengan analisis historis kebijakan yang telah ada dan evaluasi kebijakan baru. Istilah analisis kebijakan secara deskriptif yaitu analisis kebijakan ex-post, post-hoc, atau analisis kebijakan retrospective. Selanjutnya, istilah tersebut dibagi menjadi dua yaitu retrospective dan evaluatif, dimana analisis kebijakan retrospective mendeskripsikan dan menginterpretasikan kebijakan yang telah ada, sedangkan analisis kebijakan evaluatif terkait dengan evaluasi program

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

apakah program tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Sinambela, L. P. 2006).

Analisis kebijakan yang memfokuskan pada outcome dari tujuan kebijakan disebut ex-ante, pre-hoc, anticipatory, atau analisis kebijakan prospective. Analisis ini lebih dahulu implementasi kebijakan dapat dibagi menjadi analisis kebijakan predictive dan prescriptive. Analisis kebijakan predictive merupakan proyeksi dari hasil alternatif-alternatif di masa datang, sedangkan analisis kebijakan prescriptive mengacu pada analisis yang merekomendasikan suatu tindakan karena tindakan tersebut akan membawa hasil tertentu. Analisis kebijakan prescriptive menampilkan hasil analisis dan memberi rekomendasi. Asumsinya yaitu analis memahami nilai, tujuan, dan sasaran (Sinambela, L. P. 2006)

Tipe-tipe evaluasi perencanaan

Ada dua tipe evaluasi perencanaan yaitu *preadoption evaluation* dan *postadoption* monitoring dan evaluasi.

1) *Preadoption evaluation*. Sebelum adopsi, evaluasi perencanaan merupakan alat untuk merancang dan membuat keputusan. Perencana dapat menggunakan evaluasi untuk membandingkan alternative desain dan menyarankan peningkatan (Kaiser, et al, 1995:434).
2) *Postadoption* monitoring dan evaluasi. Setelah rencana guna lahan diadopsi kemudian diimplementasikan untuk melihat bagaimana perencanaan dapat berjalan pada prakteknya. Monitoring dan evaluasi merupakan proses untuk mengumpulkan informasi pada hasil/outcome dari

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

implementasi rencana guna lahan dan program manajemen pengembangan. Hal tersebut digunakan untuk mengukur progress dalam pencapaian tujuan, sasaran, dan keijakan; untuk mengidentifikasi revisions needed untuk merespon perubahan kondisi regional dan local; dan menyediakan informasi pada kecenderungan dan kondisi (Kaiser, et al, 1995:437). Langkah pertama dalam merancang monitoring dan evaluasi adalah memilih tujuan rencana. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi sumber data, memilih data yang dikumpulkan, dan establish koleksi dan recording prosedur (Kaiser, et al, 1995:438).

4. Teori Perencanaan Pembangunan

Konsep dasar perencanaan adalah rasionalitas, ialah cara berpikir ilmiah dalam menyelesaikan problem dengan cara sistematis dan menyediakan berbagai alternatif solusi guna memperoleh tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu perencanaan sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat dalam mengembangkan budaya ilmiah dalam menyelesaikan Tugas Filsafat dan Teori Perencanaan Pembangunan 2 permasalahan yang dihadapinya. Hal ini cukup beralasan karena perencanaan juga berkaitan dengan pengambilan keputusan (decision maker), sedangkan kualitas hasil pengambilan keputusan berkorelasi dengan pengetahuan (knowledge), pengalaman (experience), informasi berupa data yang dikumpulkan oleh pengambil keputusan (ekskutor). Untuk lebih jelasnya dapat di lihat kembali pada kurva/grafik spatial data dan decesion.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Menurut friedmann, perencanaan akan berhadapan dengan problem mendasar yakni bagaimana teknis pengetahuan perencanaan yang efektif dalam menginformasikan aksi-aksi publik. Atas dasar tersebut maka perencanaan didefinisikan sebagai komponen yang menghubungkan antara pengetahuan dengan aksi/tindakan dalam wilayah publik. Pada prinsipnya friedmann menyatakan perencanaan harus bertujuan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Disisi lain Sugeng Husain, (2012) menyatakan bahwa dalam pembangunan Kota atau daerah dipengaruhi sistem ekonomi kapitalis atau demokratis. Dalam konteks tersebut maka pada prakteknya perencanaan tidak dapat dipisahkan dengan suasana politik kota atau daerah sebab keputusan-keputusan publik mempengaruhi kepentingan kepentingan lokal. Hal ini menjadi relevan apabila kekuasaan mempengaruhi perencanaan. Ketika perencanaan telah dipengaruhi oleh sistem politik suatu kota atau daerah sebagaiman pernyataan di atas, maka sebenarnya yang terjadi adalah wilayah rasional yang menjadi dasar dalam perencanaan telah kehilangan independensinya. Selanjutnya perencanaan akan menjadi tidak efektif dan efesien, bersifat mendua antara idealisme "kepakaran seorang perencana" atau mengikuti selera atau kemauan-kemauan, sehingga berimplikasi pada kualitas perencanaan dalam pencapaian goal (tujuan) dan objektif (sasaran) yang dituju.

Disamping itu karena perencanaan merupakan pekerjaan yang menyangkut wilayah publik maka komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat sangat dibutuhkan sehingga hasil perencanaan dapat dibuktikan dan dirasakan manfaatnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Perencanaan Pembangunan Nasional menurut Teori Tradisional

Pemerintah memiliki wadah yang sangat luas dalam pembangunan. Dengan adanya keterbukaan dalam proses penyelenggaraana negara maka pemerintah mendorong masyarakat untuk berpartisifasi aktif dalam pemerintahan atau dalam pelaksanaan pembangunan, mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap setiap kebijaksanaan pemerintah, sehingga akan terhindar terjadinya KKN dalam pemerintahan.

Dengan keterbukaan berarti pemerintah atau penyelenggara negara sanggup bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan kepada rakyat. Tanggungjawab ini menyangkut masalah proses pengerjaan, pembiayaan dari segi manfaatnya bagi masyarakat, bangsa dan negara, maka terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat yang pada gilirannya akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Menurut Deliarnov (1995) bahwa teori pertumbuhan ekonomi dapat dikemukakan menjadi beberapa tahap yaitu :

Tahap Masyarakat Tradisional

Masyarakat menciptakan produksi yang amat rendah sehingga pendapatan per kapita yang kurang pemerataan, di bidang pertanian sumber tenaga mesin sangat kurang maka masyarakat atau pemerintah bahan memperbaiki kondisi ekonomi sosial dan budaya berbagai komunitas menginvestasikan ke dalam kehidupan bangsa, menciptakan kemampuan menjalankan bangsa.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Tahap Masyarakat Dewasa

Tahap masyarakat dewasa dalam arti masyarakat yang mampu memilih dan memberi respon terhadap perubahan dan mampu mengendalikan masa depannya sehingga tidak bergantung kepada pihak lain.

Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah suatua proses kegiatan masyarakat atas prakata sendiri atau pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi sosial dan budaya berbagai komunitas, mengintrogasikan berbagai komunitas ke dalam kehidupan bangsa, menciptakan kemampuan memajukan bangsa secara terpadu. Pembangunan daerah adalah proses kegiatan, masyarakat daerah dalam memperbaiki kondisi ekonomi sosial dan budaya yang bertempat tinggal di suatu daerah tertentu.

Menurut Bintoro Tjokroaminoto (1998), perencanaan ialah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistimatis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Tujuan Perencanaan :

a. Standar pengawasan, yaitu mencocokan pelaksanaan dengan perencanaan
b. Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan
c. Mengetahui struktur organisasinya
d. Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan
e. Memimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif
f. Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan
g. Menyerasikan dan memadukan beberapa subkegiatan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

h. Mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui

i. Mengarahkan pada pencapaian tujuan

j. Menghemat biaya, tenaga dan waktu

Manfaat Perencanaan

Adapun manfaat dari perencanaan yaitu Manfaat Perencanaan :

a. Standar pelaksanaan dan pengawasan

b. Pemilihan sebagai alternatif terbaik

c. Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan

d. Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi

e. Membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan

f. Alat memudahakan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait

g. Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti

Dalam konteks pembangunan, dipahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni :

1) Penyusunan rencana;

2) Penetapan rencana;

3) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan

4) Evaluasi pelaksanaan rencana

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
c. Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut juga dengan Rencana Kerja Pemerintah.

Dokumen rencana pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah sebagai berikut :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
c. Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
d. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan pada masa depan dengan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini disusun dengan maksud untuk

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

melakukan efisiensi yaitu mencegah terjadinya pemborosan karena kegiatan-kegiatan yang kurang tepat.

Selain itu juga agar terciptanya efektifitas dalam pencapaian tujuan pembangunan. *The Indonesia Country Strategy and Program* (CSP) bertujuan untuk membantu Pemerintah Indonesia (Pemerintah) mencapai pembangunan jangka menengah. Lima daerah keterlibatan yang diidentifikasi dalam CSP untuk mencapai tujuan-tujuan: perbaikan infrastruktur dan prasarana pelayanan, sebuah memperdalam sector keuangan, desentralisasi diperbaiki, dipercepat Pencapaian MDG, dan memperkuat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, dengan fokus tematis utama mengenai tindakan pemerintahan dan anti korupsi di semua operasi.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan formulasi yang sejenis adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi	Persamaan Hasil Penelitian	Perbedaan Hasil Penelitian	Lokasi Penelitian
1.	Haspiarti	Implementasi Penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah	Kualitatif	Anggaran pada SKPD terkait erat terhadap kinerja aparatur	Dokumen RPJPD terhadap RPJMD sangat baik, karena adanya keterkaitan antara visi dan misi daerah. Dokumen	Ujung Pandang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

					RPJMD terhadap RKPD memiliki tingkat konsistensi yang dapat dikatakan baik.	
2.	Sugeng Husain	Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik	Kualitatif	Pelayanan Publik harus tranparan serta memiliki akuntabilitas	Menunjukan secara simultan variabel perubahan Silpa, perubahan PAD dan perubahan DBH berpengaruh signifikan terhadap perubahan belanja barang dan jasa pada pemerintah daerah di Indonesia.Secaraparsial hanya perubahan Silpa yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan belanja barang dan jasa. Sedangkan perubahan PAD dan	Palembang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

					perubahan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja barang dan jasa pada pemerintah daerah di Indonesia	
3.	Iin Nawati	Akuntabilitas Aparatur dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tulang Bawang	Deskriptif Kualitatif	Kabupaten Lampung Selatan dalam pengembangan pariwisatanya diperlukan pengembangan aparatur serta tata laksana dengan analisis menggunakan	Bahwa prosedur penyusunan anggaran di Tulang Bawang sudah sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, selisih pendapatan dan belanja	Tulang Bawang
4.	Joko Surahmat	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Deskriptif eksploratif	AKIP sebagai alat untuk melihat indicator capaian sebuah SKPD	Bahwa pada proses penyusun Akuntabilitas Kinerja Aparatur (LAKIP) Kota Malang	Kota Malang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

5.	Nurul Mukhilda	Akuntabilitas pelayanan publik (studi kasus: penyelenggaraan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Makassar)	Kualitatif	Perizinan Terpadu dalam memberikan ijin bagi migas	Upaya dan komitmen bersama antara antara Pemda dan DPRD dalam Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan. Dan untuk itu perlu mengalokasikan anggaran sesuai prioritas diantaranya membelanjakan atas pertimbangan paling penting secara politik.	Makassar

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan tersebut di atas, menunjukan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seharusnya dapat dilaksanakan, namun dalam kenyataannya perda tersebut belum dilaksanakan. Apabila memperhatikan deskripsi penelitan sebagaimana uraian di atas, maka jelas penelitian ini memiliki keunikan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

C. Kerangka Konseptual Penelitian

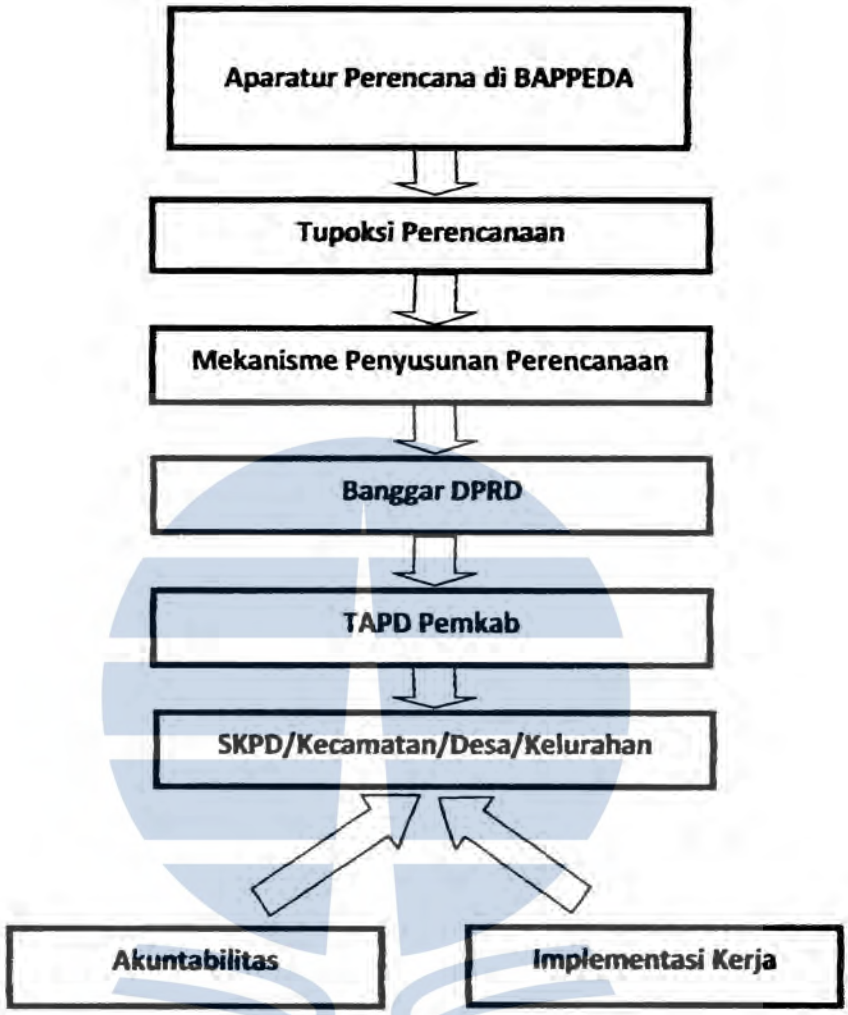

D. Operasionalisasi Konsep

Konsep merupakan istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, kelompok, atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial (Singarimbun, 1995 : 33).

Salah satu fungsi manajemen yang paling utama adalah Perencanaan karena dari fungsi tersebutlah fungsi-fungsi lain disusun. Perencanaan merupakan cetak biru untuk pencapaian tujuan yang memuat pengalokasian sumberdaya yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dibutuhkan, jadwal, tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan terkait dengan pencapaian tujuan tersebut. Dapat dikatakan bahwa sebuah rencana merupakan jembatan yang dibangun untuk menghubungkan antara masa kini dengan masa datang yang diinginkan, karena perencanaan adalah mempersiapkan masa depan. Masa depan memang akan datang dengan sendirinya, tapi tanpa perencanaan masa depan tersebut mungkin bukan masa depan yang kita inginkan.

Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat konsisten anggaran belanja langsung, akan dilakukan Triangulasi antar dokumen, yaitu dengan melakukan telaahan perbandingan antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2015, kemudian dilakukan telaahan perbandingan antara dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2015 dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015. Selanjutnya akan dilakukan pengukuran persentase tingkat konsisten anggaran belanja langsung.

Perencanaan memberikan arah tindakan saat kini yang terfokus pada pencapaian tujuan yang kita impikan di masa yang akan datang. Melalui perencanaan kita dapat mengantisipasi perubahan lingkungan dan memperkirakan resikonya sambil terus menyesuaikan tindakan/aktifitas dengan tujuan yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

hendak kita capai. Karena pentingnya fungsi perencanaan, maka dalam dunia militer dikenal *idiom* :"Jika kamu gagal merencanakan, maka kamu merencanakan kegagalan"

Melalui perencanaan yang baik, enam pertanyaan pokok dalam setiap aktifitas untuk mencapai tujuan akan terjawab. Keenam pertanyaan tersebut yang dikenal dengan (4W &2 H) adalah sebagai berikut :

1. What needs to be accomplished? (apa yang harus dikerjakan?)
2. When is the deadline? (Kapan harus dilaksanakan dan diselesaikan?
3. Where will this be done? (Dimana tempat pelaksanaannya?)
4. Who will be responsible for it? (Siapa penanggungjawabnya?)
5. How will it get done? (Bagaimana cara melaksanakannya?)
6. How much time, energy, and resources are required to accomplish this goal? (Berapa banyak waktu, tenaga dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mecapai tujuan).

Perencanaan memberikan manfaat yang sangat besar dalam pencapaian tujuan, manfaat-manfaat yang diberikan tersebut diantaranya adalah :

1. Memberikan arah tindakan pada organisasi. Tanpa rencana yang memiliki tujuan sebuah organisasi tidak akan sampai kemanapun.
2. Memfokuskan perhatian pada sasaran-sasaran dan hasil-hasil yang hendak dicapai. Rencana membantu baik manajer dan maupun karyawan untuk memusatkan perhatian mereka pada sebuah gambaran besar yang disebut rencana.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

3. Menetapkan dasar bagi kerjasama tim. Sebuah rencana mengintegrasikan berbagai bagian/unit dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang sama.
4. Membantu mengantisipasi permasalahan dengan memperhitungkan situasi dan perubahan lingkungan yang akan terjadi
5. Rencana juga memberikan arahan dalam pembuatan keputusan. Keputusan selalu berorientasi ke masa depan, jika manajemen tidak memiliki rencana untuk masa depan maka keputusan keputusan yang dibuatpun hanya sedikit yang dapat berorientasi ke masa depan.
6. Merupakan prasyarat bagi terlaksananya fungsi-fungsi manajemen yang lain. Melalui perencanaan, manajemen akan mengetahui pengorganisasian apa yang harus ditangani, karyawan apa dan bagaimana yang dibutuhkan, bagaimana memimpin, memotivasi karyawan.

Perencanaan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen pasti dilakukan oleh manajer pada semua tingkatan, meski skala atau lingkup rencananya berbeda sesuai dengan level manajerialnya. Kendati menyusun rencana yang sifat dan lingkupnya berbeda, setiap manajer harus mengkoordinasikan rencananya dengan rencana yang bersifat lebih luas agar tidak terjadi kontradiksi penetapan tujuan antar unit kerja dan antar bagian yang lebih tinggi. Memilahkan lingkup rencana tersebut adalah untuk membentuk sebuah mata rantai Sarana -Tujuan yang menghubungkan antara aktifitas organisasi sehari-hari dengan pencapaian tujuan secara keseluruhan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Mata rantai Sarana-Tujuan tersebut dibentuk dalam level perencanaan adalah sbb:

1. Rencana Strategis yang merupakan perencanaan jangka panjang yang bersifat umum dan di dalamnya mencakup pengembangan missi organisasi, serta tujuan-tujuan pokok yang akan dicapai organisasi secara keseluruhan. Top Level Manajer adalah yang bertanggung-jawab dan berkepentingan dengan perencanaan ini.
2. Rencana Taktis merupakan rencana yang menjabarkan Rencana Strategik menjadi rencana dengan target-target spesifik yang harus dicapai oleh setiap divisi. Oleh karenanya memuat tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya dan siapa yang bertanggungjawab pada setiap divisinya. Yang bertanggungjawab untuk mengidentifikasikan tindakan-tindakan taktis spesifik yang harus disusun dalam Rencana taktis ini adalah Manajer tingkat menengah yang membawahi divisi-divisi spesifik.
3. Rencana Operasional merupakan rencana jangka pendek atau rencana tahunan yang merupakan jabaran lebih rinci dari Rencana Strategik per-unit kerja. Rencana Operasional adalah blueprint rencana tindakan sesungguhnya dari setiap unit kerja dalam satu tahun kerja, oleh karenanya juga disebut sebagai Rencana Sekali Pakai (*Single-use Plans*) . Di dalam rencana operasional tercakup aktifitas apa yang harus dilakukan, jadwal kerja, penanggungjawab, dll. Anggaran penerimaan dan belanja organisasi juga termasuk dalam katagori ini

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

4. Rencana Kontijensi. Rencana ini adalah rencana yang dikembangkan sebagai antisipasi jika rencana semula yang telah dibuat ternyata gagal mencapai tujuan atau bahkan tidak dapat dilaksanakan kerena berbagai sebab. Organisasi-organisasi besar biasanya memiliki rencana kontinjensi, karena bagaimanapun telitinya seorang manajer dalam mempertimbangkan berbagai aspek dalam perencanaannya, situasi lingkungan bisa berubah.
5. Perencanaan teknokrat adalah proses perencanaan yang dirancang berdasarkan data dan hasil pengamatan kebutuhan masyarakat dari pengamat professional, baik kelompok masyarakat yang terdidik yang walau tidak mengalami sendiri namun berbekal pengetahuan yang dimiliki dapat menyimpulkan kebutuhan akan suatu barang yang tidak dapat disediakan pasar, untuk menghasilkan perspektif akademis pembangunan. Pengamat ini bisa pejabat pemerintah, bisa non-pemerintah, atau dari perguruan tinggi. Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, "perencanaan teknokrat dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu".
6. Perencanaan partisipatif adalah proses perencanaan yang diwujudkan dalam musyawarah ini, dimana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pelaku pembangunan (stakeholders). Pelaku pembangunan berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, rohaniwan, dunia usaha, kelompok profesional, organisasi-organisasi non-pemerintah. Perencanaan partisipatif

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

adalah metode perencanaan pembangunan dengan cara melibatkan warga masyarakat yang diposisikan sebagai subyek pembangunan. Menurut penjelasan UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: "perencanaan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki". Dalam UU No. 25 Tahun 2004, dijelaskan pula "partisipasi masyarakat" adalah keikutsertaan untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

7. Perencanaan top down adalah proses perencanaan yang dirancang oleh lembaga/departemen/daerah menyusun rencana pembangunan sesuai dengan wewenang dan fungsinya.
8. Perencanaan bottom up. *Planning approach starting at the lowest hierarchical level and working upward* (pendekatan perencanaan yang dimulai dari tingkatan hirarkis paling rendah menuju ke atas). Selain itu, menurut penjelasan UU 25 Tahun 2004, pendekatan atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain riset yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun, megklarifikasi dan menganalisis. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Moleong, 1991:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Metode deskriptif disini bertujuan untuk menguraikan sifat atau karakteristik mengenai keputusan melalui pengukuran. Tujuan riset dari desain deskriptif bersifat suatu paparan untuk mendeskripsikan hal-hal yang ditanyakan dalam riset, seperti: siapa, yang mana, kapan, dan di mana, studi dengan desain ini dapat dilakukan secara sederhana atau rumit. Periset dituntut untuk melakukan riset dengan standar yang layak, baik dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah survei yaitu riset yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta tentang gejala-gejala atas permasalahan yang timbul.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Jenis/tipe penelitian bersifat deskriptif bertujuan memberikan gambaran akuntabilitas aparatur perencana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukamara secara sistematis dan analitis tentang kondisi ideal penyusuna dokumen perencanaa berdasarkan data dan informasi serta hasil wawancara dilapangan dan gambaran sistem dan proses penyusunan dokumen perencanaan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi penyusunan dokumen perencanaan dalam kaitannya dengan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Atas dasar alur pemikiran bahwa pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik beserta aspek-aspek yang melingkupinya perlu dikaji secara akurat dan cermat, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang mendasar tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan akuntabilitas publik dalam hubungannya dengan pelayanan publik. Dari kajian utama tersebut akan diurai secara lebih rinci pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik yang berhubungan dengan perilaku aparat, penilaian akuriabilitas dan permasalahan dalam memberikan pelayanan publik. Oleh sebab itu penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif-deskriptif yang diartikan sebagai upaya untuk memberikan suatu uraian deskriptif atau menggambarkan mengenai kolektifitas dengan syarat bahwa representasinya harus terjamin. (Bungin, Burhan. 2007).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenamya dari obyek yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Badan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukamara. Penetapan lokasi penelitian didasari oleh beberapa pertimbangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukamara memiliki beberapa kesesuaian dengan substansi penelitian karena berdasarkan observasi awal unit kerja ini banyak berhubungan dengan publik dalam hal pelayanan publik dan, telah mengemuka isu-isu permasalahan seperti yang dikemukakan di depan. Pertimbangan lain berhubungan dengan aksesibilitas dan kedekatan peneliti yang relatif besar terhadap lokasi penelitian dan substansi penelitian sehingga memudahkan proses penelitian.

C. Sumber Data Dan Pemilihan Informan

Menurut Arikunto (1996) yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data-data tambahan yang dianggap relevan oleh penelitian seperti dokumen dan lain-lain (Lofland dan dalam Moleong, (1990) sesuai masalah penelitian, sumber data penelitian ini adalah:

1. Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan partisipan dan non partisipan, Informan partisipan meliputi Bupati Sukamara, Sekda Sukamara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukamara, Kepala Seksi lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukamara, PNS di lingkungan unit kerja, dan informasi yang datang dari peneliti sendiri karena peneliti bekerja di lokasi penelitian.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Informan-informan tersebut adalah orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan memadai mengenai masalah pelayanan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukamara dari informasi yang bersifat kebijakan pelayanan, teknik pelayanan, masalah-masalah dalam memberikan pelayanan, mekanisme pelaporan dan informasi lain sesuai dengan fokus penelitian.

Pemilihan informasi ini didasarkan atas subyek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data. Penggalian informasi berakhir jika telah terjadi pengulangan informasi dan mencapai tingkat kejenuhan. Langkah ini penting karena menurut Kanto (1998 dalam Wibisono, 2001) data dan informasi dalam penelitian kualitatif harus ditelusuri seluas-luasnya, sesuai dengan variasi yang ada, dengan cara demikian, peneliti mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diteliti secara utuh.

2. Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Pada penelitian ini Dokumen yang menjadi bahan analisis yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM), Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukamara.

Data dokumen dalam penelitian ini meliputi Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan masalah pelayanan publik baik yang berlaku secara nasional

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

atau khas dari dinas terkait mulai dari UU SPPN, Perka Bapennas, Perda tentang APBD dan SK Tim Perencana serta Raperda tentang SOTK berisi tentang struktur organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukamara. Di dalam penelitian ini juga terkumpul dokumen-dokumen berupa kebijakan-kebijakan dinas menyangkut pelayanan publik dalam bentuk ketentuan perijinan, prosedur dan syarat perijinan dan lama perijinan dan berita acara hasil pertemuan rutin pegawai. Dokumen lain yang terkumpul adalah Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukamara, LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) dan beberapa informasi penting dari cuplikan Laporan Akhir Tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukamara.

3. Pengamatan

Peristiwa-peristiwa yang dianggap relevan dengan penelitian diamati secara serius baik pada observasi awal sejak tahun 2015 ketika pertama kali peneliti tertarik dengan masalah akuntabilitas aparatur perencana, yang kemudian diperdalam lagi pada observasi mendalam pada saat penelitian dilaksanakan antara bulan Pebruari sampai Mei 2016. Peristiwa-peristiwa tersebut meliputi proses pelayanan sehari-hari yang dilakukan oleh petugas terutama yang berhubungan dengan kecepatan petugas, ketanggapan petugas, penerimaan keluhan terhadap kualitas layanan, efisiensi, efektifitas dan kesigapan pelayanan dan kegiatan petugas sehari-hari secara umum yang berguna untuk menilai akuntabilitas kinerja pelayanan petugas, Selanjutnya pengamatan dan observasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

tersebut dicatat dan dianalisa sesuai dengan kebutuhan penelitian.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan diri sendiri sebagai instrument penelitian, yaitu dengan mengadakan perencanaan, pengamatan di lapangan dan melakukan wawancara kepada informan dalam rangka pengumpulan data primer. Satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti *recorder dan kamera*. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif proses pengumpulan data bergerak dari lapangan empiris dalam upaya membangun teori dan data. Proses pengumpulan data ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Proses Memasuki Lokasi Penelitian (Getting in)

Dengan membawa dan menunjukkan surat pengantar dari Universitas Terbuka, peneliti melaporkan tujuan dari penelitian ini pada Bappeda Kabupaten Sukamara untuk mendapatkan berbagai informasi atau memperoleh gambaran tentang kemampuan aparatur dan metode kinerja yang sudah dilakukan.

2. Ketika Berada di Lokasi Penelitian (Getting Along)

Peneliti berusaha melakukan pendekatan secara pribadi yang akrab dengan subyek penelitian. Pada tahap ini peneliti berusaha memperoleh informasi yang lengkap serta berusaha menangkap intisari dari berbagai informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

3. Mengumpulkan Data (Longging The Data)

Sesuai jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpilan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara Mendalam (*In Depth Interview*)

Yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung secara lisan dengan informan penelitian atau nara sumber. Cara ini ditempuh guna mengetahui secara langsung yang dimaksud oleh subyek maupun obyek dalam bentuk percakapan antara dua pihak secara komunikatif. Dengan demikian keterangan yang diterima oleh peneliti dari informan berbentuk keterangan lisan.

Dengan menggunakan interview guide sebagai pegangan, wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur dan pertanyaan yang memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap dan mendalam. Guna lebih mempertajam hasil data digunakan pula wawancara yang tidak terstruktur, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya.

b. Dokumentasi (Official and Personal Dokumentasi)

Yaitu cara pengumpulan data dengan jalan mengamati, mencatat atau mengcopy dokumen-dokumen, buku panduan, arsip-arsip maupun data-data lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik atau cara ini digunakan dengan maksud karena peneliti ingin memperoleh data sekunder yang erat kaitannya dengan fokus penelitian dan untuk menambah kelengkapan dalam menganalisa data penelitian.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

F. Metode Analisis Data

Penelitian kualitatif (*qualitative research*) bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial (*a shared social experience*) yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Kenyataan merupakan suatu konstruksi sosial. Dengan demikian persepsi orang adalah apa yang diyakini "nyata" padanya, dan apa yang mengarahkan kegiatan, pemikiran dan perasaannya. (Arikunto, Suharsimi.1998).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus masuk kelatar tertentu yang sedang diteliti karena concernnya dengan konteks. Bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada latar dimana fenomena tersebut sedang berlangsung serta teknik dokumentasi sangat penting (Arikunto, Suharsimi.1998).

Dalam analisis data kualitatif cukup sulit, karena belum ada polanya yang jelas, Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono "*The most serius and centraldifficulty in the use of central difficulty in the use of qualitatifve data is thatmethods of analysis are not well formulate*", kesulitan analisis data kualitatif karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik.

Moleong (1991:103) mengatakan bahwa prinsip penelitian kualitatif adalah menemukan teori dan data. Peranan teori baru atau verifikasi teori baru akan tampak sewaktu analisis data ini mulai dilakukan. Tahapan analisis data merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan tahapan-tahapan lainnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif, melalui verstehen atau interpretasi atau juga disebut dengan tafsir.

Selaras dengan model analisis data diatas, Miles dan Huberman (1992) menggunakan model analisis interaktif. Pada intinya mengadakan aktivitas pengamatan mendalam untuk menemukan, memahami, dan menguji serta menganalisis suatu obyek tertentu dengan cara-cara yang metodis atau menggunakan metode ilmiah tertentu.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Sukamara merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk dalam konsep Kabupaten Sukamara dalam *Sukamara Metropolitan. Urban Development Project* (SMUDP). Terletak pada perbatasan Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Kotawaringin Barat. Jarak Kabupaten Sukamara dengan Kabupaten Kotawaringin Barat hanya sekitar 22 km dan jarak Kabupaten Sukamara dengan Kabupaten Lamandau juga sekitar 21 km atau dengan kata lain jarak tempuh ke Kabupaten Kotawaringin Barat dari Sukamara maupun dari Lamandau sekitar 20 menit perjalanan.

Luas wilayah Kabupaten Sukamara adalah 3.827 Km^2 atau 382.700 Ha atau kurang lebih 2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari hutan, rawa, sungai, danau, genangan air, pantai dan tanah lainnya. Secara geografis Kabupaten Sukamara terletak pada 2°19' sampai dengan 3°07' Lintang Selatan (LS) dan 110°25' sampai dengan 111°9' Bujur Timur (BT), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : Berbatasan dengan Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- **Sebelah Timur** : Berbatasan dengan Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

- **Sebelah Selatan** : Berbatasan dengan Laut Jawa; dan
- **Sebelah Barat** : Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Gambar 4.1
Peta Administrasi Kabupaten Sukamara

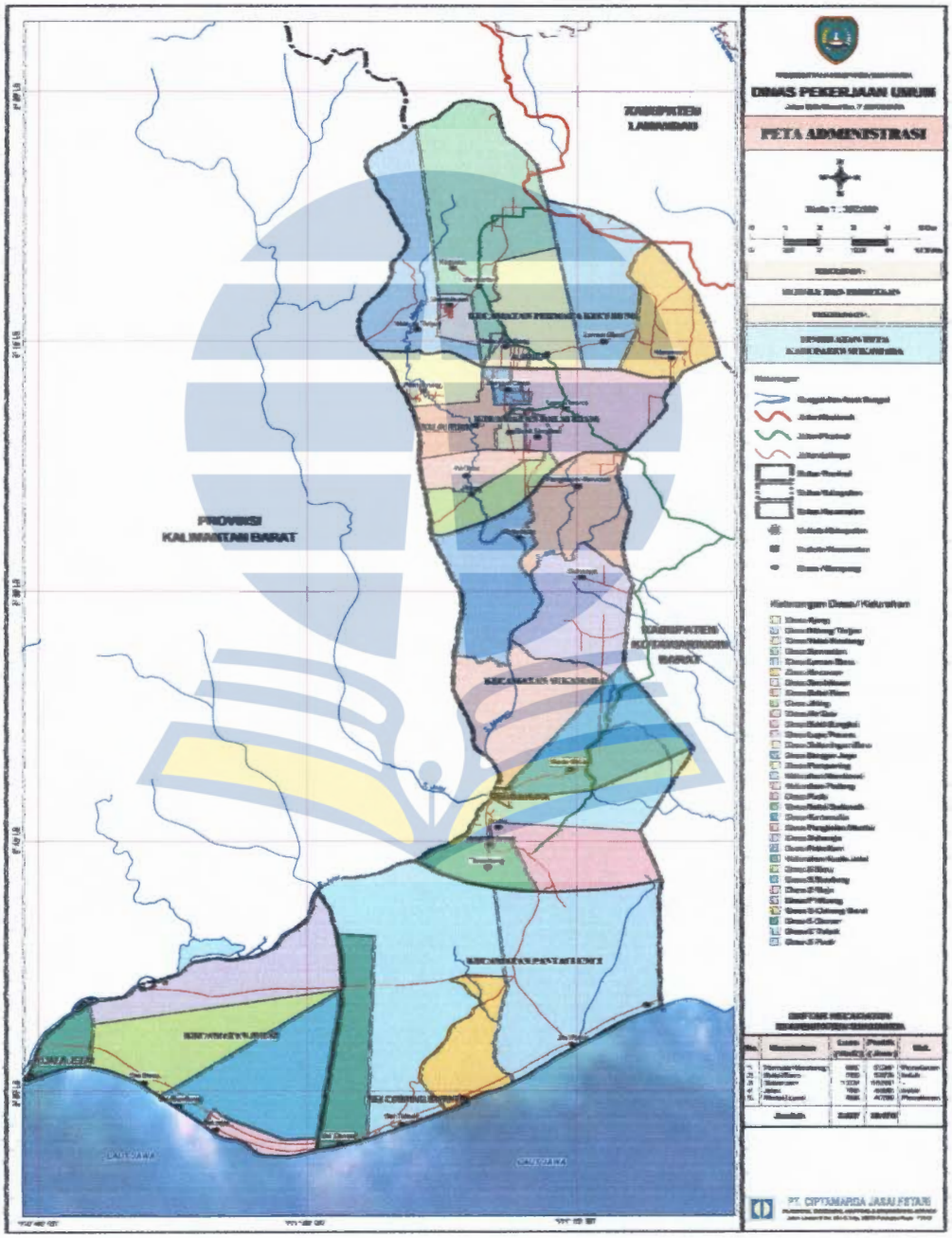

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Sukamara terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu : Kecamatan Sukamara, Kecamatan Jelai, Kecamatan Balai Riam, Kecamatan Pantai Lunci (diresmikan tanggal 15 Juni 2006) dan Kecamatan Permata Kecubung (diresmikan tanggal 17 Juni 2006). Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Permata Kecubung merupakan kecamatan baru sesuai Perda Kabupaten Sukamara Nomor 03 Tahun 2006 tanggal 12 April 2006 tentang pembentukan Kecamatan Permata Kecubung dan Pantai Lunci yang selanjutnya diundangkan pada tanggal 05 Mei 2006. Wilayah kecamatan terbagi menjadi 3 kelurahan dan 29 desa. Jumlah desa/kelurahan dan luas wilayah menurut kecamatan disajikan dalam tabel berikut :

Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Sukamara terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu : Kecamatan Sukamara, Kecamatan Jelai, Kecamatan Balai Riam, Kecamatan Pantai Lunci (diresmikan tanggal 15 Juni 2006) dan Kecamatan Permata Kecubung (diresmikan tanggal 17 Juni 2006). Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Permata Kecubung merupakan kecamatan baru sesuai Perda Kabupaten Sukamara Nomor 03 Tahun 2006 tanggal 12 April 2006 tentang pembentukan Kecamatan Permata Kecubung dan Pantai Lunci yang selanjutnya diundangkan pada tanggal 05 Mei 2006. Wilayah kecamatan terbagi menjadi 3 kelurahan dan 29 desa. Jumlah desa/kelurahan dan luas wilayah menurut kecamatan disajikan dalam tabel berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel : 4.1
Jumlah Desa / Kelurahan dan Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Sukamara 2015

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Km^2)	Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)
1.	Sukamara	2	6	1.028	26,86
2.	Jelai	1	4	796	20,80
3.	Balai Riam	-	8	539	14,08
4.	Pantai Lunci	-	4	804	21,01
5.	Permata Kecubung	-	7	660	17,25
JUMLAH		3	29	3.827	100,00

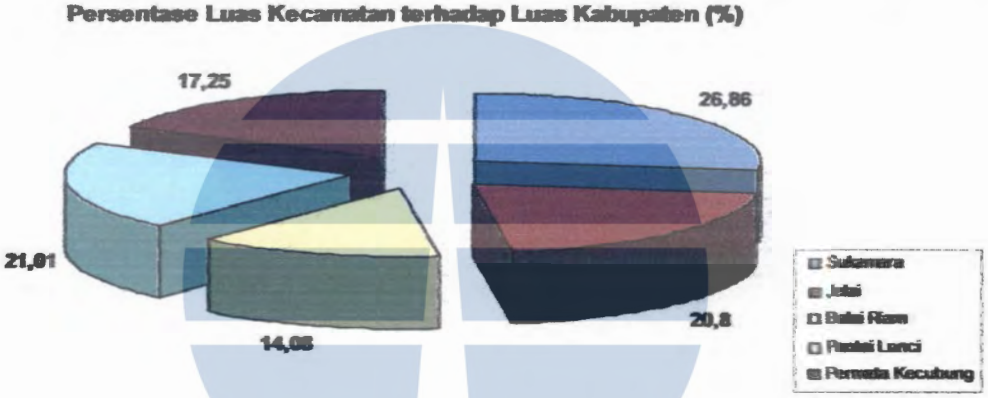

Gambar 4.2
Persentase Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten

1. Sumber Daya Lahan

Ketinggian

Ketinggian tempat merupakan salah satu faktor penentu kesesuaian lokasi untuk investasi/budidaya pertanian dalam arti luas. Setiap tanaman memerlukan ketinggian tempat yang sesuai agar dapat berproduksi optimal. letak Kabupaten Sukamara berdasarkan ketinggian dari permukaan laut dan persentase tingkat kemiringan menurut Kecamatan sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Tabel :4.2

Ketinggian Kabupaten Sukamara dalam Hektar (Ha)

No	Kecamatan	Tinggi dari Permukaan Laut (meter)	Kemiringan
1	2	3	4
1	Sukamara	0 - 100	8 - 15
2	Jelai	0 - 25	0 - 8
3	Balai Riam	7 - 100	8 - 15
4	Pantai Lunci	0 - 25	0 - 8
5	Permata Kecubung	7 - 100	8 - 15

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara .

Pada tabel di atas menjelaskan bahwa Kabupaten Sukamara sekitar 40% terletak pada ketinggian 0 - 25 m dpl. Daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut dan penggunaan lahan yang cocok adalah untuk tambak, kelapa, mangrove/konservasi pantai dan sawah, tergantung pada parameter fisik dan kimia tanah. Daerah lainnya yang terletak pada ketinggian 7 - 100 m dpl sekitar 60% yang peruntukan penggunaannya cocok untuk perkebunan, pertanian tanah kering dan sawah tadah hujan.

2. Sumber Daya Air

Iklim

Informasi data iklim sangat diperlukan dalam pengembangan tanaman semusim, maupun tahunan karena iklim merupakan faktor penentu sistem produksi pertanian yang sulit diprediksikan. Oleh karena itu dalam melakukan evaluasi untuk lahan pertanian, kondisi iklim harus benar-benar diperhatikan sebagai salah satu syarat tumbuhnya tanaman. Bila karakteristik fisik dan struktur tidak mendukung untuk tanaman, maka lahan tersebut tidak bisa untuk dikembangkan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Hujan sebagai salah satu unsur iklim merupakan komponen ekologi utama pemasok air dalam sistem produksi tanaman. Namun, karena karakteristiknya yang memang sangat dinamis, beragam, dan sulit dikendalikan, maka ketersediaan air yang berharap dari curah hujan sering mengancam sistem produksi tanaman tersebut. Sebagai akibat dari sifat ekstrimnya yang kadang melebihi kebutuhan maupun kekeringan tanpa ada hujan.

Dengan demikian, maka keseimbangan air yang tersedia dan jumlah air yang dibutuhkan berfluktuasi menurut waktu. Akibat keadaan tersebut, pada periode tertentu akan terjadi kelebihan air, dan pada periode tertentu lainnya terjadi kekurangan air, yang mungkin pada saat periode pertumbuhan tanaman/ikan/udang air sangat dibutuhkan. Stagnasi ketersediaan air tersebut harus dapat diketahui sebelum membangun kebun/tambak agar resiko kegagalan panen yang diakibatkan oleh kekurangan/kelebihan air lebih kecil. Resiko tersebut dapat diketahui dengan cara menyusun potensi masa tanam berdasarkan perhitungan neraca air.

Unsur-unsur iklim yang sangat penting dalam budidaya pertanian dan perikanan adalah; curah hujan, jumlah bulan basah/kering, suhu, kelembaban dan lama penyinaran matahari. Data iklim tersebut diperoleh dari Stasiun Penangkar Hujan Pangkalan Bun selama 5 tahun dari tahun 2012 – 20126, dapat dilihat pada tabel berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel : 4.3
Banyaknya Curah Hujan (mm) di Kabupaten Sukamara
Tahun 2015

Bulan		Curah Hujan (mm)
1		2
Januari		139,2
Februari		208,4
Maret		423,8
April		193,6
Mei		321,7
Juni		229,1
Juli		38,6
Agustus		132,1
September		48,9
Oktober		62,7
November		308,4
Desember		200,4
Tahun	2015	1922,4
	2014	2764,2
	2013	2066,8
	2012	2087,0
	2011	3.145,6

Unsur-unsur iklim yang sangat penting dalam budidaya pertanian dan perikanan adalah; curah hujan, jumlah bulan basah/kering, suhu, kelembaban dan lama penyinaran matahari. Data iklim tersebut diperoleh dari Stasiun Penangkar Hujan Sukamara selama 5 tahun dari tahun 2011 - 2015. Untuk memprediksi karakteristik suhu udara, kelembaban nisbi, dan penyinaran matahari di kecamatan digunakan data-data dari Stasiun Klimatologi dari Stasiun Klimatologi Pangkalan Bun. Dengan luas areal kurang lebih 379.000 Ha, yang mencakup wilayah Kabupaten Sukamara terdiri dari Kecamatan Sukamara, Kecamatan Jelai, dan Kecamatan Balai Riam. Sungai ini memiliki panjang 200 km, kedalaman rata-rata 5 meter dan lebar rata-rata 100 meter dengan pola drainase *anastomic* (berkelok-kelok), dan DAS Mapam.

Berdasarkan identifikasi terhadap Peta Geologi Bersistem Indonesia,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Lembar Pangkalan Bun, 1513, tahun 1994, bahwa bagian hulu (bagian kecil) dari sungai ini berasal dari daerah Landform Group Volkan formasi tua yang merupakan daerah dengan kelompok tanah yang terbentuk dari bahan induk beraksi gunung api, lava, andesit, dan tuf yang bersifat resisten. Sedangkan bagian selanjutnya hingga ke hilir melewati landform Group Aluvial dengan kelompok tanah yang terbentuk dari bahan induk batuan sediment yang mengandung pasir, lempung dan sisa-sisa tanaman dan bersifat mudah tererosi.

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sukamara tahun 2014 sebanyak 53.190 jiwa, terdiri dari 28.259 (53,21 %) laki-laki dan 24.931 (46,79 %) jiwa perempuan dengan rasio perbandingan antara laki-laki dan perempuan *(sex ratio)* sebesar 1,13. Rata-rata kepadatan penduduk 13,90 jiwa/km^2, dengan kategori penduduk jarang serta pertumbuhan penduduk selama tiga tahun terakhir (2012-2014) sebesar 3,42 %. Jumlah penduduk per Kecamatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel : 4.4
Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sukamara berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014

KECAMATAN Desa/Kelurahan		Rumah Tangga	Penduduk		
			Pria	Wanita	Jumlah
1		2	3	4	5
01.	JELAI	1.082	2.547	2.404	4.951
02.	PANTAI LUNCI	1.269	2.789	2.650	5.439
03.	SUKAMARA	6.388	12.544	11.277	23.821
04.	BALAI RIAM	2.024	4.170	3.592	7.762
05.	PERMATA KECUBUNG	3.286	6.208	4.999	11.207
Jumlah	2014	14.242	28.259	24.931	53.190
	2013	13.745	27.100	24.000	51.100
	2012	12.630	25.004	22.069	47.073
	2011	12.238	24.279	21.427	45.706
	2012	12.036	23.879	21.073	44.952

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukamara, 2015

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Tabel : 4.5
Jumlah Penduduk menurut Rumah Tangga dan Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Sukamara Berdasarkan Usia Tahun 2015

Kelompok Usia	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah Total
1	2	3	7
0 - 4	2926	2793	5.719
5 - 9	2660	2512	5.172
10 - 14	2369	2321	4.690
15 - 19	2442	2090	4.532
20 - 24	2677	2390	5.067
25 - 29	2973	2583	5.556
30 - 34	2582	2468	5.050
35 - 39	2662	2212	4.874
40 - 44	2055	1735	3.890
45 - 49	1653	1222	2.875
50 - 54	1177	883	2.060
55 - 59	748	624	1.372
60 - 64	592	447	1.039
65 - 69	306	253	559
70 - 74	217	169	386
75+	190	229	419
2014	28.259	24.931	53.190
2013	27.000	24.000	51.000
2012	25.004	22.069	47.073
2011	24.279	21.427	45.706

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukamara, 2015

Tabel : 4.6
Persentase Penduduk berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama tahun 2015

Lapangan Pekerjaan Utama	Persentase
1	4
1. Pertanian	57,60
2. Pertambangan & Penggalian	0,00
3. Listrik & Air Minum	3,50
4. Bangunan & Konstruksi	0,00
5. Perdagangan	4,04
6. Industri Pengolahan	14,28
7. Pengangkutan & Komunikasi	2,34
8. Bank & Lembaga Keuangan	0,63
9. Jasa – jasa	17,61
Jumlah	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukamara, 2015

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel : 4.7
Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid menurut jenis sekolah di Kabupaten Sukamara Tahun 2015

Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah
1	2
2. Sekolah Dasar (SD)	53
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)	18
4. Sekolah Menengah Atas (SMA)	8
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	3
2014/2015	124
2013/2014	116
2012/2013	107
2011/2012	101
2012/2011	96

Lanjutan Tabel

Jenis Sekolah	Jumlah Guru
1	2
2. Sekolah Dasar (SD)	593
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)	264
4. Sekolah Menengah Atas (SMA)	158
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	72
2014/2015	1237
2013/2014	1092
2012/2013	1092
2011/2012	1107
2012/2011	860

Lanjutan Tabel

Jenis Sekolah	Jumlah Murid
1	2
1. Taman Kanak-kanak	1.815
2. Sekolah Dasar (SD)	6.496
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2.600
4. Sekolah Menengah Atas (SMA)	1.248
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	619
2014/2015	12778
2013/2014	12470
2012/2013	11939
2011/2012	10510
2012/2011	11422

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara, 2015.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

3. Kondisi Ekonomi;

Potensi Unggulan Daerah

Wilayah Sukamara terbagi dalam lahan yang berbeda seperti hutan, rawa, sungai, danau/genangan pantai dan tanah lainnya. Melihat kesesuaian lahan yang bervariasi sangat cocok untuk tanaman keras dan perkebunan, sedangkan disepanjang aliran sungai dan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air sungai dapat diusahakan untuk jenis tanaman pangan;

1. Kehutanan

Memiliki Potensi hutan kurang lebih 185.500 Ha yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan yaitu Sukamara, Balai Riam, Jelai, Pantai Lunci, Permata Kecubung. Secara keseluruhan di peruntukkan untuk Cagar Alam, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi, Hutan Transmigrasi, KPPL dan KPP.

2. Pertambangan

Potensi pertambangan tersebar di 5 (lima) Kecamatan yang sangat menjanjikan untuk diusahakan, sampai saat sekarang belum pernah dilakukan explorasi/penelitian secara menyeluruh. Untuk sementara potensi tambang yang baru termonitor melalui observasi permukaan tanah diperkirakan terletak pada pada beberapa kecamatan yakni :

a. Batu Permata Kecubung di Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Balai Riam
b. Pasir Kuarsa dan Koalin di Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Jelai Bijih Besi dan Pasir Zirkon (pasir puya) di Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

c. Batu Belah, Batu Kapur, Kerikil dan Tanah Liat di Kecamatan Balai Riam

d. Batu Apung, Andesit, Basalt di Kecamatan Balai Riam

3. Pariwisata

Kabupaten Sukamara memiliki beberapa obyek wisata yang cukup potensial dan sangat menarik untuk dikunjungi karena memiliki ciri kekhasan tersendiri. Obyek wisata yang dimiliki antara lain :

a. Pantai

Pantai-pantai yang dapat dikunjungi sebagai pariwisata panorama alam dan pariwisata bahari meliputi Pantai Kuala Jelai, Pantai Tanjung Nipah, Pantai Tanjung Selaka, Pantai Sungai Ramis, dan Pantai Kampung Baru.

b. Bukit Patung

Merupakan dataran tinggi yang membentuk bukit-bukit dengan panorama alam yang sejuk dan alami serta bernuansa budaya tradisional, lokasi ini berada di Kecamatan Balai Riam.

c. Danau Burung

Daerah ini memiliki daya tarik tersendiri, pada musim tertentu didatangi sekelompok burung-burung liar yang langka untuk bersarang dan bertelur . Danau ini mempunyai luas kawasan ± 76.110 Ha.

Sungai Jelai

Merupakan perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan alur sungai yang alamnya masih alami dan segar untuk dinikmati karena memiliki daya tarik tersendiri.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

d. Seni Budaya

Masyarakat Sukamara termasuk masyarakat yang sangat menghargai seni budaya, memiliki keragaman budaya yang multi etnis sehingga dapat memperkaya kesenian budaya setempat.

Budaya-budaya yang sampai saat ini masih terjaga lestari di masyarakat Sukamara antara lain, Pantun Seloka, Barongsai, Seni Qosidah, Tari Japen, Hadrah dan sebagainya.

B. Hasil Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini untuk mengetahui jawaban responden terhadap data-data yang ingin didapatkan oleh Penulis. Adapun jawaban responden saat wawancara dengan penelitian tentang Studi Tentang Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Sukamara yang terinci dibawah ini. Jawaban responden di sajikan dalam resume yang menjawab pertanyaan dari setiap pertanyaan yang ada dalam pedoman wawancara *Good Governance* adalah proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan *stakeholders* yang luas dalam bidang ekonomi, sosial dan politik suatu Negara dan pendayagunaan sumber daya alam, keuangan dan manusia menurut kepentingan semua pihak dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip partisipasi dan transparansi.

Mengingat cakupan prinsip-prinsip *Good Governance* yang begitu luas, menyangkut 10 prinsip versi UNDP yaitu (partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, berorientasi consensus, saling ketergantungan) maka dalam penelitian ini Penulis membatasi *Good Governance* yang diteliti hanya pada aspek

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

partisipasi dan transparansi di Bappeda Kabupaten Sukamara, untuk mempersempit dan memfokuskan permasalahan penelitian.

Transparansi yaitu keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Untuk mengukur transparansi aparatur Bappeda Kabupaten Sukamara, dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur- prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar, meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa atau lembaga non pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya, berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perUndang-Undangan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah dan berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga Eksekutif dan Legislatif.

Diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara dalam wawancara berikut;

"Bappeda Kabupaten Sukamara selalu mensosialisasikan jadwal pelaksanaan musrenbang kepada masyarakat. Setelah Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Mendagri turun, dimana SEB ini merupakan pedoman tata cara dan jadwal pelaksanaan musrenbang, dan merupakan landasan hukum pelaksanaan musrenbang, maka Bappeda Kabupaten Sukamara kemudian membuat surat undangan jadwal pelaksanaan musrenbang kepada kecamatan, dan selanjutnya kecamatan akan menyampaikan undangan kepada Kelurahan tentang jadwal pelaksanaan musrenbang, lalu Kelurahan langsung akan mengundang masyarakat (PKK, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan dll) untuk menghadiri musrenbang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

tersebut".
(Hasil wawancara September 2016)

Sosialisasi jadwal pelaksanaan musrenbang cukup mudah untuk diakses masyarakat. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk memberikan surat undangan oleh Bappeda kepada pihak kecamatan, dan selanjutnya pihak kecamatan akan memberikan undangan yang berisi jadwal pelaksanaan musrenbang kepada pihak Kelurahan. Jadwal pelaksanaan musrenbang juga dapat diakses oleh masyarakat melalui media massa dan dengan membuka situs.

Program pembangunan dalam RKPD akan didokumentasikan lalu didistribusikan kepada masing-masing kecamatan. Dan dikecamatan, pada saat reses, yang dihadiri oleh pihak Bappeda, SKPD dan DPRD serta perwakilan masyarakat, dibacakanlah program-program usulan masyarakat yang telah diakomodir dalam RKPD. Pihak Bappeda akan menjelaskan kepada masyarakat tentang alasan aspirasi masyarakat yang telah terakomodr dalam RKPD dan aspirasi yang tidak terakomodir.

Dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) Bappeda tidak melibatkan masyarakat. Diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara dalam wawancara berikut;

"Masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan RKA karena menurut Bappeda masyarakat tidak memiliki kewenangan dalam perumusan RKA, tugas tersebut hanya wewenang Legislatif dan Eksekutif. Tetapi pada tahap sidang paripurna DPRD dalam pembahasan RKA tersebut dapat dihadiri oleh masyarakat. Sedang ada responden yang menjawab dalam penyusunan RKA melibatkan masyarakat, sebab persepsi mereka masyarakat dalam hal ini adalah DPRD yang dipilih rakyat sebagai wakil mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan".
(Hasil wawancara September 2016)

Terkait dengan dokumen APBD hasil wawancara menyatakan dokumen

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

tersebut tidak dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Dokumen APBD hanya dapat diakses pada saat sidang paripura DPRD dalam pembahasan RAPBD, tetapi tidak disebar luaskan secara bebas kemasyarakat, misalnya dalam bentuk publikasi di media massa atau internet. Serta di Bappeda selalu melibatkan unsur masyarakat dalam merumuskan rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Prinsip partisipasi mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

Untuk mengukur partisipasi aparatur Bappeda, dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu Adanya forum untuk menampung aspirasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya, dapat dikontrol dan bersifat terbuka. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pelayanan publik, fokus pemerintah adalah memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi serta

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

adanya akses masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Rancangan Awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan arah prioritas dan kebijakan pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan serta rancangan pagu indikatif yang dapat dijadikan acuan bagi setiap SKPD untuk menyiapkan rancangan Renja SKPD, dengan demikian Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan Penyusunan Rancangan Awal RKPD merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, untuk itu Bappeda membentuk tim penyusun RKPD yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen RKPD.

Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Hal prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan rancangan awal RKPD adalah:

1. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, dengan demikian maka penyusunan Rancangan Awal RKPD harus mengacu pada RPJMD, serta memperhatikan usulan-usulan SKPD yang tertuang dalam prakiraan maju yang diajukan tahun sebelumnya.
2. Substansi utama yang termuat dalam rancangan awal RKPD, meliputi
    a. Isu strategis daerah
    b. Kerangka ekonomi daerah
    c. Arah kebijakan keuangan daerah
    d. Pagu indikatif SKPD dan indikasi alokasi dana desa
    e. Program dan prioritas kegiatan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

3. Informasi pagu indikatif bagi setiap SKPD (dan indikasi alokasi dana desa bagi Kabupaten/Kabupaten) merupakan informasi yang wajib disampaikan dalam rancangan awal RKPD. Ketersediaan informasi ini akan sangat dibutuhkan oleh setiap SKPD (dan desa untuk Kabupaten/Kabupaten) sebagai acuan dalam merumuskan rancangan rencana kerja SKPD (dan rencana kerja tahunan desa). Pagu indikatif tersebut juga berfungsi sebagai koridor pendanaan dalam pembahasan forum SKPD (serta pelaksanaan musrenbang desa dan musrenbang kecamatan), sehingga proses pelaksanaan musrenbang menjadi lebih efektif dan efisien.
4. Penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan oleh Tim Inti Penyusunan RKPD yang prosesnya dilakukan secara partisipatif.
5. Penyusunan rancangan awal RKPD dapat dimulai segera setelah dicapainya persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Ranperda APBD untuk pelaksanaan tahun sebelumnya (sekitar bulan Desember). Selanjutnya, paling lambat pada akhir bulan Januari Rancangan Awal RKPD sudah selesai disusun dan disebarkan kepada setiap SKPD dan unit kegiatan.

Sesuai dengan Tupoksi Bappeda yang salah satunya adalah melakukan penelitian dan penyusunan data statistik hasil pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya sebagi bahan pelaporan kepada Kepala Daerah. Dalam Bappeda selalu melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan realisasi program pembangunan dalam RKPD, dimana tugas melaksanakan pengawasan / monitoring terhadap program pembangunan daerah dilakukan oleh

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

bidang monitoring dan pelaporan, sesuai dengan Keputusan Kabupaten Sukamara Tentang Uraian Tupoksi Dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Sukamara No: 061-2412/SK/2001, bidang monitoring dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda Kabupaten Sukamara dibidang monitoring dan pelayanan serta mengevaluasi dan membuat laporan hasil-hasil proyek pembangunan daerah Kabupaten Sukamara.

Musrenbang merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan musrenbang yang dilakukan secara berjenjang dimulai dari musrenbang Kelurahan, musrenbang kecamatan, musrenbang SKPD dan musrenbang Kabupaten, masyarakat berhak untuk berpartisipasi di dalamnya, dalam rangka mengaspirasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut.

Musrenbang Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan tingkat desa/Kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Penyelenggaraan musrenbang desa/ Kelurahan menjadi tanggung jawab kepala desa/lurah, dan difasilitasi/disupervisi oleh camat yang bersangkutan di bawah koordinasi kepala Bappeda.

Musrenbang kecamatan merupakan forum musyawarah pembangunan bersama para pemangku kepentingan tingkat kecamatan. Penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kabupaten. Musrenbang SKPD yaitu wahana pembahasan dan konsolidasi program/kegiatan untuk memperoleh kesepakatan bersama mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

direncanakan termasuk prioritas dan cara penanganannya, dengan cara membahas dan mensinergikan antara prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan rancangan Renja SKPD yang bersumber dari Renstra SKPD. Sedang musrenbang Kabupaten merupakan musyawarah para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kabupaten berdasarkan Renja-SKPD hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.

Musrenbang dapat dilaksanakan jika telah dikeluarkan Surat Edaran Mendagri tentang tata cara dan jadwal pelaksanaan musrenbang. Surat Edaran tersebut sebagai landasan hukum bagi Bappeda selaku fasilitator dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mengeluarkan surat undangan atas nama Bupati perihal penyelenggaraan musrenbang Kelurahan dan musrenbang kecamatan, yang mana undangan tersebut akan disampikan kepada pihak kecamatan dan selanjutnya pihak kecamatan akan menurunkan surat undangan perihal penyelenggaraan musrenbang Kelurahan pada pihak Kelurahan. Selanjutnya Kelurahanlah yang langsung mengundang perwakilan masyarakat setempat yang berkompeten untuk ikut berpartisipasi dalam forum musrenbang tersebut.

Setelah musrenbang Kelurahan dilaksanakan, maka selanjutnya paling lambat minggu ke-3 bulan Februari sudah dilaksanakan musrenbang kecamatan dimana salah satu peserta musrenbang kecamatan ini adalah delegasi hasil musrenbang Kelurahan. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan musrenbang SKPD

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pada minggu ke -1 bulan Maret yang juga dapat dihadiri oleh perwakilan masyarakat. Musrenbang SKPD ini merupakan forum pembahasan strategis yang mempertemukan pendekatan teknokratis dan *top-down* dengan pendekatan partisipatif dan *bottom-up*.

Pada tahap musrenbang Kabupaten terkadang minim partisipasi masyarakat. Peserta lebih banyak didominasi oleh aparat pemerintah daerah, seperti Bupati, SKPD, DPRD, perwakilan Bappeda Pemprov Kalteng, sehingga masyarakat enggan untuk hadir. *Good Governance* merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen *Good Governance* yakni, pemerintah *(government)*, rakyat *(citizen/ civil society)* dan usahawan *(privat)* yang berada disektor swasta. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Kesamaan derajat ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya menciptakan *Good Governance*. Jika kesaman derajat itu tidak sebanding atau tidak terbukti, maka akan terjadi pembiasan dari *Good Governance* (Thoha, 2003:63).

Oleh karena itu, *Good Governance* menghendaki adanya keterlibatan masyarakat dan swasta dalam setiap tahap penyelenggaraan pemerintahan yang dahulu hanya merupakan wilayah pemerintah saja sedang masyarakat hanya dijadikan sebagai objek. Salah satu ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan adalah perencanaan pembangunan daerah, dimana forum partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tersebut adalah musrenbang.

Dalam pelibatan proses penyusunan Musrenbang bahwa pihak swasta

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

selalu/sering dilibatkan dalam proses musrenbang. Hal ini seperti juga diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara dalam wawancara berikut;

"Dalam Surat Edaran Mendagri tentang tata cara dan jadwal pelaksanaan musrenbang tidak dicantumkan secara spesifik peserta musrenbang dari kalangan usahawan. Di dalam Surat Edaran tersebut hanya mencantumkan peserta musrenbang adalah dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat. Sehingga menimbulkan kebingungan terhadap identifikasi stakeholder dari unsur swasta. Sebab defenisi konsep usahawan menurut Bappeda masih bias".
(Wawancara September 2016)

Sehingga dari wawancara diatas telah ada usaha yang ada dilakukan Bappeda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang Pernyataan visi ini mengandung makna sebagai berikut:

1. Perencanaan, mengandung makna untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Sukamara sebagai Kabupaten mandiri, maju, sejahtera dan berwawasan lingkungan diperlukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
2. Profesional, tindakan masa depan yang tepat dengan urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tepat tersebut dilakukan oleh sumber daya manusia perencana yang ahli dan berkualitas dengan menggunakan model-model perencanaan di seluruh biadng pembangunan Kabupaten Sukamara sehingga dapat terwujud Kabupaten Sukamara yang mandiri, maju, sejahtera dan berwawasan lingkungan.
3. Aspiratif, perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sukamara tersebut melibatkan seluruh unsur dan lapisan masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, dan instansi pemerintah yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

ada di Kabupaten Sukamara.

Sebelum musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan, terlebih dahulu Bappeda melakukan tahap identifikasi *stake holder.* Identifikasi *stakeholder* dimaksudkan untuk mencari siapa dan dari unsur mana yang memiliki kompetensi untuk dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan RKPD. Hal ini seperti juga diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara dalam wawancara berikut:

Langkah-1 : Menyusun inventarisasi daftar perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi, LSM dan individu yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan. Data dapat bersumber dari Bappeda sendiri, Kesatuan Bangsa, atau sumber lainnya.

Langkah-2 : Melakukan kajian pengalaman dari institusi atau individu yang terdaftar dan selanjutnya menentukan siapa individu atau institusi yang cocok untuk dilibatkan sebagai tim penyusun, fasilitator, narasumber, advisor atau sebagai mitra diskusi, dan juga menentukan keterlibatan masing-masing dalam keseluruhan proses penyusunan RKPD.

Langkah-3 : Menyiapkan surat permintaan resmi dari Bappeda atau Kepala Daerah untuk pelibatan para stakeholder dalam proses penyusunan RKPD sesuai peran yang dikehendaki.

Langkah-4 : Mengundang para stakeholder yang cocok dan sesuai perannya dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka penyusunan dokumen RKPD.

(Hasil Wawancara, September 2016)

Secara teoritis, di Negara-Negara yang menganut faham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan yang salah satu ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan adalah perencanaan pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah sangat diperlukan, sebab dengan partisipasi masyarakat maka program pembangunan yang akan dilaksanakan lebih tepat sasaran dan efektif, atau dengan perkataan lain sesuai

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dengan kebutuhan masyarakat, partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena masyarakat merupakan salah satu dari *stakeholder* yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kegiatan pembangunan.

Selain itu, masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan, responden juga berpendapat bahwa dengan melibatkan masyarakat maka akan diketahui apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Hal ini seperti juga diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara dalam wawancara berikut;

"Bappeda sudah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, contohnya, melalui Kelurahan, Bappeda sudah mensosialisasikan jadwal pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan selanjutnya Kelurahan yang akan mengumumkan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses Musrenbang. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, karena dengan melibatkan masyarakat akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat disusun program-program pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat, bukan sekedar keinginan. Selain itu, dengan partisipasi masyarakat akan menimbulkan rasa "sense of belonging" (rasa memiliki) terhadap hasil-hasil pembangunan, yang berimplikasi masyarakat akan turut serta memelihara hasil-hasil pembangunan.
Contoh: saat ini pembangunan jalan-jalan di Kabupaten Sukamara hampir merata, hampir tidak terdapat lagi jalan-jalan yang rusak. Masyarakat ikut menjaga hasil pembangunan dengan mendirikan portal-portal. Jadi jika ada kendaraan yang beratnya / kapasitasnya melebihi peringatan beban maksimal yang tertulis diportal, maka kendaraan tersebut tidak diperbolehkan melintas. Sehingga jalan tidak mudah rusak."
(wawancara September 2016)

Efektivitas Perencanaan Pembangunan adalah suatu perencanaan yang bisa membedakan apa yang seyogianya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan berbagai sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap dan tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan objek perencanaannya. Hal ini seperti juga diungkapkan oleh Kepala Bappeda

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Kabupaten Sukamara dalam wawancara berikut:

"Dalam perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara berfungsi sebagai fasilitator dalam pelaksanaan Musrenbang, yang dimulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD dan Kabupaten."
(Hasil wawancara September 2016)

Dari hasil wawancara diatas hal ini sesuai dengan teori Aim Abdul Karim bahwa untuk melihat efektivitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Sukamara, dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung (terutama aspirasinya) dalam setiap pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang di buat pemerintah.
2. Kesesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dilakukan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. Tercapainya suatu tujuan perencanaan pembangunan yang berbasis kerakyatan.
5. Tercapainya tujuan perencanaan pembangunan sesuai atau bertepatan dengan waktu yang telah ditentukan.

Bappeda selalu menganalisis kebutuhan masyarakat terlebih dahulu untuk dijadikan masukan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan oleh Tim Inti Penyusunan RKPD yang prosesnya dilakukan secara partisipatif. Hal ini seperti juga diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara dalam wawancara berikut;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

"Tim Inti Penyusunan RKPD adalah pihak Bappeda. Substansi utama yang termuat dalam rancangan awal RKPD, meliputi isu strategis daerah, kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, pagu indikatif SKPD dan indikasi alokasi dana Kelurahan, program dan prioritas kegiatan"
(Hasil wawancara September 2016)

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut:

1. Bappeda melakukan review RPJMD dan kompilasi rancangan program/kegiatan setiap SKPD untuk tahun rencana. Kompilasi rancangan program/kegiatan setiap SKPD ini diambil dari prakiraan maju RKA-SKPD tahun (n + 1) dari usulan tahun sebelumnya untuk dikonfirmasi kembali kepada setiap SKPD.
2. Bappeda menyiapkan konsep Surat Edaran Kepala Daerah yang ditujukan kepada seluruh SKPD, berisikan permintaan agar setiap SKPD mengkonfirmasi, mereview atau memperbaiki usulan atas rencana program dan kegiatan tahun rencana yang diajukan pada tahun sebelumnya, dengan memperhatikan prioritas daerah.
3. Kepala Daerah mengeluarkan Surat Edaran untuk seluruh SKPD dengan dilengkapi formulir-formulir isian/matriks rencana program dan kegiatan SKPD yang telah disiapkan Bappeda, disertai batas waktu pengembalian formulir isian tersebut kepada Bappeda, yaitu selambat-lambatnya 1 minggu setelah surat edaran disampaikan.
4. Bappeda menerima pengembalian formulir isian rencana program dan kegiatan yang telah dikonfirmasi/direview/dievaluasi atau usulan perubahan dari masing-masing SKPD.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

5. Bappeda melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap matriks-matriks program setiap SKPD berdasarkan pengembalian formulir isian dari SKPD yang dicocokkan dengan hasil review RPJMD, serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pencapaian tahun lalu, kemudian menyusun rekapitulasi dengan menggunakan *form lampiran B-4*.
6. Sambil melaksanakan langkah (1), (2), (3), (4) dan (5), secara simultan Bappeda melalui Tim Intinya menyiapkan dokumen Rancangan Awal RKPD secara lengkap. Untuk itu prototype daftar isi dokumen RKPD dapat digunakan sebagai pedoman.
7. Melakukan serangkaian diskusi terfokus dengan beberapa stakeholder utama SKPD yang bersangkutan, Perguruan Tinggi, Asosiasi-asosiasi terkait, dan komisi di DPRD, khususnya untuk membahas isu strategis dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.
8. Melakukan pembahasan rancangan awal RKPD yang berisi beberapa rencana kerja dengan para Kepala SKPD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja-SKPD.
9. Bappeda mengirimkan rancangan awal RKPD yang disertai dengan jadwal kalender perencanaan daerah untuk tahun yang direncanakan kepada seluruh SKPD sebagai bahan bagi SKPD untuk menyusun Rancangan Renja SKPD. Rancangan awal RKPD Kabupaten/Kabupaten juga merupakan bahan acuan bagi desa/Kelurahan dan kecamatan untuk melakukan Musrenbang desa/Kelurahan dan musrenbang kecamatan.
10. Pengiriman rancangan awal RKPD tersebut disertai dengan catatan agar

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

setiap SKPD menyerahkan rancangan Renja SKPD kepada Bappeda sesuai dengan kalender perencanaan yang disampaikan.

Bahwa program pembangunan dalam RKPD sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebab program pembangunan dalam RKPD tersebut adalah hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam musrenbang, walaupun tidak seluruhnya aspirasi masyarakat diakomodir, sebab memperhatikan daftar prioritas kegiatan pembangunan dan keterbatasan sumber daya keuangan. Hal ini seperti juga diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara dalam wawancara berikut;

"Keterbatasan dana pemerintah dalam APBD, tetapi jika ada program pembangunan yang belum terealisasi pada tahun rencana, maka akan diusulkan kembali untuk perencanaan pembangunan daerah yang akan datang, atau dalam perubahan APBD (APBD-P)"

(Wawancara, September 2016)

Jikapun nantinya aspirasi masyarakat dalam musrenbang selalu diakomodir dalam RKPD, aspirasi masyarakat yang diakomodir adalah yang sesuai dengan daftar prioritas kegiatan pembangunan. Program pembangunan di dalam RKPD selalu dirumuskan secara bersama-sama dengan unsur masyarakat.

Proses penyusunan RKPD dilalui dengan tahap musrenbang. Hal ini sesuai dengan teori manajemen oleh Henry Fayol bahwa pelaksanaan perencanaan/musrenbang tahunan daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rencana pembangunan dan mengalokasikan kegiatan tersebut menurut prioritasnya kepada pihak yang berwenang atau bertanggung jawab pada kegiatan tersebut maupun yang berkomitmen untuk melaksanakannya dibawah koordinasi Kepala Bappeda.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

"Bahwa Bappeda sudah menjalankan prinsip-prinsip Good Governance (Partisipasi dan Transparansi). Dalam hal partisipasi, Bappeda selalu mengundang masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan daerah yang forumnya adalah musrenbang. Sebelum musrenbang dilaksanakan, Bappeda lebih dahulu melakukan identifikasi stakeholder, yaitu untuk mencari siapa, dan dari unsur mana yang memiliki kompetensi untuk dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan RKPD. Setelah diidentifikasi, maka Bappeda mengundang para stakeholder yang cocok dan sesuai perannya dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka penyusunan dokumen RKPD. Menurut Bappeda partisipasi masyarakat sangat penting sebab keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting pengambilan keputusan perencanaan".
(Hasil wawancara September 2016)

Dalam hal transparansi, Bappeda selalu mensosialisasikan setiap jadwal pelaksanaan musrenbang dan mensosialisasikan kembali dokumen RKPD kepada masyarakat melalui pihak kecamatan. Penyusunan rancangan akhir RKPD, program pembangunan yang diusulkan dalam musrenbang, khusunya yang menyangkut kepentingan publik/ masyarakat selalu diakomodir.

Dalam rancangan akhir RKPD tidak diperbolehkan/diperkenankan memasukkan program/kegiatan baru yang tidak melalui proses musrenbang, kecuali apabila setelah pelaksanaan musrenbang RKPD kemudian muncul kebutuhan program/kegiatan baru yang bersifat darurat, misalnya karena ada bencana alam, wabah, atau kerusuhan yang perlu segera ditangani. Untuk itu, maka perlu didiskusikan dan mendapat kesepakatan dengan delegasi musrenbang. Hal ini seperti juga diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara dalam wawancara berikut;

"Rancangan Akhir RKPD merupakan dokumen final RKPD yang telah mengalami serangkaian proses sinergitas dan harmonisasi berbagai pendekatan perencanaan (teknokratis, politis, demokratis/patisipatif, bottom-up dan top-down)".
(Hasil wawancara September 2016)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Dalam penyusunan rancangan akhir RKPD, Bappeda selalu mendahulukan aspirasi masyarakat/ kepentingan publik dari pada kepentingan birokrasi. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan dilandasi dengan prinsip- prinsip kepemerintahan yang baik atau lazim disebut dengan *Good Governance*. Apakah Bappeda sudah menjalankan prinsip-prinsip *Good Governance* (Partisipasi, Transparansi)?

Bappeda sudah menjalankan prinsip-prinsip Good Governance (Partisipasi, Transparansi) tetapi dalam tingkatan yang "cukup baik" .

1 *Transparansi yang dilakukan Bappeda dalam hal mensosialisasikan jadwal pelaksanan Musrenbang (Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten). Sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan Musrenbang ke Kelurahan, lalu selanjutnya Kelurahan akan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musrenbang tersebut, biasanya sosialisasi yang dilakukan Kelurahan dengan membuat pengumuman di papan pengumuman kantor.*

2 *Bappeda akan menyampaikan Surat undangan atas nama Bupati kepada Kelurahan atau Kecamatan dengan terlebih dahulu menerima Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan dengan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara dan Jadwal Pelaksanaan Musrenbang. Selain itu, transparansi juga diterapkan dalam dokumen-dokumen publik seperti dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dapat diakses oleh masyarakat. Dokumen RKPD disosialisasikan dalam Musrenbang Kabupaten, sedang dokumen APBD dapat diketahui oleh masyarakat pada saat Sidang Paripurna DPRD dengan agenda pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA).*

Dalam hal partisipasi, Bappeda selalu melaksanakan Musrenbang secara bertahap, dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Dimana dalam proses Musrenbang tersebut telah melibatkan masyarakat. Namun ada kendala yang dihadapi dalam setiap pelaksanaan Musrenbang, yaitu jadwal pelaksanaan Musrenbang yang sering tidak tepat waktu dikarenakan terlambatnya Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan dengan Mendagri diturunkan ke Kabupaten / Kabupaten. Bappeda sudah merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi agar Surat Edaran tersebut dapat diturunkan dibulan November/ Desember, namun

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

sampai saat ini belum mendapat tanggapan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. (Hasil wawancara September 2016)

Apakah dalam menjalankan prinsip-prinsip *Good Governance* (Partisipasi, Transparansi) tersebut Bappeda pernah mengalami kesulitan/ hambatan hal ini seperti juga diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara dalam wawancara berikut;

Bappeda pernah mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjalankan prinsip-prinsip Good Governnace (Partisipasi dan Transparansi). Dalam hal transparansi misalnya, belum maksimal dijalankan, hal ini terlihat dari dokumen-dokumen publik seperti APBD dan RKPD yang tidak dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas. Dokumen tersebut hanya dapat diakses dalam forum seperti Musrenbang dan Sidang Paripurna DPRD. Sebab adanya kekhawatiran dari Pemerintah Daerah bila dokumen tersebut dipublikasikan secara bebas kemasyarakat luas, maka akan menimbulkan reaksi yang negatif dari masyarakat bila mereka merasa aspirasi yang mereka usung dalam Musrenbang tidak sepenuhnya terakomodir dalam RKPD. Pemerintah Daerah khawatir akan timbul konflik dan berimplikasi pada terganggunya stabilitas politik Kabupaten Sukamara. Persepi masyarakat awam, tentunya mereka menghendaki agar usulan pembangunan mereka dapat diakomodir sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah sebagai program pembangunan tahunan yang nantinya akan direalisasikan. Karena masyarakat tidak masuk dalam suatu sistem pemerintahan, sehingga mereka tidak mengerti bahwa ada mekanisme yang mengatur proses pengakomodiran aspirasi masyarakat untuk dijadikan sebagai program pembangunan tahunan atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Bappeda memang berperan sebagai fasilitator dalam perencanaan pembangunan. Bappeda bertugas mensosialisasikan jadwal pelaksanaan Musrenbang yang dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, sosialisasi tersebut dalam bentuk Surat undangan yang ditanda tangani oleh Bupati lalu diberikan kepada pihak Kelurahan dan Kecamatan. Ketika Musrenbang Kelurahan dilaksanakan, aspirasi masyarakat akan ditampung sepenuhnya, lalu Kelurahan akan mendokumentasikan aspirasi masyarakat tersebut dalam bentuk proposal yang nantinya akan dibahas kembali dalam Musrenbang Kecamatan. Tidak sepenuhnya aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan diakomodir dalam RKPD tetapi harus ditentukan / diidentifikasikan apa yang menjadi skala prioritas Kecamatan dan seterusnya dalam Musrenbang Kabupaten, prioritas Kecamatan disesuaikan dengan program prioritas Kabupaten dan seterusnya sampai ketahapan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Sehingga aspirasi masyarakat pada tingkat Kelurahan tidak dapat sepenuhnya terakomodir.
(Hasil wawancara September 2016)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Dengan sistem perencanaan pembangunan seperti itulah salah satu penyebab minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah daerah sudah berusaha untuk menyertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang forumnya Musrenbang, tetapi pada prakteknya sering terjadi Musrenbang Kelurahan yang minim partisipasi masyarakat hal ini seperti juga diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara dalam wawancara berikut;

Ada hal yang menyebabkan masyarakat enggan terlibat dalam pembangunan. Hal tersebut antara lain, yaitu sikap apatis masyarakat, dikarenakan rendahnya pendidikan politik masyarakat, sehingga mereka tidak mengerti peranan dan manfaat serta fungsi diadakannya Musrenbang, masih rendahnya akses terhadap informasi publik, kemandirian organisasi warga, rendahnya keterlibatan kelompok perempuan dan rendahnya kapasitas mengelola forum- forum musyawarah.
(Hasil wawancara September 2016)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menghendaki adanya partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan yang salah satu forumnya adalah Musrenbang. Apakah dalam Musrenbang, Bappeda sudah mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi hal ini seperti juga diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara dalam wawancara berikut;

"Bappeda sudah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, contohnya, melalui Kelurahan, Bappeda sudah mensosialisasikan jadwal pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan selanjutnya Kelurahan yang akan mengumumkan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses Musrenbang. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, karena dengan melibatkan masyarakat akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat disusun program-program pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat, bukan sekedar keinginan. Selain itu, dengan partisipasi masyarakat akan menimbulkan rasa "sense of belonging" (rasa memiliki) terhadap hasil-hasil pembangunan, yang berimplikasi masyarakat akan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

turut serta memelihara hasil-hasil pembangunan".
(Hasil wawancara September 2016)

Saat ini pembangunan jalan-jalan di Kabupaten Sukamara hampir merata, hampir tidak terdapat lagi jalan-jalan yang rusak. Masyarakat ikut menjaga hasil pembangunan dengan mendirikan portal-portal. Jadi jika ada kendaraan yang beratnya / kapasitasnya melebihi peringatan beban maksimal yang tertulis diportal, maka kendaraan tersebut tidak diperbolehkan melintas. Sehingga jalan tidak mudah rusak.

Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam Musrenbang idealnya adalah seperti yang dikemukakan oleh Sekda Kabupaten Sukamara sebagai berikut;

Masyarakat diundang dalam Musrenbang, dan masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Sistem komunikasi yang digunakan dengan cara berdialog antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Dimana Pemerintah Daerah menampung aspirasi masyarakat berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat tersebut. Tetapi dalam hal ini partisipasi masyarakat hanya sebatas penyampaian aspirasi/ masalah-masalah pada daerah mereka, tidak dalam hal menentukan solusi pemecahan, karena bagian itu merupakan wewenang Pemerintah Daerah. Walaupun secara idealnya, dalam perencanaan pembangunan partisipatif saat ini, masyarakat wajib dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan, tetapi penerjemahan perencanaan pembangunan partisipatif versi pemerintah berbeda. Menurut sudut pandang pemerintah, partisipasi masyarakat cukup hanya dalam penyampaian aspirasi dalam Musrenbang dan ketika proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), masyarakat tidak dilibatkan, karena merupakan wewenang pemerintah saja (Eksekutif dan Legislatif). Karena dikhawatirkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan hanya akan menimbulkan dampak high cost, dan mengganggu konsentrasi kerja pemerintah dan waktu yang berbelit-belit/ lama (red tape.)
(Hasil wawancara September 2016)

Aspirasi masyarakat dalam Musrenbang selalu diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) dikemukakan oleh Sekda Kabupaten Sukamara sebagai berikut;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

"Aspirasi masyarakat selalu diakomodir dalam Musrenbang, tetapi dalam tahap pengakomodiran aspirasi masyarakat untuk dimasukkan dalam RKPD perlu disaring kembali, dengan cara berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait (SKPD) lalu dirumuskan prioritas pembangunan. Dengan adanya skala prioritas tersebut dan mengingat terbatasnya sumber daya dana dan waktu, maka tidak sepenuhnya / seluruhnya kehendak masyarakat dapat diakomodir dalam RKPD. Dalam APBD memang alokasi anggaran publik (aparratus spending) lebih besar dari pada anggaran pembangunan (public spending), yaitu 70% berbanding 30%. Tetapi hal tersebut hanya dilihat dari segi kuantitatif. Yang perlu diketahui bahwa 70% aparatus spending itu pun ditujukan untuk penunjang kemudahan pelayanan public".
(Hasil wawancara September 2016)

Secara teoritis, ranah partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya mencakup partisipasi dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam tahap penganggaran, implementasi dan evaluasi. Apakah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masyarakat dilibatkan seperti halnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dikemukakan oleh Sekda Kabupaten Sukamara sebagai berikut;

Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), partisipasi masyarakat diwakili oleh anggota DPRD, adapun mekanisme penyusunan RKA yaitu,SKPD mengusulkan anggaran untuk program kerja mereka, lalu oleh tim penyusun anggaran (Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah) dibahas bersama-sama, dan tim memutuskan atau menentukan skala prioritas pembiayaan kegiatan yang ditentukan, lalu setelah disepakati kemudian diusulkan ke DPRD lalu diparipurnakan, dalam tahap ini , masyarakat (Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Pers) diperbolehkan untuk menghadiri. Dan setelah disetujui oleh DPRD, lalu akan dievaluasi oleh Gubernur, jika 10 hari sudah berlalu tanpa tanggapan, maka RKA dianggap sah dan merupakan pedoman penyusunan APBD
(Hasil wawancara September 2016)

Secara lebih renci pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran daerah dan penyusunan RKA SKPD yaitu:

Pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran tahunan daerah dilakukan melalui 3 (tiga) hal, yaitu: KUA, PPAS, dan RKA SKPD. KUA, PPAS,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dan RKA SKPD memiliki fungsi penting dan sangat fundamental karena menjembatani proses penerjemahan rencana ke dalam penganggaran. KUA, PPAS, dan RKA SKPD disusun untuk memastikan bahwa kesepakatan *stakeholder* atas tujuan, sasaran, dan target perencanaan dapat direalisasikan. Oleh karena itu sangat perlu diperhatikan konsistensi dokumen perencanaan seperti RKPD, Renja SKPD dengan KUA, PPAS, dan RKA SKPD.

Penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan tanggung jawab Kepala Daerah. Penyusunan rancangan KUA mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan berpedoman pada Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Sedangkan penyusunan rancangan PPAS disusun setelah terdapat kesepakatan KUA antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang menjadi dasar penyusunan PPAS.

Sedangkan esensi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan KUA yang telah disepakati
2. Disusun oleh TAPD dan dinas bersama Panitia Anggaran DPRD

Prinsip-prinsip Penyusunan KUA dan PPAS

Penyusunan KUA mengacu pada Perkada RKPD dan penyusunan PPAS mengacu pada KUA yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Prinsip-prinsip penyusunan KUA dan PPAS adalah sebagai berikut:

1. Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pada pertengahan bulan Juni.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2. Rancangan KUA berisikan antara lain:
   a. Pencapaian kinerja dan uraian ringkas identifikasi permasalahan/hambatan dan tantangan utama pada tahun sebelumnya, perkiraan tahun berjalan dan perkiraan tahun yang direncanakan.
   b. Gambaran umum prioritas pembangunan yang diamanatkan dalam RKPD
   c. Kerangka ekonomi makro dan implikasinya terhadap sumber pendanaan, yang memuat asumsi dan kondisi yang menjadi dasar pencapaian sasaran tahun rencana, yang menyangkut: (1) laju inflasi, (2) pertumbuhan ekonomi regional, (3) tingkat pengangguran regional, (4) asumsi lainnya yang digunakan.
   d. Perkiraan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun yang direncanakan.
   e. Format KUA diatur dalam Permendagri 13/2006
3. Rancangan KUA dibahas bersama Pemda dengan DPRD
4. KUA yang telah disepakati menjadi acuan bagi Kepala Daerah untuk menyusun rancangan PPAS dan selanjutnya rancangan PPAS tersebut disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama.
5. Pembahasan PPAS paling lambat dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juli.
6. PPAS memuat Prioritas dan Plafon Anggaran menurut urusan wajib/pilihan dan organisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Pembahasan PPAS melalui langkah-langkah berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

a. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan.

b. Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan

c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing – masing program.

Penyusunan RKA SKPD

RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pendekatan dalam penyusunan RKA SKPD adalah sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan KUA APBD dan PPAS yang telah disepakati
2. Disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan anggaran kinerja
3. Menggunakan prakiraan maju perkiraan belanja untuk tahun berikutnya
4. Menggunakan pendekatan kinerja (masukan dan keluaran)
5. Penilaian kewajaran dengan Standar Analisis Belanja (SAB)
6. Pendekatan ASB : Analisis Standar Biaya untuk menilai kewajaran Beban Kerja dan Biaya
7. Sesuai dengan TUPOKSI SKPD
8. Menggunakan Standar Biaya
9. Menggunakan Tolok Ukur Kinerja
10. Terdiri atas belanja langsung (kegiatan) dan belanja tidak langsung (periodik atau non kegiatan)

Prinsip-prinsip Penyusunan RKA SKPD

RKA SKPD disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1. Kepala SKPD dibantu tim penyusun Renja SKPD menyusun RKA- SKPD mengacu pada pedoman penyusunan RKA-SKPD yang ditetapkan Kepala Daerah termasuk lampirannya yang mencakup KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, serta mempertimbangkan standar pelayanan minimal (SPM)
2. RKA SKPD yang disusun menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kinerja.
3. RKA-SKPD berisikan :
   1 Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan SKPD
   2 Rincian anggaran pendapatan SKPD
   3 Rincian anggaran biaya tidak langsung SKPD.
   4 Rekapitulasi rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD untuk tahun rencana dan tahun berikutnya (n+1).
   5 Rincian penerimaan pembiayaan daerah
   6 Rincian pengeluaran pembiayaan daerah

Dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka pemerintah berkewajiban untuk memobilisasi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan, dan Perda merupakan saranan hukum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Tata cara / prosedur partisipasi masyarakat adalam perencanaan pembangunan sudah terlembagakan dalam suatu Peraturan Daerah dikemukakan oleh Sekda Kabupaten Sukamara sebagai berikut;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Prosedur partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum terlembagakan dalam suatu Perda, sebab jika pemerintah daerah ingin mengeluarkan Perda, maka ada prosedur nya yaitu, menunggu Instruksi dari Mendagri. Instruksi ini merupakan landasan hukum pembuatan Perda.
(Hasil wawancara September 2016)

Terkait apakah Bappeda melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi RKPD hal tersebut dikemukakan oleh Sekda Kabupaten Sukamara sebagai berikut;

"Bappeda selalu melakukan monitoring dan evaluasi, sebab hal tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Bappeda bidang monitoringdan pelaporan. Setiap triwulan Bappeda akan memonitor pelaksanaan pembangunan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Apakah SKPD tersebut sudah menjalankan program kerjanya sesuai dengan rencana atau belum. Jika belum, maka Bappeda akan meminta penjelasan pada instansi yang belum secara maskimal menjalankan program kerjanya, lalu hasil dari monitoring tersebut akan didokumentasikan dalam laporan yang nantinya akan disampaikan ke Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) dan Bupati".
(Hasil wawancara September 2016)

Jika dalam pelaksanaan RKPD terjadi suatu penyimpangan, misalnya ada program pembangunan yang tidak terealisasi sebagaimana mestinya, maka Bappeda melakukan suatu tindakan korektif hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara sebagai berikut;

"Ya, sesuai dengan Tupoksi Bappeda, maka Bappeda selalu memonitor dan mengevaluasi implementasi program-program pembangunan masing-masing instansi (SKPD), dengan cara berkoordinasi dengan instansi terkait. Jika ada terdapat program pembangunan yang belum terealisasi, maka Bappeda akan kembali mengusulkan program pembangunan yang belum terealisasi tersebut pada Musrenbang yang akan datang. Sebab memang tidak sepenuhnya pogram-program pembangunan dalam RKPD terealisasi sesuai dengan waktu dan rencana yang telah ditetapkan mengingat keterbatasan sumber dana keuangan dan skala prioritas pembangunan".
(Hasil wawancara September 2016)

Mengenai mekanisme yang dilakuan Bappeda untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Rencana Awal RKPD, hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara sebagai berikut;

"Dengan melakukan sistem jaring asmara (aspirasi masyarakat) dalam bentuk melakukan public hearing. Atau langsung terjun kelapangan dengan melihat dan memantau langsung kondisi sosial masyarakat. Dalam hal menginventarisir permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya (pendidikan dan kesehatan), Bappeda berkoordinasi dengan SKPD terkait, lalu melalui SKPD tersebut dikumpulkan data-data / informasi yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Problem-problem yang disampaikan SKPD menjadi input bagi Bappeda untuk penyusunan rencana awal. Jadi dalam hal ini, Bappeda berperan sebagai unit perencana, sedang masalah teknis dijalankan oleh masing-masing SKPD".
(Hasil wawancara September 2016)

Tentang program-program pembangunan dalam RKPD sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara sebagai berikut;

"Program-program pembangunan dalam RKPD sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebab program-program pembangunan dalam RKPD tersebut adalah hasil akhir dari penjaringan aspirasi masyarakat dalam Musrenbang. Sehingga merupakan kebutuhan masyarakat, walaupun belum sepenuhnya menampung aspirasi masyarakat sebab penentuan program pembangunan untuk dimasukkan dalam RPKD adalah hasil seleksi berdasarkan skala prioritas dan mengingat keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah".
(Hasil wawancara September 2016)

Kualitas dan efektifitas RKPD ditentukan oleh adanya hal-hal sebagai berikut:

a. Review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pembangunan daerah dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD
b. Kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pembangunan daerah masa kini dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib, atau urusan pilihan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

c. Kajian perspektif masa depan daerah: mengantisipasi perubahan- perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pembangunan daerah dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja daerah dalam pembangunan dapat ditingkatkan, lebih efisien, dan efektif.

d. Rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja pembangunan daerah

e. Konsistensi dan hubungan yang jelas antara RKPD dengan visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD, RKPD, dan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh MENDAGRI.

f. Penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.

g. Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan mengakomodasikan Stándar Pelayanan Minimal

h. Kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dan kendala fiskal daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan RKPD

i. Dilakukannya proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RKPD dan kesesuaian antara RKPD dengan hasil-hasil kesepakatan Musrenbang dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Forum Multi *Stakeholder* SKPD.

Mengenai praktek sistem perencanaan pembangunan daerah pada Kabupaten Sukamara, Apakah sudah menerapkan sistem perencanaan pembangunan partisipatif secara murni sesuai dengan teori, dimana masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara sebagai berikut;

"Sistem perencanaan pembangunan pada Kabupaten Sukamara sudah menerapkan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, namun Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam hal ini diterjemahkan secara berbeda oleh Pemerintah Daerah (Bappeda), dimana Perencanaan Pembangunan Partisipatif menurut persepsi Bappeda tidak sekompleks dan seideal teori Perencanaan Pembangunan Partisipatif itu sendiri. Secara teoritis, dalam system politik demokratis, masyarakat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi, dengan posisi mulia masyarakat tersebut, maka menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka lebih jauh, masyarakat sejatinya dilibatkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan. Dal hal pembangunan misalnya, ranah partisipasi masyarakat yaitu, pada tahap perencanaan, penganggaran, implementasi dan evaluasi. Namun, pada prakteknya teori tersebut jika diimplementasikan tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Sehingga pada tatanan praktis, partisipasi masyarakat hanya dalam penyampaian asprasi dalam tahap perencanaan pembangunan yang forumnya adalah Musrenbang. Sedang pada tahap penganggaran, partisipasi masyarakat diwakili oleh DPRD" (Hasil wawancara September 2016)

.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, permasalahan dalam transparansi anggaran paradoks dengan transparansi dalam musrenbang. Persoalan transparansi diatas juga terjadi pada Bappeda Kabupaten Sukamara, dimana hasil wawancara didapat informasi bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran pihak-pihak yang terlibat adalah unsur pemerintah daerah saja, dan DPRD.

Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara bahwa; DPRD sudah cukup dirasa sebagai wakil dari masyarakat. Seperti kutipan wawancara berikut:

"Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), partisipasi masyarakat diwakili oleh anggota DPRD, adapun mekanisme penyusunan RKA

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

yaitu,SKPD mengusulkan anggaran untuk program kerja mereka, lalu oleh tim penyusun anggaran (Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah) dibahas bersama-sama, dan tim memutuskan atau menentukan skala prioritas pembiayaan kegiatan yang ditentukan, lalu setelah disepakati kemudian diusulkan ke DPRD lalu diparipurnakan, dalam tahap ini, masyarakat (Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Pers) diperbolehkan untuk menghadiri. Dan setelah disetujui oleh DPRD, lalu akan dievaluasi oleh Gubermur, jika 10 hari sudah berlalu tanpa tanggapan, maka RKA dianggap sah dan merupakan pedoman penyusunan APBD".

Informasi hasil *interview* itu juga diperkuat oleh data yang diperoleh dari aparatur Bappeda Kabupaten Sukamara, bahwa dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) Bappeda tidak melibatkan masyarakat. Artinya, Informasi mengenai penganggaran masih didominasi oleh para elit pemerintah, dan dokumen APBD juga tidak mudah untuk dapat di akses oleh masyarakat umum.

Hal ini sesuai dengan informasi yang penulis peroleh dari penyebaran wawancara kepada pegawai di Bappeda, bahwa dokumen APBD tidak dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Dokumen APBD hanya dapat diakses pada saat sidang paripura DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD, tetapi tidak disebar luaskan secara bebas kemasyarakat, misalnya dalam bentuk publikasi di media massa atau internet.

Padahal dalam tata pemerintahan yang berpusat rakyat atau tata pemerintahan partisipatif, kebijakan ditempatkan sebagai proses social dan politik tempat warga menegosiasikan alokasi barang dan anggaran public. Kebijakan bukan persoalan teknis yang dapat diselesaikan secara teknokratis oleh kelompok orang yang dipercaya untuk merumuskan itu (biasanya politisi, birokrat atau akademisi). Kebijakan merupakan ruang bagi teknisi dan anggota masyarakat untuk melakukan interaksi dan menggabungkan pengetahuan. Karena itu kebijakan harus melibatkan pihak yang luas, dan agar dapat terlaksana harus

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

menjamin agar kepentingan berbagai pihak sudah dikonfrontasi atau dinegosiasikan.

Ketidakterbukaan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran sehingga memunculkan interpretasi yang berbeda-beda mengenai prioritas anggaran menunjukkan rendahnya transparansi anggaran. Kegagalan pemerintah membangun argumentasi yang dapat diterima public dalam menjelaskan kebijakan anggaran yang diambil juga menunjukkan rendahnya transparansi anggaran. Jangankan untuk memperoleh informasi mengenai anggaran, hanya sekedar ingin mengetahui berbagai kegiatan pemerintah saja diperlukan pengorbanan yang sangat besar. Hal ini tentu menunjukkan tingkat transparansi yang masih rendah.

Kurangnya informasi tentang kebijakan pemerintah berakibat hak warga untuk mengetahui apa yang terjadi dalam suatu birokrasi public sering kali masih sangat terbatas. Apalagi untuk memperoleh informasi tertentu yang bersifat agak sensitive (karena terkait dengan kepentingan para pejabatnya), misalnya anggaran untuk proyek-proyek di suatu birokrasi, warga pada umumnya tidak memilki akses sama sekali. Jangankan warga, para pejabat dan staf yang ada dalam birokrasi sendiri seringkali tidak memiliki informasi mengenai anggaran proyek yang ada dalam instansi mereka. Biasanya yang mengetahui anggaran proyek di dalam suatu birokrasi pemerintah hanyalah kepala, pimpinan proyek dan bendaharawan proyek. Informasi mengenai anggaran merupakan barang langka yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu di dalam birokrasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, relasi pemerintah daerah dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

masyarakat ditandai dengan minimnya *disclosure* dan diseminasi informasi kepada masyarakat. Hal ini karena pemerintah daerah merasa tidak berkewajiban untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, karena belum adanya peraturan daerah yang mewajibkan hal tersebut. Informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat lebih merupakan "kebaikan" yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Peraturan daerah merupakan sarana hukum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, dengan adanya perda tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka pemerintah berkewajiban untuk memobilisasi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan dari hasil penelitian yang dilakukan, pada Pemerintah Kabupaten Sukamara Perda tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum ada, sesuai dengan hasil *interview* yang dilakukan:

"Prosedur partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum terlembagakan dalam suatu Perda, sebab jika pemerintah daerah ingin mengeluarkan Perda, maka ada prosedur nya yaitu, menunggu Instruksi dari Mendagri. Instruksi ini merupakan landasan hukum pembuatan Perda".

Sedangkan transparansi terhadap dokumen akhir musrenbang. yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda Kabupaten Sukamara sudah cukup transparan, sesuai dengan hasil wawancara bahwa program pembangunan dalam RKPD disosialisasikan kembali kemasyarakat. Program pembangunan dalam RKPD akan didokumentasikan lalu didistribusikan kepada masing-masing kecamatan. Atau pada saat reses, yang dihadiri oleh pihak Bappeda Kabupaten Sukamara, SKPD dan DPRD serta perwakilan masyarakat, dibacakanlah program-program usulan masyarakat yang telah diakomodir dalam

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

RKPD. Pihak Bappeda Kabupaten Sukamara juga akan menjelaskan kepada masyarakat tentang alasan aspirasi masyarakat yang telah terakomodir dalam RKPD dan aspirasi yang tidak terakomodir.

EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Efektivitas Perencanaan Pembangunan adalah suatu perencanaan yang bisa membedakan apa yang seyogianya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan berbagai sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap dan tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan objek perencanaannya (Tjokroamidjojo, 1994:57).

Adapun landasan yuridis perencanaan pembangunan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan :

a. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional.
b. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian / lembaga dan lintas kewilayahan serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal serta program Kementerian/ Lembaga, lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

a. RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
b. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja adalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
c. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam penelitian ini unit analisa penulis terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Daerah Kabupaten Sukamara diperoleh data dengan teknik studi dokumentasi tentang arah kebijakan program pembangunan Kabupaten Sukamara tahun 2015 sebagai berikut:

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2015 YAITU:

1. Penangggulangan kemiskinan;
2. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor;
3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
4. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan Reformasi birokrasi;
5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Kabupaten.

Prioritas pembangunan ini ditempuh dengan kebijakan dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan: Arah kebijakan:
   a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut:
      1) Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTS, pesantren Salafiyah dan satuan Non-Islam setara SD dan SMP;
      2) Besiswa bagi siswa miskin;
      3) Pengembangan pendidikan keaksaraan fungsional;
      4) Peningkatan pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

a) Pelayanan kesehatan keluarga msikin di puskesmas dan jaringannya;

b) Pelayanan kesehatan keluarga miskin di rumah sakit kelas III;

5) Peningkatan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan bagi keluarga miskin.

b. Peningkatan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat miskin yang meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut:

1) Pengembangan subsidi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

2) Fasilitas peningkatan kualitas kawasan kumuh;

3) Penyediaan sarana dan prasara permukiman kumuh.

c. Penyediaan dukungan pembinaan peningkatan kesejahteraan bagi rumah tangga miskin.

d. Peningkatan perlindungan kepada keluarga miskin, termasuk perempuan dan anak, penyandang masalah social, dan korban bencana yang meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut:

1) Jaminan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin;

2) Peningkatan akses informasi bagi pelayanan ketahanan keluarga serta fasilitas pemberdayaan keluarga;

3) Peningkatan pendidikan gizi, imunisasi bagi ibu hamil, bayi dan balita;

4) Fasilitasi pembentukan pusat pelayanan terpadu

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

pemberdayaan perempuan (P2TP2);

5) Pemberdayaan sosial untuk masyarakat miskin;

6) Bantuan bencana alam dan jaminan social untuk masyarakat rentan, termasuk korban bencana alam dan bencana social.

e. Penanganan masalah gizi kurang dan kerawanan pangan yang meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut:

1) Perbaikan gizi masyarakat melalui penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan zat gizi mikro lainnya pada rumah tangga miskin;

2) Peningkatan ketahanan pangan yang diprioritaskan pada penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin.

f. Perluasan kesempatan berusaha melalui peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro bagi masyarakat miskin yang meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut:

1) Penyediaan sarana dan prasarana usaha mikro;

2) Pelatihan pelayanan usaha teknis manajemen usaha skala mikro;

3) Peningkatan pelayanan koperasi dalam peningkatan usaha mikro;

4) Pembinaan sentra-sentra produksi tradisional;

5) Pembiayaan produktif pola usaha bagi hasil/syariah dan konvensional.

g. Peningkatan sinergi dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

yang meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut:

1) Peningkatan pemberdayaan masyarakat diantaranya melalui program pengembangan kecamatan;
2) Fasilitas penguatan kelembagaan dan pemantauan unit pengaduan masyarakat untuk program penanggulangan kemiskinan;
3) Peningkatan kapasitas masyarakat miskin perKabupatenan, diantaranya melaui program penanggulangan kemiskinan per Kabupaten (P2KP).

2. Peningkatan Kesempataan Kerja, Investasi dan Ekspor Arah Kebijakan:
   a. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dengan pekerja dengan kegiatan prioritas:
      1) Penyebarluasan informasi tentang hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja;
      2) Penyebarluasan informasi hak-hak tenaga kerja dan peraturan tentang ketenagakerjaan;
      3) Monitoring dan pengawasan pelaksanaan perlindungan hak-hak tenaga kerja di perusahaan.
   b. Penciptaan pasar tenaga kerja yang lebih terbuka dengan kegiatan prioritas:
      1) Meningkatkan kinerja balai latihan kerja (BLK) dengan menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi;
      2) fasilitasi kegiatan pendukung pasar kerja melalui penguatan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kelembagaan, informasi pasar yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan penyelenggaraan bursa kerja;

3) Mewajibkan kepada seluruh perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja untuk melaporkan kepada kantor tenaga kerja agar informasi kerja tersebut dapat disebarluaskan.

c. Meningkatkan usaha promosi potensi daerah dengan kegiatan prioritas:

1) Ikut serta dalam kegiatan pameran promosi daerah di dalam negeri maupun diluar negeri;

2) Meningkatkan kemampuan aparat pengelola investasi dengan mengikutsertakan pada kegiatan pendidikan dan latihan;

3) Ikut serta dalam kegiatan konsultasi investasi baik pada tingkat regional maupun nasional.

d. Meningkatkan daya saing produk industry dan menengah serta pengembangan ekspor dengan kegiatan prioritas :

1) Peningkatan mutu dan penganekaragaman produk industri kecil dan menengah melalui pelatihan bagi pengrajin dan pengembangan teknologi tepat guna;

2) *Benchmarking* pada proses produksi yang identik melalui magang didaerah yang unggul dalam produk tertentu;

3) Pembinaan industri kecil dan menengah serta membantu usaha-usaha untuk menembus pasar ekspor.

e. Meningkatkan akses UKM terhadap sumber daya produktif dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kegiatan prioritas:

1) Perluasan akses pembiayaan melalui bantuan modal usaha;
2) Peningkatan komoditi unggulan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi local dan memanfaatkan potensi daerah;
3) Pengembangan jaringan pasar produk UKM dan anggota koperasi melalui pengembangan lembaga pemasaran;
4) Pemasyarakatan kewirausahaan dan pembinaan untuk memacu pengembangan wirausaha baru UKM.

3. Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Arah kebijakan:

a. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar sembilan tahun dengan kegiatan prioritas:
   1) Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTS, Pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP;
   2) Rehabilitasi SD/ MI/ SDLB dan SMP/ MTs;
   3) Pengadaan buku pelajaran SD/ MI/ SDLB dan SMP/ MTs;
   4) Penyelenggaraan pendidikan alternative termasuk SMP terbuka. Paket A dan Paket B.

b. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan, relevansi pendidikan menengah dengan kegiatan prioritas:
   1) Penyediaan beasiswa untuk siswa miskin;
   2) Rehabilitasi SMA/ SMK/ MA.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

3) Pengadaan buku pelajaran SMA/ SMK/ MA;

4) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

5) Pembangunan parasarana pendukung mencakup perpustakaan termasuk buku bacaannya, laboratorium dan workshop;

6) Penyediaan besiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi.

c. Peningkatan ketersediaan dan kualitas guru dengan kegiatan prioritas :

1) Sertifikasi profesi bagi pendidik;

2) Peningkatan kualifikasi akademik bagi pendidik;

3) Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;

4) Pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;

5) Peningkatan kesejahteraan pendidik termasuk melalui lanjutan pengkaryaan guru dan subsidi tambahan jam mengajar untuk remedial teaching.

d. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dengan kegiatan prioritas:

1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dikelas III rumah sakit;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2) Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringan;

3) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar;

4) Peningkatan ketersediaan obat generic esensial, pengawasan obat, makanan dan keamanan pangan serta perbekalan kesehatan.

e. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah termasuk penanganan terpadu flu burung dengan kegiatan prioritas:

1) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular termasuk flu burung;

2) Peningkatan imunisasi.

f. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita dengan kegiatan prioritas :

Peningkatan pendidikan gizi masyarakat;

7. Penanggulangan kekurangan gizi terutama pada ibu hamil, bayi dan anak balita.

4. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa Dan Reformasi Birokrasi Arah kebijakan:

a. Melakukan pembenahan system kelembagaan dan manajemen pemerintahan Kabupaten agar lebih efektif dan efisien serta berorientasi pada peningkatan kinerja instansi dan para pegawai;

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan profesionalisme

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

SDM aparatur;

c. Melanjutkan pembenahan manajeman kepegawaian, mencakup system renumerasi, data PNS, pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja melalui penyempurnaan DP3 dan penerapan reward dan punishment;

d. Membentuk dan menata system koneksi (inter-phase) tahap awal nomor induk kependudukan (NIK) yang berintegrasi antar instansi yang terkait dengan perpajakan, imigrasi, kepegawaian (PNS), catatan sipil dan pelayanan kependudukan lainnya;

e. Meningkatkan akses partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan;

f. Fasilitasi peningkatan peran partai politik dalam pelaksanaan pembangunan;

g. Fasilitasi peningkatan efektivitas mekanisme/saluran partisipasi dan pengawasan politik masyarakat terhadap DPRD.

5. Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Kabupaten Serta Penanggulangan Bencana Arah kebijakan:

a. Perbaikan jalur hijau sungai;

b. Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana jalur distibusi utama, seperti peningkatan/ pembangunan jalan dan jembatan pada ruas arteri primer yang mendukung kawasan strategis;

c. Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan dan penanganan daerah rawan kecelakaan;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

d. Penyediaan prasarana dan sarana dasar rumah sederhana, rumah sederhana sehat, rumahlayak huni dan revitalisasi kawasan permukiman kumuh serta pengembangan subsidi pemilikan rumah;

e. Pembangunan dan perbaikan perumahan berbasis swadaya masyarakat;

f. Peningkatan pasokan air bersih dengan penambahan/pembangunan water treatmnent serta perluasan cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat;

g. Perbaikan dan pembangunan drainase dan air limbah;

h. Peningkatan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan dan Kabupaten.

6. Untuk menganalisis Efektivitas Perencanaan Pembangunan dapat di lihat dengan indikator sebagai berikut:

a. Adanya keterlibatan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung (terutama aspirasinya) dalam setiap pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang di buat pemerintah.

b. Kesesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dilakukan dengan kebutuhan masyarakat.

c. Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

d. Tercapainya suatu tujuan perencanaan pembangunan yang berbasis kerakyatan.

e. Tercapainya tujuan perencanaan pembangunan sesuai atau bertepatan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dengan waktu yang telah ditentukan.

C. Pembahasan

Menurut Bappeda, sepanjang masyarakat sudah terlibat dalam Musrenbang dan aspirasi mereka ditampung / diakomodir oleh pemerintah, itulah makna Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Dan secara spesifik sebenarnya ada lima pendekatan perencanaan pembangunan, dalam penyusunan RKPD yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, top-down dan bottom-up.

1. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja)

   Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan RKPD dalam mencapai tujuan, sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam Musrenbang RKPD. Penyusunan RKPD pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan.

   Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

   a. Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu.
   b. Rumusan status, kedudukan kinerja pembangunan daerah masa kini.
   c. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD.
   d. Rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, result oriented, time bound).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

e. Rumusan alternatif strategi untuk pencapaian tujuan.

f. Rumusan kebijakan untuk masing-masing strategi.

g. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya dan dana (kendala fiskal daerah).

h. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja.

i. Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal.

j. Tolok ukur dan target kinerja keluaran.

k. Tolok ukur dan target kinerja hasil.

l. Pagu indikatif program dan kegiatan.

m. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya.

n. Kejelasan siapa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, dan waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran.

2. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif.

Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Identifikasi stakeholder yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD.

b. Kesetaraan antara stakeholder dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan.

c. Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

d. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal.

e. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD.

f. Pelibatan media.

g. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif.

h. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan dan prioritas program.

3. Pendekatan Politis

Pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Konsultasi dengan Kepala Daerah Terpilih untuk penerjemahan yang tepat, sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah.

b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD.

c. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD.

d. Review dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan RKPD.

e. Pembahasan terhadap RANPERKADA RKPD.

f. Pengesahan RKPD sebagai Peraturan Kepala Daerah yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan.

4. Pendekatan Bottom-up

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pendekatan bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih.

b. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah.

c. Mempertimbangkan hasil Forum SKPD.

5. Pendekatan Top down

Pendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Sinergi dengan RKP dan RENJA K/L.

b. Sinergi dan konsistensi dengan RPJPD dan RPJMD.

c. Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD.

d. Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals*, *Sustainable Development*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih dan sanitasi, dsb.

Pada Bab ini, dari hasil penyajian data yang telah diuraikan pada Bab IV akan dianalisa dengan teknik analisa data kualitatif, yaitu teknik analisa data yang dilakukan berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data dan informasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan kemudian diambil kesimpulan.

Dari seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan, baik melalui studi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pustaka, wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi, maka dapat diberikan suatu analisa tentang "Implikasi Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance)* Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan". Dalam melakukan analisa terhadap data dan informasi, Penulis tetap menghubungkan dengan beberapa indikator dalam melihat bagaimanakah pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance*, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara. Dalam penelitian ini Penulis membatasi prinsip-prinsip *Good Governance* yang diteliti hanya transparansi dan partisipasi. Sebab transparansi dan partisipasi merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan *Good Governance*, dengan rasionalisasi sebagai berikut:

Transparansi memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kemampuan pemerintah untuk mewujudkan berbagai indikator *governance* yang lain. Misalnya, bagaimana pemerintah dapat menjadikan dirinya partisipatif kalau mereka tidak sanggup mewujudkan transparansi. Warga hanya akan mau dan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pelayanan jika *rule of the game* mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik itu terbuka dan mudah diketahui oleh warga. Jika hak dan kewajiban warga ketika terlibat maupun tidak terlibat dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan dapat diketahui oleh warga. Jika hak dan kewajiban warga ketika terlibat maupun tidak terlibat dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan dapat diketahui dengan jelas dan mudah, maka warga dapat mengambil keputusan yaitu apakah mereka perlu terlibat dalam kegiatan itu atau tidak. Kalau informasi mengenai hak dan kewajiban tidak jelas dan sulit diketahui warga maka tidak akan ada partisipasi.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Transparansi juga memiliki keterkaitaan yang erat dengan akuntabilitas publik. Seberapa jauh warga dapat menilai tindakan pemerintah? Tentu sangat tergantung pada transparansinya. Warga dapat menilai tindakan pemerintah bersifat akuntabel atau tidak, tergantung pada kemampuan warga untuk memahami dengan mudah apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah melakukan, dan seberapa jauh tindakan pemerintah itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Kalau warga tidak memahami apa yang dilakukan oleh pemerintahnya, memahami rasionalitas dari tindakan itu, serta membandingkannya dengan nilai-nilai yang mereka miliki, maka akan sulit untuk menilai akuntabilitas dari tindakan pemerintah. Disini transparansi memiliki peran penting dalam pengembangan akuntabilitas publik karena dengan mewujudkan transparansi maka pemerintah setidak-tidaknya telah mempermudah warga untuk mengetahui tindakannya, rasionalitas dari tindakan itu, serta membandingkannya dengan sistem nilai yang ada. Tanpa transparansi maka tindak akan ada akuntabilitas publik.

Transparansi juga memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap upaya penegakan hukum. Salah satu kendala dalam penegakan hukum di Indonesia adalah tidak transparannya proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan di kepolisian dan kejaksaan cenderung tertutup dan tidak mudah dipantau oleh publik. Tidak mengherankan kalau oknum-oknum kepolisian dan kejaksanaan sering memainkan kasus hukum untuk kepentingan mereka sendiri tanpa dapat diketahui oleh publik. Penentuan dihentikannya atau diteruskannya suatu kasus hukum untuk diproses diperadilan seringkali

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kriterianya tidak jelas di logika hukum yang tidak dimengerti oleh masyarakat luas, Mereka sering memainkan kasus hukum untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Sedangkan partisipasi merupakan aspek yang penting dalam mewujudkan *Good Governance* sebab *Good Governance* tidak dimaksudkan memberikan kewenangan hanya kepada pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, tetapi lebih dari itu harus memperkuat peran dan kedudukan warga masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kesetaraan politik antara warga dengan pemerintah ini penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena setiap orang sejatinya memiliki hak yang sama dalam hukum dan politik. Artinya, setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mempengaruhi setiap kebijakan berdasarkan kepada preferensinya dan juga kepentinganya, menurut rambu-rambu yang telah disepakati dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan. Masyarakat harus memiliki kesempatan ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan yang ada, mulai pemeriksaan awal masalah, daftar pemecahan yang mungkin diambil, pemilihan satu kemungkinan tindakan, mengorganisasikan pelaksanaan, evaluasi dalam tahap pelaksanaan, hingga memperdebatkan mutu dari mobilisasi atau organisasi lebih lanjut (Sugeng Husain, 2012).

Lebih lanjut, Indonesia sebagai Negara dengan sistem politik demokratis, dimana partisipasi merupakan elemen yang penting. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan kolektif. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan terdorong oleh

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurangnya diperhatikan dan sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan yang berwenang yang diwujudkan dalam sebuah keputusan. Masyarakat percaya bahwa kegiatan yang mereka lakukan mempunyai efek.

Selanjutnya, penulis juga akan menganalisa Bagaimana Implikasi *Good Governance* Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan Pada Kabupaten Sukamara. Analisa juga dilakukan dengan berpedoman pada indikator-indikator efektivitas perencanaan pembangunan, dalam hal ini perencanaan pembangunan yang diteliti yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2015.

Good Governance

Good Governance adalah proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan *stakeholders* yang luas dalam bidang ekonomi, sosial dan politik suatu Negara dan pendayagunaan sumber daya alam, keuangan dan manusia menurut kepentingan semua pihak dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip partisipasi dan transparansi.

Partisipasi

Prinsip partisipasi mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pelaksanaan prinsip partisipasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara yaitu:

Adanya forum untuk menampung aspirasi masyarakat yang representatif,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

jelas arahnya, dapat dikontrol dan bersifat terbuka. fokus pemerintah adalah memberikan arah dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi. kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pelayanan publik, serta adanya akses masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Secara dialektika, perencanaan pembangunan merupakan arena partisipasi, yang sesungguhnya memegang peranan penting dalam memperlihatkan apa yang akan dilakukan di masa depan terhadap sumber daya yang terbatas. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan sebagai salah satu upaya kemandirian daerah dengan memberikan peran lebih besar pada inisiatif lokal dan memastikan ikut sertanya dalam penyusunan konsep, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Sejalan dengan hal ini, Pemerintah hendaknya berupaya menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui program Perencanaan Pembangunan Partisipatif (PPP), dengan membuka lebih banyak ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pembangunan.

Contoh forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah adalah Musrenbang. Musrenbang merupakan forum partisipasi masyarakat yang berjenjang untuk menyelaraskan antara proses perencanaan "dari bawah" (*bottom up*) dan "dari atas" (*top down*). Di forum ini, berbagai pihak menegosiasikan, merekonsiliasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kepentingan serta kebutuhan dalam pembangunan, yang hasilnya adalah berupa kesepakatan bersama tentang prioritas program,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

kegiatan, dan anggaran pembangunan daerah. (Wastiono Sadu, 2005: 67).

Sejalan dengan teori tersebut, hasil penelitian yang diperoleh di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara, menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan partisipatif sudah dilaksanakan di Pemerintahan Kabupaten Sukamara. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menghendaki adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang forumnya adalah musrenbang.

Musrenbang merupakan suatu instrumen penting untuk menghasilkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan APBD yang responsif terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat. Musrenbang yang memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran sangat diperlukan untuk menghasilkan RKPD dan APBD yang memenuhi harapan masyarakat. Perencanaan dan penganggaran partisipatif, dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat, merupakan salah satu upaya menegakkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. (Wastiono Sadu, 2005:72).

Dari hasil wawancara dengan *Key Informan*, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Sukamara selalu diadakan setiap tahun. Musrenbang merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan musrenbang yang dilakukan secara berjenjang dimulai dari musrenbang Kelurahan, musrenbang Kecamatan, musrenbang SKPD dan musrenbang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Kabupaten, masyarakat berhak untuk berpartisipasi di dalamnya, dalam rangka mengaspirasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut.

Musrenbang Desa/Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan tingkat Desa/Kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Penyelenggaraan musrenbang Desa/ Kelurahan menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah, dan difasilitasi/disupervisi oleh camat yang bersangkutan di bawah koordinasi kepala Bappeda.

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah pembangunan bersama para pemangku kepentingan tingkat Kecamatan. Penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kabupaten.

Musrenbang SKPD yaitu wahana pembahasan dan konsolidasi program/kegiatan untuk memperoleh kesepakatan bersama mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan termasuk prioritas dan cara penanganannya, dengan cara membahas dan mensinergikan antara prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang Kecamatan dengan rancangan Renja SKPD yang bersumber dari Renstra SKPD.

Sedang musrenbang Kabupaten merupakan musyawarah para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kabupaten berdasarkan Renja-SKPD hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Musrenbang dapat dilaksanakan jika telah dikeluarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara dan jadwal pelaksanaan musrenbang. Surat Edaran Bersama tersebut sebagai landasan hukum bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara selaku fasilitator dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mengeluarkan surat undangan atas nama Bupati perihal penyelenggaraan musrenbang Desa/Kelurahan dan musrenbang Kecamatan, yang mana undangan tersebut akan disampikan kepada pihak Kecamatan dan selanjutnya pihak Kecamatan akan menurunkan surat undangan perihal penyelenggaraan musrenbang Desa/Kelurahan pada pihak Desa/Kelurahan. Selanjutnya Kelurahanlah yang langsung mengundang perwakilan masyarakat setempat yang berkompeten untuk ikut berpartisipasi dalam forum musrenbang tersebut. Informasi pelaksanaan musrenbang dapat diakses masyarakat dengan cukup mudah, yaitu masyarakat yang berkompeten diundang langsung dengan media berupa surat undangan.

Setelah musrenbang Kelurahan dilaksanakan, maka selanjutnya paling lambat minggu ke-3 bulan Februari sudah dilaksanakan musrenbang Kecamatan dimana salah satu peserta musrenbang Kecamatan ini adalah delegasi hasil musrenbang Kelurahan. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan musrenbang SKPD pada minggu ke-1 bulan Maret yang juga dapat dihadiri oleh perwakilan masyarakat. Musrenbang SKPD ini merupakan forum pembahasan strategis yang mempertemukan pendekatan teknokratis dan *top-down* dengan pendekatan partisipatif dan *bottom-up*. Pada tahap musrenbang Kabupaten terkadang minim

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

partisipasi masyarakat. Peserta lebih banyak didominasi oleh aparat pemerintah daerah, seperti Bupati, SKPD, DPRD, perwakilan Bappeda Pemprov Kalteng, sehingga masyarakat enggan untuk hadir.

Secara dialektika *main goal* dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu partisipasi memberi pengaruh positif terhadap kinerja/ pencapaian hasil dan kepuasan. Artinya semakin menggunakan atau mempraktekkan partisipasi, maka semakin meningkat kinerja atau pencapaian hasil serta kepuasan. Partisipasi juga penting dalam rangka membangun *public trust*. Kalau masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi maka mereka merasa bahwa pemerintah tidak menipu mereka, pemerintah dekat dengan mereka, pemerintah dapat dipercaya. Sementara itu, kepentingan mereka mendapatkan perhatian dalam kesempatan itu karena mereka diberi keleluasaan untuk menyampaikan berbagai pendapat, keluhan, dsb. Partisipasi juga diperlukan untuk kepentingan masyarakat sendiri agar masyarakat dapat belajar sesuatu yang baru (*learning process*) dan juga bisa mendapatkan keterampilan (*gain skills*), dan juga untuk pemerintah partisipasi diperlukan untuk dapat meyakinkan masyarakat, membangun *trus*, mengurangi kegelisahan, membangun *strategic alliances*, memperoleh legitimasi *(gain legitimacy)*. (Wahab, Solichin Abdul, 2002).

Menurut aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, sebab dengan partisipasi masyarakat maka program pembangunan yang akan dilaksanakan lebih tepat sasaran dan efektif, atau dengan perkataan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat , bukan sekedar keinginan, partisipasi masyarakat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

sangat diperlukan karena masyarakat merupakan salah satu dari *stakeholder* yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan, responden juga berpendapat bahwa dengan melibatkan masyarakat maka akan diketahui apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Selain itu, dengan partisipasi masyarakat akan menimbulkan rasa *"sense of belonging"* (rasa memiliki) terhadap hasil-hasil pembangunan, yang berimplikasi masyarakat akan turut serta memelihara hasil-hasil pembangunan.

Dari segi tataran idealis, partisipasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya dapat dibagi dalam tiga wilayah pengambilan keputusan yaitu dalam praktek operasional, keputusan anggaran dan pembuatan kebijakan (Poerwadarminta, W.J.S. 1999:5). Tiga wilayah keputusan tersebut pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat mengingat tujuan strategis tertentu yang harus diambil pada tingkatan pembuatan kebijakan membutuhkan keputusan pada tingkatan anggaran dalam membiayai praktek operasional. Jadi kekuasaan warga pada praktek operasional membutuhkan kekuasaan dalam menentukan anggaran. Kekuasaan warga dalam seluruh wilayah pengambilan keputusan ini sangat menentukan bagi derajat partisipasi yang terjadi di suatu pemerintahan. Berdasarkan ketiga wilayah pengambilan keputusan ini maka partisipasi warga dapat dibagi kedalam beberapa level/tingkatan mulai dari sekedar memberikan infomasi, konsultasi, kemitraan, sampai pada level kendali warga.

Namun dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa partisipasi masyarakat hanya terjadi di level operasional, yaitu pada tahap perencanaan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pembangunan saja. sedangkan dalam tahap keputusan anggaran, partisipasi masyarakat secara langsung tidak ada, hanya diwakilkan oleh DPRD. Hal ini mengindikasikan hubungan antara pemerintah daerah dengan warga dalam penyelenggaraan pemerintahan masih didominasi oleh pemerintah dalam proses-proses perencanaan pembangunan dan penganggaran. Masyarakat hanya dilibatkan pada tahap paling awal dari proses perencanaan program dan selalu sulit untuk memantau status aspirasi mereka ketingkat berikutnya, termasuk ketika telah menjadi dokumen anggaran. Dokumen anggaran hanya mungkin diakses dengan acara-cara "pintu belakang". Setelah dilibatkan dalam proses penyusunan rencana program melalui forum musrenbang, pada tahap finalisasi rencana program (sebagai basis penyusunan anggaran) aspirasi masyarakat harus mengalah terhadap rencana kerja unit-unit pemerintah daerah atas nama Renstra, RPJMD, RPJPD, dan juga keterbatasan anggaran.

Disini terbentang hambatan struktural yang rumit bagi partisipasi warga yang murni *(genuine)*. Partisipasi yang dikembangkan baru sebatas partisipasi simbolik sehingga tidak layak disebut sebagai partisipasi. Pemerintah daerah masih memandang bahwa masyarakat bukan elemen penting dalam proses perencanaan dan penganggaran dan sudah terwakili di DPRD, sehingga tidak ada kewajiban dan keinginan yang kuat untuk melibatkan masyarakat dan memperhatikan secara sunguh-sunggh keinginan dan harapan masyarakat dalam anggaran.

Tidak dilibatkannya masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan disebabkan oleh adanya pemikiran aparatur Badan Perencanaan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara bahwa partisipasi yang murni hanya menyebabkan, membengkaknya biaya dan waktu untuk formulasi kebijakan, destabilisasi kekuatan politik, terlalu ideologis dan menjatuhkan beban pada orang miskin. Selain itu menurut responden dan *Key Informan*, melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan memiliki hambatan-hambatan, yaitu: sikap apatisme masyarakat, adanya sikap acuh tak acuh, tidak tertarik atau rendahnya pemahaman masyarakat mengenai masalah politik, dan adanya keyakinan bahwa usaha mereka untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tidak berhasil.

Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi, yaitu:

Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar, meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa atau lembaga non pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya, berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perUndang-Undangan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah dan berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga Eksekutif dan Legislatif.

Praktik *Good Governance* mensyaratkan adanya transparansi dalam proses

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses *stakeholder* terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan public, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dalam hal transparansi mengenai pelaksanaan musrenbang, dimana musrenbang merupakan forum partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Sukamara sudah sangat transparan. Bappeda Kabupaten Sukamara selalu menginformasikan jadwal pelaksanaan musrenbang kepada pihak Kelurahan dan kecamatan, Bappeda Kabupaten Sukamara juga menginformasikan agar dalam pelaksanaan musrenbang harus melibatkan perwakilan masyarakat yang berkompeten. Forum musrenbang ini pun dilakukan secara terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dari kuesioner yang disebarkan kepada responden yaitu pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara, mengatakan bahwa Bappeda selalu mensosialisasikan jadwal pelaksanaan musrenbang kepada masyarakat. Setelah Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Mendagri turun, dimana SEB Menteri PPNS dan Mendagri ini merupakan pedoman tata cara dan jadwal pelaksanaan musrenbang, dan merupakan landasan hukum pelaksanaan musrenbang, maka Bappeda kemudian membuat surat undangan jadwal pelaksanaan musrenbang kepada kecamatan, dan selanjutnya kecamatan akan menyampaikan undangan kepada Kelurahan tentang jadwal pelaksanaan musrenbang, lalu Kelurahan langsung akan mengudang masyarakat (kepling, PKK, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

dll) untuk menghadiri musrenbang tersebut.

Sosialisasi dilakukan dalam bentuk memberikan surat undangan oleh Bappeda kepada pihak kecamatan, dan selanjutnya pihak kecamatan akan memberikan undangan yang berisi jadwal pelaksanaan musrenbang kepada pihak Kelurahan/desa. Jadwal pelaksanaan musrenbang juga dapat diakses oleh masyarakat melalui media massa dan dengan membuka situs Sukamara dengan web site www.Sukamara.go.id.

Terhadap alokasi anggaran, secara dialektika masyarakat dan *stakeholder* juga memiliki hak untuk mengakses informasi mengenai jumlah anggaran yang dialokasikan untuk suatu kegiatan tertentu termasuk juga alasan yang melatarbelakanginya. Masyarakat dan *stakeholder* perlu mengetahui seberapa besar pemerintah memberikan perhatian terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dengan memiliki akses terhadap informasi mengenai alokasi anggaran maka mereka dapat menilai seberapa banyak uang yang dimiliki pemerintah digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak. Masyarakat dapat mengetahui apakah pemerintah membelanjakan uangnya untuk kepentingan rakyat atau hanya kepentingan para pejabatnya.

Dalam kebijakan pengalokasian anggaran, pemerintah sering tidak transparan, pemerintah sering tidak membangunan wacana terbuka mengenai cara pengalokasian anggaran. Dengan anggaran yang terbatas, kepentingan siapa yang seharusnya memperoleh prioritas? Seberapa besar anggaran yang dialokasikan? Mengapa suatu kegiatan atau kelompok *stakeholders* tertentu memperoleh prioritas anggaran? Mengapa kegiatan atau kelompok yang lain tidak

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

memperoleh prioritas dari alokasi anggaran yang sama? Munculnya pertanyanan-pertanyaan seperti itu menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam transparansi anggaran.

Dari hasil wawancara kepada aparatur Bappeda Kabupaten Sukamara diperoleh informasi yaitu, program pembangunan di dalam RKPD selalu dirumuskan secara bersama-sama dengan unsur masyarakat. Menurut responden, proses penyusunan RKPD dilalui dengan tahap musrenbang. Musrenbang tahunan daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rencana pembangunan dan mengalokasikan kegiatan tersebut menurut prioritasnya kepada pihak yang berwenang atau bertanggung jawab pada kegiatan tersebut maupun yang berkomitmen untuk melaksanakannya dibawah koordinasi Kepala Bappeda.

Bappeda Kabupaten Sukamara selalu menganalisis kebutuhan masyarakat terlebih dahulu untuk dijadikan masukan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Bahwa program pembangunan dalam RKPD sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebab program pembangunan dalam RKPD tersebut adalah hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam musrenbang, walaupun tidak seluruhnya aspirasi masyarakat diakomodir, sebab memperhatikan daftar prioritas kegiatan pembangunan dan keterbatasan sumber daya keuangan. Dalam musrenbang selalu diakomodir dalam RKPD, Menurut hasil wawancara bahwa aspirasi masyarakat yang diakomodir adalah yang sesuai dengan daftar prioritas kegiatan pembangunan. Dalam penyusunan rancangan akhir RKPD, program pembangunan yang diusulkan dalam musrenbang, khususnya yang menyangkut

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kepentingan publik/ masyarakat selalu diakomodir.

Dalam rancangan akhir RKPD tidak diperbolehkan/diperkenankan memasukkan program/kegiatan baru yang tidak melalui proses musrenbang, kecuali apabila setelah pelaksanaan musrenbang RKPD kemudian muncul kebutuhan program/kegiatan baru yang bersifat darurat, misalnya karena ada bencana alam, wabah, atau kerusuhan yang perlu segera ditangani. Untuk itu, maka perlu didiskusikan dan mendapat kesepakatan dengan delegasi musrenbang. Rancangan Akhir RKPD merupakan dokumen final RKPD yang telah mengalami serangkaian proses sinergitas dan harmonisasi berbagai pendekatan perencanaan (teknokratis, politis, demokratis/patisipatif, *bottom-up* dan *top-down)*.

Program pembangunan dalam RKPD diimplementasikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 tahun hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana pemerintah dalam APBD, tetapi jika ada program pembangunan yang belum terealisasi pada tahun rencana, maka akan diusulkan kembali untuk perencanaan pembangunan daerah yang akan datang, atau dalam perubahan APBD (PAPBD).

IMPLIKASI GOOD GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Paradigma *Good Governance* membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Untuk itu perlunya perencanaan partisipatif untuk membuat perencanaan betul-betul relevan dan *legitimate* di mata rakyat, serta mengurangi resiko benturan antara pemerintah dan rakyat. Sehingga perencanaan tidak perlu dijadikan Sukamara tempur, melainkan harus di perlakukan sebagai arena mempertemukan antara visi-misi besar pemerintah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

dengan aspirasi dan prakarsa masyarakat. Perencanaan bukan lagi sebagai sebuah keputusan politik dari pihak yang memerintah untuk diterapkan kepada yang diperintah, melainkan sebagai arena bersama untuk membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang bermakna tentu harus menggabungkan antara kebijakan pemerintah dan parakarsa masyarakat itu.

Menurut Toha, Miftah, (1991:77) partisipasi merupakan jembatan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat, sehingga perencanaan daerah harus dilakukan dengan model dari bawah (*bottom-up planning*) atau sering disebut dengan perencanaan pembangunan partisipatif. Bagaimanapun, perencanaan partisipatif yang melibatkan rakyat itu akan mempunyai tiga dampak penting: (1) terhindar dari peluang terjadinya manipulasi; (2) memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, dan (3) meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik rakyat. Dengan demikian partisipasi masyarakat di harapkan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif, dimana suatu perencanaan yang efektif dalam dimensi ini adalah, perencanaan yang mampu secara tepat menetapkan pilihan, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Maka, perencanaan pembangunan harus mengacu pada beberapa kebijakan terkait meliputi: kebutuhan rakyat melalui analisis kebutuhan, kapasitas pemerintahan daerah, kondisi sosial / konteks sosial dan eksternalitas (dampak) kebijakan.

Berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh tentang penelitian "Efektivitas Perencanaan Pembangunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015) dan dihubungkan dengan indikator-indikator efektivitas perencanaan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pembangunan, maka Penulis menginterpretasikan, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara dinilai sudah Efektif. Dengan rasionalisasi, bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Sukamara dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukamara yang termuat dalam RKPD tahun 2015 sudah diarahkan untuk kepentingan masyarakat, yang memuat kebutuhan dasar warga dibidang kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, infra struktur dan penanggulangan kemiskinan, dimana kebutuhan rakyat ini diperoleh dari hasil analisis kebutuhan dan dalam dokumen RKPD tidak diperbolehkan/diperkenankan memasukkan program/kegiatan baru yang tidak melalui proses musrenbang. Dokumen RKPD Tahun 2015 yang dinilai sudah sesuai dengan preferensi masyarakat adalah konsekuensi logis dari adanya partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebutuhan mereka yang forumnya adalah musrenbang dan transparansi Bappeda Kabupaten Sukamara dalam mensosialisasikan jadwal pelaksanaan musrenbang.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik kesimpulan tentang Bagaimana Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* (Partisipasi Dan Transparansi) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara dan Bagaimana Implikasi *Good Governance* Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara sudah menjalankan prinsip-prinsip *Good Governance* (partisipasi dan tranparansi) dengan cukup baik. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan yaitu: (1) politik, (2) teknokratik, (3) partisipatif, (4) atas-bawah (top-down), (5) bawah-atas (bottom-up). Ahli-ahli teori perencanaan publik mengemukakan beberapa proses perencanaan (1) perencanaan teknokrat; (2) perencanaan partisipatif; (3) perencanaan top-down; (4) perencanaan bottom up. Walaupun Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut belum begitu maksimal dilakukan sesuai dengan tataran teoritis, sebab ada hambatan-hambatan dalam menjalankannya. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pemerintahan misalnya, belum sepenuhnya masyarakat dilibatkan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam praktek operasional, keputusan anggaran dan pembuatan kebijakan. Partisipasi masyarakat hanya terdapat pada tahapan operasional, yaitu perencanaan pembangunan yang forumnya musrenbang. Sedang dalam keputusan anggaran, masyarakat tidak dilibatkan, hanya pihak DPRD dan SKPD saja. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah masih memandang bahwa masyarakat bukan elemen penting dalam proses penganggaran dan sudah terwakili di DPRD. Perencanaan akan berhadapan dengan problem mendasar yakni bagaimana teknis pengetahuan perencanaan yang efektif dalam menginformasikan aksi-aksi publik. Atas dasar tersebut maka perencanaan didefinisikan sebagai komponen yang menghubungkan antara pengetahuan dengan aksi/tindakan dalam wilayah publik. Pada prinsipnya. Friedmann menyatakan perencanaan harus bertujuan untuk kepentingan masyarakat banyak. Perencanaan juga merupakan pekerjaan yang menyangkut wilayah publik maka komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat sangat dibutuhkan sehingga hasil perencanaan dapat dibuktikan dan dirasakan manfaatnya Beberapa manfaat perencanaan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Sebagai informasi keputusan yang tepat untuk dilakukan Perencanaan memberikan acuan dalam mempertimbangkan secara seksama tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Di dalam kenyataan, terdapat banyak alternatif

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

mengenai apa yang dapat dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Oleh sebab itu, dengan adanya acuan yang sudah "terpilih" akan memudahkan semua pihak untuk mengambil keputusan yang sebaik-baiknya.

2. Sebagai panduan kegiatan dan monitoring. Tersedianya acuan tertulis yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program. Dengan adanya acuan tertulis, diharapkan dapat mencegah terjadinya salah pengertian (dibanding dengan pernyataan tertulis) dan dapat dikaji ulang (dievaluasi) setiap saat, sejak sebelum, selama, dan sesudah program dilaksanakan. Sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap usul/saran penyempurnaan yang "baru". Sepanjang perjalanan pelaksanaan program seringkali muncul sesuatu yang mendorong perlunya revisi penyempurnaan perencanaan program. Karena itu, dengan adanya pernyataan tertulis, dapat dikaji seberapa jauh usulan revisi tersebut dapat diterima/ditolak agar tujuan yang diinginkan tetap dapat tercapai, baik dalam arti jumlah, mutu dan waktu yang telah ditetapkan.

3. Sebagai rantai koordinasi, Perencanaan mencegah kesalahpahaman tentang tujuan akhir dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan maupun yang tidak dirasakan. Perencanaan membantu pengembangan kepemimpinan, yaitu dalam menggerakkan semua pihak yang terlibat dan menggunakan sumberdaya yang tersedia dan dapat digunakan untuk tercapainya tujuan yang dikehendaki.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

4. Sebagai dasar monitoring dan evaluasi Perencanaan memantapkan tujuan-tujuan yang ingin dan harus dicapai, yang perkembangannya dapat diukur dan dievaluasi. Untuk mengetahui seberapa jauh tujuan telah dapat dicapai, maka diperlukan pedoman yang jelas, dapat diukur, dapat dievaluasi setiap saat, oleh siapa pun, dan sesuai patokan yang telah ditetapkan.
5. Sebagai rantai koordinasi Perencanaan juga membantu pengembangan kepemimpinan, yaitu dalam menggerakkan semua pihak yang terlibat dan menggunakan sumber daya yang tersedia dan dapat digunakan untuk tercapainya tujuan yang dikehendaki.
6. Sebagai inventarisasi kebutuhan Perencanaan mencegah kesalahpahaman tentang tujuan akhir, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan maupun yang tidak dirasakan.
7. Sebagai alat untuk mencocokan perencanaan, pelaksanaan, hasil atau perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan Perencanaan menghindarkan pemborosan sumberdaya (tenaga, biaya, dan waktu) dan merangsang efisiensi pada umumya. Perencanaan juga menjamin kelayakan yang dilakukan di dalam masyarakat dan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat setempat.

Manfaat perencanaan juga sebagai berikut:

a. menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin dicapai;
b. memberikan pegangan dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

c. organisasi memperoleh standar sumber dana terbaik dan mendayagunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;

2. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan yang forumnya adalah musrenbang, maka dapat disaring aspirasi masyarakat, dan dijadikan sebagi bahan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dalam dokumen RKPD tidak diperbolehkan/diperkenankan memasukkan program/kegiatan baru yang tidak melalui proses musrenbang, artinya perencanaan pembangunan dinilai sudah cukup efektif sebab merupakan kebutuhan masyarakat dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang), walaupun tidak seluruhnya aspirasi masyarakat terakomodir, sebab dihadapkan pada keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini, khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara sebagai objek penelitian adalah:

1. Perlunya dibuat Peraturan Daerah tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebab dengan Peraturan Daerah tersebut merupakan sarana hukum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, dengan adanya Peraturan Daerah tersebut

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

maka pemerintah berkewajiban untuk memobilisasi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Derah Kabupaten Sukamara harus lebih transparan, dengan membuka akses yang mudah bagi masyarakat terhadap informasi dokumen-dokumen publik, dengan demikian masyarakat akan dapat melakukan kontrol sosial, sehingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan *(abuse of power)* oleh pemerintah daerah dapat diminimalisir.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Amti dan Prayitno. (2001). *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arifin, Z. (2012). *Evaluasi pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Arikunto, S. (1996). *Prosedur penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana.

Chapin, S. F. & Kaiser, E. (1995). *Urban land use planning. (4th Ed.)*. Illinois: University of Illions Press.

Deliarnov. (1995). *Pengantar ekonomi makro*. Jakarta: Raja Grafindo Utama.

Deliarnov. (1995). Perkembangan pemikiran ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Utama.

Depdikbud. (2002). *Kamus besar Bahasa Indonesia. (3rd Ed.)*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dunn N. W. (1999). *Analisis kebijakan public*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press

Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan public*. Yogyakarta: UGM Press.

Fayol, H. (2010). *Manajemen public relations*. Jakarta: PT. Elex Media.

Ghuffan, A. & Sudarsono. (1991). *Hukum kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Grindle, M. S. (1980). *Politics and apolicy implementation in the third word*. New Jersey: Princetown University Press.

Handayadiningrat. (1998). *Peranan aparatur pemerintah*. Jakarta: Sinar Harapan.

Haspiarti. (2011). *Implementasi penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. (Tesis yang tidak dipublikasikan). Universitas Hasanudin, Makasar.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Hidayat, H. (2002). Politik lingkungan: Pengelolaan hutan masa Orde Baru dan Reformasi. Jakata: Yayasan Obor Indonesia.

Husain, S. (2012). *Akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan public.* (Tesis yang tidak dipublikasikan). Unsri, Palembang.

Kencana, I. (2004). *Pemerintah Indonesia.* Jakarta: Mandar Maju.

Koentjaraningrat. (1997). *Metode-metode penelitian masyarakat.* (3rd Ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kumorotomo, W. (1994). *Manajemen pelayanan public.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lamsuri, M., dkk. (2011). Metode riset evaluasi. Yogyakarta: Lakbang Grafika.

Manurung, H. (2005). *Metode penelitian.* Jakarta: Diktat.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sector public.* Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mazmanian, D. H., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy.* New York: HarperCollins.

Miles, M. & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru.* Jakarta: UI Press.

Moenir, H. A. S. (2002). *Manajemen pelayanan umum di Indonesia.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Moleong, L. J. (1991). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.

Moleong, L. J. (2006). *Metode penelitian kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Swakarya.

Mukhilda, N. (2015). *Akuntabilitas pelayanan publik (Studi kasus: penyelenggaraan pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Makassar).* (Tesis yang tidak dipublikasikan). Universitas Hasanudin, Makasar.

Nawati, I. (2013). *Akuntabilitas aparatur dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tulang Bawang.* (Tesis yang tidak dipublikasikan). Universitas Sumatra Utara, Medan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

Nawawi, H. (1995). *Pengawasan melekat di lingkungan aparatur pemerintah.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Nugroho, D. R. (2005). *Kebijakan public: Formulasi, implementasi dan evaluasi.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Poerwadarminta, W.J.S. (1999). *Kamus Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Pramudji. (1994). *Profesionalisme aparatur Negara.* Jakarta: Rineka Cipta.

Rasyid, R. (2002). "Otonomi daerah: Latar belakang dan masa depannya", Dalam S. Haris (Ed). *Desentralisasi, demokrasi & akuntabilitas.* Jakarta: AIPI dan Pathnership.

Sinambela, L.P. (2006). *Teori kebijakan dan implementasi, reformasi pelayanan public.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Singarimbun, M. (1995). *Metode penelitian survey.* Jakarta: LP3ES.

Situmorang, M. V. (1994). *Hukum administrasi pemerintahan di daerah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Smith, B. C. (1985). Decentralization: The territorial dimension of the state Asia. London: George Allen & Unwin Ltd.

Soejono, S. (2004). *Sosiologi suatu pengantar.* Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono. (2005). *Memahami penelitian kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Surahmat, J. (2014). *Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) SKPD di Kota Malang.* (Tesis yang tidak dipublikasikan). Universitas Brawijaya, Malang.

Syafrudin, A. (1993). *Perencanaan administrasi pembangunan daerah.* Bandung: CV. Mandar Maju.

Thoha, M. (1991). *Perspektif prilaku birokrasi.* Jakarta: Rajawali.

Thoha, M. (1993). *Perilaku organisasi: Konsep dan aplikasinya.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tjokroaminoto. B & Adijoyo, M. (1988). *Teori dan strategi pembangunan nasional.* Jakarta: CV. Haji Mas Agung.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Utomo, W. (2003). *Dinamika administrasi public*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, S. A. (2004). *Analisis kebijaksanaan:Dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wasistiono, S. (2002). *Manajemen sumber daya aparatur pemerintah daerah*. Jatinangor: Pusat Kajian Pemerintahan STPDN.

Wibawa, S. (1994). *Evaluasi kebijakan publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wibisono, D. (2001). *Riset bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Yudoyono, S. B. (2003). *Otonomi daerah: Desentralisasi dan pembangunan aparatur pemda dan anggota DPRD*. Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya.

B. Jurnal/Tesis/Internet/Halaman Web

Desentralisasi. Diunduh dari https://deddysumardi.wordpres.com, 15 Oktober 2016.

Pengertian, tujuan, fungsi, prinsip dan prosedur evaluasi. Diunduh dari https://cahyadisep.blogspot.co.id/2003/13/pengertian-tujuan-fungsi-prisip..html

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Diunduh dari https://naylanewblogadres.blogspot.co.id/2016/10/sistem penyelenggaraan pemerintahan.html

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan dilandasi dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik atau lazim disebut dengan *Good Governance*. Apakah Bappeda sudah menjalankan prinsip-prinsip *Good Governance* (Partisipasi, Transparansi)?
   Jika sudah,
   Transparansi dalam hal apa? Partisipasi yang bagaimana?
2. Apakah dalam menjalankan prinsip-prinsip *Good Governance* (Partisipasi, Transparansi) tersebut Bappeda pernah mengalami kesulitan/ hambatan?
   Jika pernah, hambatan/ kesulitan yang seperti apa?
3. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menghendaki adanya partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan yang salah satu forumnya adalah Musrenbang. Apakah dalam Musrenbang, Bappeda sudah mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi?
   Apakah partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut diperlukan?
4. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam Musrenbang tersebut? Apakah memang seperti itu bentuk idealnya?
   Mengapa?
5. Apakah aspirasi masyarakat dalam Musrenbang selalu diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD)?
6. Secara teoritis, ranah partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya mencakup partisipasi dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam tahap penganggaran, implementasi dan evaluasi. Apakah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masyarakat dilibatkan seperti halnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)?
7. Dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang partisipasi masyarakat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dalam pembangunan, maka pemerintah berkewajiban untuk memobilisasi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan, dan Perda merupakan saranan hukum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Apakah tata cara / prosedur partisipasi masyarakat adalam perencanaan pembangunan sudah terlembagakan dalam suatu Peraturan Daerah?

8. Apakah Bappeda melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi RKPD?
9. Jika dalam pelaksanaan RKPD terjadi suatu penyimpangan, misalnya ada program pembangunan yang tidak terealisasi sebagaimana mestinya, apakah Bappeda melakukan suatu tindakan korektif?
10. Bagaimana mekanisme yang dilakuan Bappeda untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan Rencana Awal RKPD?
11. Apakah program-program pembangunan dalam RKPD sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
12. Bagaimana praktek sistem perencanaan pembangunan daerah pada Kabupaten Sukamara?
13. Apakah sudah menerapkan sistem perencanaan pembangunan partisipatif secara murni sesuai dengan teori. dimana masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan?

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Lampiran 2

DOKUMENTASI

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

TANYA:

1. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan dilandasi dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik atau lazim disebut dengan *Good Governance*. Apakah Bappeda sudah menjalankan prinsip-prinsip *Good Governance* (Partisipasi, Transparansi)?

   Jika sudah,

   Transparansi dalam hal apa? Partisipasi yang bagaimana?

JAWAB:

Bappeda sudah menjalankan prinsip-prinsip *Good Governance* (Partisipasi, Transparansi) tetapi dalam tingkatan yang "cukup baik".

1 Transparansi yang dilakukan Bappeda dalam hal mensosialisasikan jadwal pelaksanan Musrenbang (Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten). Sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan Musrenbang ke Desa/Kelurahan, lalu selanjutnya Desa/Kelurahan akan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musrenbang tersebut, biasanya sosialisasi yang dilakukan Desa/Kelurahan dengan membuat pengumuman di papan pengumuman kantor.

Bappeda akan menyampaikan Surat undangan atas nama Bupati kepada Desa/Kelurahan atau Kecamatan dengan terlebih dahulu menerima Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan dengan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara dan Jadwal Pelaksanaan Musrenbang.

Selain itu, transparansi juga diterapkan dalam dokumen-dokumen publik seperti dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dapat diakses oleh masyarakat. Dokumen RKPD disosialisasikan dalam Musrenbang Kabupaten, sedang dokumen APBD dapat diketahui oleh masyarakat pada

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

saat Sidang Paripurna DPRD dengan agenda pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

2 Dalam hal partisipasi. Bappeda selalu melaksanakan Musrenbang secara bertahap. dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan. Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Dimana dalam proses Musrenbang tersebut telah melibatkan masyarakat. Namun ada kendala yang dihadapi dalam setiap pelaksanaan Musrenbang. yaitu jadwal pelaksanaan Musrenbang yang sering tidak tepat waktu dikarenakan terlambatnya Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan dengan Mendagri diturunkan ke Kabupaten / Kabupaten. Bappeda sudah merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi agar Surat Edaran tersebut dapat diturunkan dibulan November/ Desember, namun sampai saat ini belum mendapat tanggapan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

TANYA:

1. Apakah dalam menjalankan prinsip-prinsip *Good Governance* (Partisipasi. Transparansi) tersebut Bappeda pernah mengalami kesulitan/ hambatan? Jika pernah. hambatan/ kesulitan yang seperti apa?

JAWAB:

Bappeda pernah mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjalankan prinsip-prinsip *Good Governnace* (Partisipasi dan Transparansi). Dalam hal transparansi misalnya. belum maksimal dijalankan, hal ini terlihat dari dokumen-dokumen publik seperti APBD dan RKPD yang tidak dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas. Dokumen tersebut hanya dapat diakses dalam forum seperti Musrenbang dan Sidang Paripurna DPRD. Sebab adanya kekhawatiran dari Pemerintah Daerah bila dokumen tersebut dipublikasikan secara bebas kemasyarakat luas. maka akan menimbulkan reaksi yang negatif dari masyarakat bila mereka merasa aspirasi yang mereka usung dalam Musrenbang tidak sepenuhnya terakomodir dalam RKPD. Pemerintah Daerah khawatir akan timbul konflik dan berimplikasi pada terganggunya stabilitas politik Kabupaten Sukamara. Persepi masyarakat awam, tentunya mereka menghendaki agar usulan pembangunan mereka dapat diakomodir sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

sebagai program pembangunan tahunan yang nantinya akan direalisasikan. Karena masyarakat tidak masuk dalam suatu sistem pemerintahan, sehingga mereka tidak mengerti bahwa ada mekanisme yang mengatur proses pengakomodiran aspirasi masyarakat untuk dijadikan sebagai program pembangunan tahunan atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Bappeda memang berperan sebagai fasilitator dalam perencanaan pembangunan. Bappeda bertugas mensosialisasikan jadwal pelaksanaan Musrenbang yang dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, sosialisasi tersebut dalam bentuk Surat undangan yang ditanda tangani oleh Bupati lalu diberikan kepada pihak Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Ketika Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan, aspirasi masyarakat akan ditampung sepenuhnya, lalu Desa/Kelurahan akan mendokumentasikan aspirasi masyarakat tersebut dalam bentuk proposal yang nantinya akan dibahas kembali dalam Musrenbang Kecamatan. Tidak sepenuhnya aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Desa/Kelurahan diakomodir dalam RKPD tetapi harus ditentukan / diidentifikasikan apa yang menjadi skala prioritas Kecamatan dan seterusnya dalam Musrenbang Kabupaten, prioritas Kecamatan disesuaikan dengan program prioritas Kabupaten dan seterusnya sampai ketahapan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Sehingga aspirasi masyarakat pada tingkat Desa/Kelurahan tidak dapat sepenuhnya terakomodir.

Dengan sistem perencanaan pembangunan seperti itulah salah satu penyebab minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah daerah sudah berusaha untuk menyertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang forumnya Musrenbang, tetapi pada prakteknya sering terjadi Musrenbang Desa/Kelurahan yang minim partisipasi masyarakat.

Ada hal yang menyebabkan masyarakat enggan terlibat dalam pembangunan. Hal tersebut antara lain, yaitu sikap apatis masyarakat, dikarenakan rendahnya pendidikan politik masyarakat, sehingga mereka tidak mengerti peranan dan manfaat serta fungsi diadakannya Musrenbang, masih rendahnya akses terhadap informasi publik, kemandirian organisasi warga, rendahnya keterlibatan kelompok perempuan dan rendahnya kapasitas mengelola forum-

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

forum musyawarah.

TANYA:

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menghendaki adanya partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan yang salah satu forumnya adalah Musrenbang. Apakah dalam Musrenbang, Bappeda sudah mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi?

   Apakah partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut diperlukan?

JAWAB:

Bappeda sudah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, contohnya, melalui Desa/Kelurahan. Bappeda sudah mensosialisasikan jadwal pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan selanjutnya Desa/Kelurahan yang akan mengumumkan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses Musrenbang. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, karena dengan melibatkan masyarakat akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat disusun program-program pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat, bukan sekedar keinginan. Selain itu, dengan partisipasi masyarakat akan menimbulkan rasa *"sense of belonging"* (rasa memiliki) terhadap hasil-hasil pembangunan, yang berimplikasi masyarakat akan turut serta memelihara hasil-hasil pembangunan.

Contoh: saat ini pembangunan jalan-jalan di Kabupaten Sukamara hampir merata, hampir tidak terdapat lagi jalan-jalan yang rusak. Masyarakat ikut menjaga hasil pembangunan dengan mendirikan portal-portal. Jadi jika ada kendaraan yang beratnya / kapasitasnya melebihi peringatan beban maksimal yang tertulis diportal, maka kendaraan tersebut tidak diperbolehkan melintas. Sehingga jalan tidak mudah rusak.

Ada contoh kasus di Kabupaten lain, dimana Pemerintah daerahnya membangun parit-parit, tetapi perencanaan dahulu tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Implikasinya, ketika parit-parit tersebut tersumbat dan dipenuhi oleh sampah, masyarakat tidak berinisiatif untuk membersihkannya, mereka malahan mengharapkan dan menunggu pemerintah untuk membersihkan parit-parit

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

tersebut.

TANYA:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam Musrenbang tersebut? Apakah memang seperti itu bentuk idealnya?
   Mengapa?

JAWAB:

Masyarakat diundang dalam Musrenbang, dan masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Sistem komunikasi yang digunakan dengan cara berdialog antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Dimana Pemerintah Daerah menampung aspirasi masyarakat berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat tersebut. Tetapi dalam hal ini partisipasi masyarakat hanya sebatas penyampaian aspirasi/ masalah-masalah pada daerah mereka, tidak dalam hal menentukan solusi pemecahan, karena bagian itu merupakan wewenang Pemerintah Daerah. Walaupun secara idealnya, dalam perencanaan pembangunan partisipatif saat ini, masyarakat wajib dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan, tetapi penerjemahan perencanaan pembangunan partisipatif versi pemerintah berbeda. Menurut sudut pandang pemerintah, partisipasi masyarakat cukup hanya dalam penyampaian aspirasi dalam Musrenbang dan ketika proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), masyarakat tidak dilibatkan, karena merupakan wewenang pemerintah saja (Eksekutif dan Legislatif). Karena dikhawatirkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan hanya akan menimbulkan dampak *high cost*, dan mengganggu konsentrasi kerja pemerintah dan waktu yang berbelit-belit/ lama *(red tape.)*

TANYA:

1. Apakah aspirasi masyarakat dalam Musrenbang selalu diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD)?

JAWAB:

Aspirasi masyarakat selalu diakomodir dalam Musrenbang, tetapi dalam tahap pengakomodiran aspirasi masyarakat untuk dimasukkan dalam RKPD perlu disaring kembali, dengan cara berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

(SKPD) lalu dirumuskan prioritas pembangunan. Dengan adanya skala prioritas tersebut dan mengingat terbatasnya sumber daya dana dan waktu, maka tidak sepenuhnya / seluruhnya kehendak masyarakat dapat diakomodir dalam RKPD.

Dalam APBD memang alokasi anggaran publik *(aparratus spending)*lebih besar dari pada anggaran pembangunan *(public spending)*, yaitu 70% berbanding 30%. Tetapi hal tersebut hanya dilihat dari segi kuantitatif. Yang perlu diketahui bahwa 70% *aparatus spending* itu pun ditujukan untuk penunjang kemudahan pelayanan publik.

TANYA:

1. Secara teoritis, ranah partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya mencakup partisipasi dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam tahap penganggaran, implementasi dan evaluasi. Apakah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masyarakat dilibatkan seperti halnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)?

JAWAB:

Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), partisipasi masyarakat diwakili oleh anggota DPRD, adapun mekanisme penyusunan RKA yaitu.

SKPD mengusulkan anggaran untuk program kerja mereka, lalu oleh tim penyusun anggaran (Bappeda, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/DPKAD) dibahas bersama-sama, dan tim memutuskan atau menentukan skala prioritas pembiayaan kegiatan yang ditentukan, lalu setelah disepakati kemudian diusulkan ke DPRD lalu diparipurnakan, dalam tahap ini , masyarakat (Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Pers) diperbolehkan untuk menghadiri. Dan setelah disetujui oleh DPRD, lalu akan dievaluasi oleh Gubernur, jika 10 hari sudah berlalu tanpa tanggapan, maka RKA dianggap sah dan merupakan pedoman penyusunan APBD

Secara lebih renci pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran daerah dan penyusunan RKA SKPD yaitu:

Pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran tahunan daerah dilakukan melalui 3 (tiga) hal, yaitu: KUA, PPAS, dan RKA SKPD. KUA, PPAS,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dan RKA SKPD memiliki fungsi penting dan sangat fundamental karena menjembatani proses penerjemahan rencana ke dalam penganggaran. KUA, PPAS, dan RKA SKPD disusun untuk memastikan bahwa kesepakatan *stakeholder* atas tujuan, sasaran, dan target perencanaan dapat direalisasikan. Oleh karena itu sangat perlu diperhatikan konsistensi dokumen perencanaan seperti RKPD, Renja SKPD dengan KUA, PPAS, dan RKA SKPD.

Penyusunan KUA dan PPAS

Penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan tanggung jawab Kepala Daerah. Penyusunan rancangan KUA mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan berpedoman pada Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Sedangkan penyusunan rancangan PPAS disusun setelah terdapat kesepakatan KUA antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang menjadi dasar penyusunan PPAS.

Sedangkan esensi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan KUA yang telah disepakati
2. Disusun oleh TAPD dan dinas bersama Panitia Anggaran DPRD

Prinsip-prinsip Penyusunan KUA dan PPAS

Penyusunan KUA mengacu pada Perkada RKPD dan penyusunan PPAS mengacu pada KUA yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Prinsip-prinsip penyusunan KUA dan PPAS adalah sebagai berikut:

1. Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pada pertengahan bulan Juni.
2. Rancangan KUA berisikan antara lain:
    a. Pencapaian kinerja dan uraian ringkas identifikasi permasalahan/hambatan dan tantangan utama pada tahun sebelumnya, perkiraan tahun berjalan dan perkiraan tahun yang direncanakan.
    b. Gambaran umum prioritas pembangunan yang diamanatkan dalam RKPD
    c. Kerangka ekonomi makro dan implikasinya terhadap sumber

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pendanaan. yang memuat asumsi dan kondisi yang menjadi dasar pencapaian sasaran tahun rencana. yang menyangkut: (1) laju inflasi. (2) pertumbuhan ekonomi regional. (3) tingkat pengangguran regional. (4) asumsi lainnya yang digunakan.

d. Perkiraan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun yang direncanakan.

e. Format KUA diatur dalam Permendagri 13/2006

3. Rancangan KUA dibahas bersama Pemda dengan DPRD
4. KUA yang telah disepakati menjadi acuan bagi Kepala Daerah untuk menyusun rancangan PPAS dan selanjutnya rancangan PPAS tersebut disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama.
5. Pembahasan PPAS paling lambat dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juli.
6. PPAS memuat Prioritas dan Plafon Anggaran menurut urusan wajib/pilihan dan organisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Pembahasan PPAS melalui langkah-langkah berikut :
   a. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan.
   b. Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan
   c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Penyusunan RKA SKPD

RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pendekatan dalam penyusunan RKA SKPD adalah sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan KUA APBD dan PPAS yang telah disepakati
2. Disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan anggaran kinerja
3. Menggunakan prakiraan maju-perkiraan belanja untuk tahun berikutnya
4. Menggunakan pendekatan kinerja (masukan dan keluaran
5. Penilaian kewajaran dengan Standar Analisis Belanja (SAB)
6. Pendekatan ASB : Analisis Standar Biaya untuk menilai kewajaran Beban

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Kerja dan Biaya

7. Sesuai dengan TUPOKSI SKPD
8. Menggunakan Standar Biaya
9. Menggunakan Tolok Ukur Kinerja
10. Terdiri atas belanja langsung (kegiatan) dan belanja tidak langsung (periodik atau non kegiatan)

Prinsip-prinsip Penyusunan RKA SKPD

RKA SKPD disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kepala SKPD dibantu tim penyusun Renja SKPD menyusun RKA- SKPD mengacu pada pedoman penyusunan RKA-SKPD yang ditetapkan Kepala Daerah termasuk lampirannya yang mencakup KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, serta mempertimbangkan standar pelayanan minimal (SPM)
2. RKA SKPD yang disusun menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kinerja.
3. RKA-SKPD berisikan :
   a. Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan SKPD
   b. Rincian anggaran pendapatan SKPD
   c. Rincian anggaran biaya tidak langsung SKPD.
   d. Rekapitulasi rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD untuk tahun rencana dan tahun berikutnya (n+1).
   e. Rincian penerimaan pembiayaan daerah
   f. Rincian pengeluaran pembiayaan daerah

TANYA:

1. Dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka pemerintah berkewajiban untuk memobilisasi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan. dan Perda merupakan saranan hukum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Apakah tata cara / prosedur partisipasi masyarakat adalam perencanaan pembangunan sudah terlembagakan dalam

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

suatu Peraturan Daerah?

JAWAB:

Prosedur partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum terlembagakan dalam suatu Perda. sebab jika pemerintah daerah ingin mengeluarkan Perda. maka ada prosedur nya yaitu, menunggu Instruksi dari Mendagri. Instruksi ini merupakan landasan hukum pembuatan Perda.

TANYA:

1. Apakah Bappeda melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi RKPD?

JAWAB:

Bappeda selalu melakukan monitoring dan evaluasi. sebab hal tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Bappeda bidang monitoringdan pelaporan. Setiap triwulan Bappeda akan memonitor pelaksanaan pembangunan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Apakah SKPD tersebut sudah menjalankan program kerjanya sesuai dengan rencana atau belum. Jika belum, maka Bappeda akan meminta penjelasan pada instansi yang belum secara maskimal menjalankan program kerjanya, lalu hasil dari monitoring tersebut akan didokumentasikan dalam laporan yang nantinya akan disampaikan ke Inspektorat Daerah (Inspektorat) dan Bupati.

TANYA:

1. Jika dalam pelaksanaan RKPD terjadi suatu penyimpangan, misalnya ada program pembangunan yang tidak terealisasi sebagaimana mestinya, apakah Bappeda melakukan suatu tindakan korektif?

JAWAB:

Ya. sesuai dengan Tupoksi Bappeda, maka Bappeda selalu memonitor dan mengevaluasi implementasi program-program pembangunan masing-masing instansi (SKPD), dengan cara berkoordinasi dengan instansi terkait. Jika ada terdapat program pembangunan yang belum terealisasi , maka Bappeda akan kembali mengusulkan program pembangunan yang belum terealisasi tersebut pada Musrenbang yang akan datang. Sebab memang tidak sepenuhnya pogram-program pembangunan dalam RKPD terealisasi sesuai dengan waktu dan rencana

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

yang telah ditetapkan mengingat keterbatasan sumber dana keuangan dan skala prioritas pembangunan.

TANYA:

1. Bagaimana mekanisme yang dilakuan Bappeda untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan Rencana Awal RKPD?

JAWAB:

Dengan melakukan sistem jaring asmara (aspirasi masyarakat) dalam bentuk melakukan *public hearing*. Atau langsung terjun kelapangan dengan melihat dan memantau langsung kondisi sosial masyarakat. Dalam hal menginventarisir permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya (pendidikan dan kesehatan), Bappeda berkoordinasi dengan SKPD terkait , lalu melalui SKPD tersebut dikumpulkan data-data / informasi yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Problem-problem yang disampaikan SKPD menjadi *input* bagi Bappeda untuk penyusunan rencana awal . Jadi dalam hal ini, Bappeda berperan sebagai unit perencana, sedang masalah teknis dijalankan oleh masing- masing SKPD.

TANYA:

1. Apakah program-program pembangunan dalam RKPD sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

JAWAB:

Program-program pembangunan dalam RKPD sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebab program-program pembangunan dalam RKPD tersebut adalah hasil akhir dari penjaringan aspirasi masyarakat dalam Musrenbang. Sehingga merupakan kebutuhan masyarakat, walaupun belum sepenuhnya menampung aspirasi masyarakat sebab penentuan program pembangunan untuk dimasukkan dalam RPKD adalah hasil seleksi berdasarkan skala prioritas dan mengingat keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah.

Kualitas dan efektifitas RKPD ditentukan oleh adanya hal-hal sebagai berikut:

a. Review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pembangunan daerah dalam

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD

b. Kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pembangunan daerah masa kini dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib, atau urusan pilihan

c. Kajian perspektif masa depan daerah: mengantisipasi perubahan- perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pembangunan daerah dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja daerah dalam pembangunan dapat ditingkatkan, lebih efisien, dan efektif.

d. Rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja pembangunan daerah

e. Konsistensi dan hubungan yang jelas antara RKPD dengan visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD, RKPD, dan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh MENDAGRI.

f. Penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.

g. Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan mengakomodasikan Standar Pelayanan Minimal

h. Kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dan kendala fiskal daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan RKPD

i. Dilakukannya proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RKPD dan kesesuaian antara RKPD dengan hasil-hasil kesepakatan Musrenbang dan Forum Multi *Stakeholder* SKPD

TANYA:

1. Bagaimana praktek sistem perencanaan pembangunan daerah pada

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Kabupaten Sukamara?

2. Apakah sudah menerapkan sistem perencanaan pembangunan partisipatif secara murni sesuai dengan teori, dimana masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan?

JAWAB:

Sistem perencanaan pembangunan pada Kabupaten Sukamara sudah menerapkan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, namun Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam hal ini diterjemahkan secara berbeda oleh Pemerintah Daerah (Bappeda), dimana Perencanaan Pembangunan Partisipatif menurut persepsi Bappeda tidak sekompleks dan seideal teori Perencanaan Pembangunan Partisipatif itu sendiri. Secara teoritis, dalam system politik demokratis, masyarakat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi, dengan posisi mulia masyarakat tersebut, maka menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka lebih jauh,masyarakat sejatinya dilibatkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan. Dal hal pembangunan misalnya, ranah partisipasi masyarakat yaitu, pada tahap perencanaan, penganggaran, implementasi dan evaluasi. Namun, pada prakteknya teori tersebut jika diimplementasikan tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Sehingga pada tatanan praktis, partisipasi masyarakat hanya dalam penyampaian asprasi dalam tahap perencanaan pembangunan yang forumnya adalah Musrenbang. Sedang pada tahap penganggaran, partisipasi masyarakat diwakili oleh DPRD.

Menurut Bappeda, itulah bentuk ideal partisipasi masyarakat di Kabupaten Sukamara. Secara lebih spesifik disebutkan, system perencanaan pembangunan di Kabupaten Sukamara adalah system perencanaan pembangunan partisipatif tertutup.

System ini diterapkan karena:

Keragaman suku, ras, agama masyarakat Kabupaten Sukamara, sehingga dengan keragaman tersebut sulit untuk menyatukan pendapat diakibatkan adanya sikap *egoistic self interest*, sehingga menimbulkan banyak keragaman keinginan yang sulit untuk dibuat menjadi satu kesepakatan bersama.

Dikhawatirkan jika Perencanaan pembangunan partisipatif terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dilaksanakan. malah akan menimbulkan konflik. sebabmasyarakat Kabupaten Sukamara dengan kultur yang beragam, IPM yang masih rendah,akan sulit untuk duduk bersama membuat suatu kesepakatan bersama.

Menurut Bappeda. sepanjang masyarakat sudah terlibat dalam Musrenbang dan aspirasi mereka ditampung / diakomodir oleh pemerintah, itulah makna Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Dan secara spesifik sebenarnya ada lima pendekatan perencanaan pembangunan, dalam penyusunan RKPD yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, top-down dan bottom-up.

1. **Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja)**

   Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan RKPD dalam mencapai tujuan, sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam Musrenbang RKPD. Penyusunan RKPD pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan.

   Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

   a. Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu
   b. Rumusan status, kedudukan kinerja pembangunan daerah masa kini
   c. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD
   d. Rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, result oriented, time bound)
   e. Rumusan alternatif strategi untuk pencapaian tujuan
   f. Rumusan kebijakan untuk masing-masing strategi
   g. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya dan dana (kendala fiskal daerah)
   h. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerjaTolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal

i. Tolok ukur dan target kinerja keluaran

j. Tolok ukur dan target kinerja hasil

k. Pagu indikatif program dan kegiatan.

l. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya

m. Kejelasan siapa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, dan waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran

2. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif

Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Identifikasi stakeholder yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD

b. Kesetaraan antara stakeholder dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan

c. Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan

d. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal

e. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD

f. Pelibatan media

g. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif

h. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan dan prioritas program

3. Pendekatan Politis

Pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Konsultasi dengan Kepala Daerah Terpilih untuk penerjemahan yang tepat, sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42855.pdf

daerah

b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD

c. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD

d. Review dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan RKPD

e. Pembahasan terhadap RANPERKADA RKPD

f. Pengesahan RKPD sebagai Peraturan Kepala Daerah yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan

4. Pendekatan Bottom-up

Pendekatan bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih

b. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah

c. Mempertimbangkan hasil Forum SKPD

5. Pendekatan Top down

Pendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Sinergi dengan RKP dan RENJA K/L

b. Sinergi dan konsistensi dengan RPJPD dan RPJMD

c. Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD

d. Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals*, *Sustainable Development*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih dan sanitasi, dsb

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka